

**KLHS RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2017-2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas PerkenanNya jua Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tagun 2017-2022 ini telah selesai disusun. Penyusunan KLHS RPJMD ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pelaksanaan KLHS RPJMD ini ditempuh melalui proses yang cukup panjang dari saat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi tim penyusun KLHS RPJMD Hulu Sungai Utara, Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD) sampai pelaksanaan Konsultasi Publik yang pelaksanaan keseluruhannya di mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan KLHS yaitu seluruh tim KLHS RPJMD Hulu Sungai Utara, Tenaga ahli dan tenaga teknis, Perguruan Tinggi, LSM, unsur swasta, tokoh masyarakat, perwakilan SKPD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Komunitas Pecinta Lingkungan, Bappeda Kabupaten tetangga dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel.

Kami menyadari dokumen ini masih banyak kekurangannya, untuk itu masukan dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu, sesuai dengan tujuannya semoga dengan adanya laporan KLHS ini, maka RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 dapat lebih meningkat kualitasnya dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam RPJMD tersebut.

Amuntai, Maret 2018

Tim Penyusun KLHS RPJMD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	I-3
1.2.1. Tujuan.....	I-3
1.2.2. Sasaran.....	I-4
1.3.. Ruang Lingkup.....	I-4
1.4. Dasar Hukum.....	I-5
BAB II KONSEP KLHS RPJMD.....	II-1
2.1. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan.....	II-1
2.2. Nilai Penting KLHS RPJMD.....	II-1
2.2.1. Keterkaitan.....	II-2
2.2.2. Keseimbangan.....	II-2
2.2.3. Keadilan.....	II-2
2.3. Pendekatan KLHS RPJMD.....	II-4
2.4. Konsep RPJMD Berkelanjutan.....	II-5
2.5 Konsep <i>Capacity Development</i> (CD) KLHS RPJMD.....	II-7
BAB III GAMBARAN UMUM.....	III-1
3.1. Kondisi Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-1
3.1.1. Gambaran Umum Wilayah.....	III-1
3.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	III-12

	3.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	III-18
3.2.	Kondisi Lingkungan.....	III-19
	3.2.1. Jasa Penyediaan (Provisioning).....	III-19
	3.2.2. Jasa Budaya (Cultural).....	III-24
	3.2.3. Jasa Pendukung (Supporting).....	III-27
	3.2.4. Jasa Pengaturan (Regulating).....	III-31
3.3.	Kondisi Ekonomi.....	III-32
	3.3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	III-32
3.4	Kondisi Sosial Budaya.....	III-38
	3.4.1. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan.....	III-38
	3.4.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	III-43
	3.4.3. Pendidikan.....	III-45
	3.4.4. Kesehatan.....	III-57
BAB	IV METODE KLHS.....	IV-1
	4.1 Metode Persiapan.....	IV-1
	4.2 Metode Pelingkupan.....	IV-5
	4.3 Metode Kajian Pengaruh KRP dan Kajian Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-8
	4.4 MetodePerumusan Alternatif Penyempurnaan KRP RPJMD dan Mitigasi.....	IV-13
	4.5. MetodePenyusunanRekomendasi Perbaikan KRP RPJMD.....	IV-17
	4.6. Metode Integrasi KLHS ke dalam RPJMD.....	IV-18
BAB	V PERSIAPAN.....	V-1
	5.1 Mengumpulkan data dan informasi awal serta membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan.....	V-1

	5.2	Menyusun Rencana Kerja.....	V-7
BAB	VI	ANALISIS KLHS RPJMD.....	VI-1
	6.1.	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-1
	6.1.1.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-1
	6.1.2.	Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-5
	6.1.3.	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-6
	6.1.4.	Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (terpilih).....	VI-8
	6.2.	Identifikasi Materi Muatan KRP-RPJMD Yang Berpotensi Menimbulkan pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan.....	VI-9
	6.3.	Analisis Pengaruh KRP RPJMD Dengan Isu Prioritas PB.....	VI-12
	6.4.	Analisis Pengaruh KRP RPJMD Terhadap Kajian Muatan LH.....	VI-15
	6.4.1.	Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT).....	VI-19
	6.4.2.	Jasa Ekosistem.....	VI-21
	6.4.3.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	VI-22
	6.4.4.	Dampak Resiko LH.....	VI-23
	6.4.5.	Perubahan Iklim.....	VI-23
	6.4.6.	Keanekaragaman Hayati.....	VI-24
	6.5.	Perumusan Alternatif KLHS RPJMD Kab. HSU.....	VI-25
	6.6.	Integrasi KLHS ke Dalam Dokumen RPJMD Kab.HSU.....	VI-34
BAB	VII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	VII-1
	7.1.	Kesimpulan.....	VII-1
	7.2	Saran	VII-7

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penjelasan KLHS RPJMD.....	II-5
Tabel 2.2.	Rencana Implementasi Konsep “partisipasi aktif” dalam KLHS RPJMD	II-7
Tabel 3.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-1
Tabel 3.2.	Jumlah Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	III-8
Tabel 3.3.	Klasifikasi Pangan.....	III-19
Tabel 3.4.	Klasifikasi Ketersediaan Air Bersih.....	III-20
Tabel 3.5.	Klasifikasi Serat (Fiber).....	III-21
Tabel 3.6.	Klasifikasi Energi.....	III-22
Tabel 3.7.	Klasifikasi Sumber Daya Genetik.....	III-23
Tabel 3.8.	Klasifikasi Tempat Tinggal & Ruang Hidup.....	III-24
Tabel 3.9.	Klasifikasi Rekreasi dan <i>Ecotourism</i>	III-25
Tabel 3.10	Klasifikasi Estetika.....	III-26
Tabel 3.11	Peta DDDT Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan...	III-27
Tabel 3.12	Peta DDDT Silus Hara.....	III-28
Tabel 3.13	Peta DDDT Produk Primer.....	III-29
Tabel 3.14	Peta DDDT Biodiversitas.....	III-30
Tabel 3.15	Peta DDDT Iklim.....	III-31
Tabel 3.16	Peta DDDT Tata Air.....	III-32
Tabel 3.17	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	III-35
Tabel 3.18	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016.....	III-36

Tabel 3.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Rill) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2012-2016.....	III-37
Tabel 3.20	Jumlah Individu Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015.....	III-42
Tabel 3.21	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2011-2016	III-44
Tabel 3.22	Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-50
Tabel 4.1	Tahapan Kegiatan dan Metode Persiapan KLHS RPJMD.....	IV-3
Tabel 4.2	Kelompok MSF KLHS RPJMD.....	IV-3
Tabel 4.3	Peserta “Partisipasi Aktif” KLHS RPJMD.....	IV-4
Tabel 4.4	Tahapan Kegiatan dan Metode Pelingkupan.....	IV-6
Tabel 4.5	Matrik penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan.....	IV-7
Tabel 4.6	Matrik penentuan isu paling strategis pembangunan berkelanjutan.....	IV-7
Tabel 4.7	Matrik penentuan isu prioritas pembangunan berkelanjutan.....	IV-8
Tabel 4.8	Tahapan Kegiatan dan Metode Kajian Pengaruh KRP dan PB.....	IV-9
Tabel 4.9	Sintesis Kondisi Pembangunan Berkelanjutan Daerah.....	IV-10
Tabel 4.10	Penapisan KRP RPJMD.....	IV-12
Tabel 4.11	Analisis Pengaruh KPR RPJMD terhadap Isu PB.....	IV-12
Tabel 4.12	Analisis Muatan KPR RPJMD terhadap Muatan Kajian Lingkungan Hidup.....	IV.13
Tabel 4.13	Tahapan Kegiatan dan Metode Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP dan Mitigasi.....	IV-14
Tabel 4.14	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Daerah.....	IV-14
Tabel 4.15	Matriks Identifikasi Permasalahan KRP RPJMD.....	IV-15
Tabel 4.16	Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP RPJMD.....	IV-16

Tabel 4.17	Tahapan Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP RPJMD....	IV-17
Tabel 5.1	Pokja Pengendalian Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	V-1
Tabel 5.2	Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	V-4
Tabel 5.3	Materi dan Jadwal Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.....	V-9
Tabel 6.1	Pelaksanaan FGD Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	VI-1
Tabel 6.2	Isu Lingkungan.....	VI-3
Tabel 6.3	Isu Ekonomi.....	VI-3
Tabel 6.4	Isu Sosial.....	VI-4
Tabel 6.5	Isu Lingkungan Paling Strategis.....	VI-5
Tabel 6.6	Isu Ekonomi Paling Strategis.....	VI-6
Tabel 6.7	Isu Sosial Paling Strategis.....	VI-6
Tabel 6.8	Isu Prioritas Lingkungan.....	VI-7
Tabel 6.9	Isu Prioritas Ekonomi.....	VI-7
Tabel 6.10	Isu Prioritas Sosial.....	VI-8
Tabel 6.11	Isu Sangat Prioritas (Terpilih).....	VI-8
Tabel 6.12	Identifikasi materi muatan KRP-RPJMD yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup.....	VI-9
Tabel 6.13	Pengaruh Materi Muatan KRP RPJMD prioritas dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas.....	VI-13
Tabel 6.14	Pengaruh KRP RPJMD dengan 6 (Enam) Kajian Muatan.....	VI-16
Tabel 6.15	Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU.....	VI-25
Tabel 6.16	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kab. HSU.....	VI-38
Tabel 7.1	Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU.....	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	.Rasionalitas Lokal dalam Kontinum KLHS.....	II-4
Gambar 3.1.	Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-2
Gambar 3.2.	Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-3
Gambar 3.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014.....	III-9
Gambar 3.4.	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara...	III-13
Gambar 3.5.	Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-14
Gambar 3.6.	Peta DDDT Pangan.....	III-19
Gambar 3.7.	Peta DDDT Ketersediaan Air Bersih.....	III-20
Gambar 3.8.	Peta DDDT Serat (Fiber).....	III-21
Gambar 3.9.	Peta DDDT Energi.....	III-22
Gambar 3.10	Peta DDDT Sumber Daya Genetik.....	III-23
Gambar 3.11	Peta DDDT Tempat Tinggal & Ruang Hidup.....	III-24
Gambar 3.12	Peta DDDT Rekreasi dan <i>Ecotourism</i>	III-25
Gambar 3.13	Peta DDDT Estetika.....	III-26
Gambar 3.14	Peta DDDT Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan.....	III-27
Gambar 3.15	Peta DDDT Silus Hara.....	III-28
Gambar 3.16	Peta DDDT Produk Primer.....	III-29
Gambar 3.17	Peta DDDT Biodiversitas.....	III-30
Gambar 3.18	Peta DDDT Iklim.....	III-31
Gambar 3.18	Peta DDDT Tata Air.....	III-32
Gambar 3.19	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 -2016.....	III-38

Gambar 3.20	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012 – 2016..	III-39
Gambar 3.21	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-40
Gambar 3.22	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-41
Gambar 3.23	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 – 2016	III-42
Gambar 3.24	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2012 – 2016.....	III-44
Gambar 3.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012– 2016.....	III-46
Gambar 3.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012– 2016.....	III-47
Gambar 3.27	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-48
Gambar 3.28	Persentase Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 – 2016.....	III-49
Gambar 3.29	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012– 2016.....	III-51
Gambar 3.30	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012– 2016.....	III-52
Gambar 3.31	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-53
Gambar 3.32	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012– 2016.....	III-54

Gambar 3.33	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016	III-54
Gambar 3.34	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-55
Gambar 3.35	Angka Putus Sekolah (%) Berdasar Kelompok Umur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016.....	III-57
Gambar 3.36	Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. HSU Tahun 2012-2017.....	III-57
Gambar 3.37	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kab. HSU Tahun 2012 – 2017.....	III-58
Gambar 3.38	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kab. HSU Tahun 2012 – 2017	III-59
Gambar 4.1	Tahapan kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	IV-1
Gambar 4.2	Tahapan kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	IV-2
Gambar 4.4	Tahap Kegiatan Pelingkupan.....	IV-6
Gambar 4.5	Tahapan kajian pengaruh KRP dan kajian pembangunan berkelanjutan.	IV-9
Gambar 4.6	Tipologi Pendekatan Integrasi KLHS ke dalam RPJMD/RTRW.....	IV-17



BAB I PENDAHULUAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.1. Latar Belakang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kajian yang melalui proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari Kebijakan, Rencana, dan atau Program KRP RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan kedalam kebijakan yang akan melahirkan program dan kegiatan prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD tahun 2017 - 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan untuk Indikasi program dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan Badan dan Dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Kementerian/Badan/Lembaga/instansi Pusat yang berada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing diwujudkan secara bertahap menurut prioritas penanganannya, yaitu prioritas tinggi, prioritas sedang dan prioritas rendah.

Proses pelaksanaan KLHS dan pengintegrasian ke dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan suatu proses pengambilan keputusan yang legal formal, hal ini sejalan dengan tugas tim penyusun RPJMD tahun 2017 - 2022 yang juga termasuk tim Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan yang melaksanakan KLHS RPJMD. Proses pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Pedoman Pelaksanaan KLHS di dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Permen LH Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS dan Permendagri No. 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.



Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 144°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beribukota di Amuntai mempunyai luas wilayah 892,7 km² atau 2,38% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten HSU terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong di sebelah utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah timur, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin di sebelah selatan. Kabupaten HSU dilintasi sungai Balangan dan sungai Tabalong, serta didominasi 89% rawa dari luas total HSU.

Kondisi alam HSU menjadi faktor penting basis ekonomi HSU yang bertumpu pada sektor pertanian. Populasi padat penduduk berada di ibukota dan sekitarnya, serta di sepanjang jalan dan di aliran sungai (*urban river development*), dengan pertumbuhan penduduk yang cukup lambat yaitu kurang dari 1% per tahun. Perkembangan sektor industri dan perdagangan masih belum optimal, namun sektor-sektor tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pendapatan daerah, dan juga berpotensi memberikan tekanan pada kondisi alamnya serta sekaligus keberlanjutan kegiatan pembangunan sektor pertanian, khususnya pada pertanian lahan basah.

Pembangunan daerah memiliki tujuan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pergerakan perekonomian daerah agar efisien dan efektif serta mampu mewujudkan derajat kehidupan, namun dalam pengelolaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan, keharmonisan, maupun keberlanjutan dari suatu ekosistem sumberdaya alam. Oleh sebab itu, perlu ditekankan perwujudan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya dalam mengelola sumber daya secara maksimal tetapi juga memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari ekosistem tatanan kehidupan manusia.

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan umumnya dan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan khususnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sumber



daya alam yang cukup melimpah, terutama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi dieksploitasi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan mulai meningkat secara signifikan dan tentu saja akan berimbas pada kerentanan ekosistem yang berada di dalamnya.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penyelenggaraan KLHS melalui proses:

- A. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS meliputi
 1. Pengkajian pengaruh RPJMD terhadap kondisi Lingkungan Hidup
 2. Perumusan alternatif penyempurnaan RPJMD
 3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RPJMD yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
- B. Penjaminan Kualitas, dan Pendokumentasian KLHS; dan
- C. Permohonan Validasi KLHS RPJMD

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan RPJMD.
- b) Menjamin agar penyusunan RPJMD dirumuskan berdasarkan pertimbangan pembangunan berkelanjutan.
- c) Membangun wahana sinergi dan kerjasama berbagai kepentingan sektoral dan kewilayahan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
- d) Membantu memperluas alternatif RPJMD yang relevan terhadap keberlanjutan pembangunan.
- e) Menjamin proses dan produk RPJMD yang membantu mengurangi dampak negatif pada program.



1.2.2 Sasaran

Sasaran KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

- a) Membangun kesadaran para pihak akan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, termasuk rasa memiliki terhadap pembangunan regional di wilayahnya, dalam hal ini hasil RPJMD sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan daerah; dan
- b) Membangun komitmen para pihak untuk konsisten dalam menindaklanjuti RPJMD yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan persiapan yang meliputi; identifikasi perkembangan proses kebijakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan penyusunan rencana kerja KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b) Melakukan pelingkupan yang meliputi; penetapan nilai penting, tujuan dan kedalaman/lingkup KLHS, penyusunan informasi dasar, penyusunan konsep RPJMD berkelanjutan, telaah tujuan, kebijakan, dan strategi RPJMD, identifikasi isu pokok pembangunan berkelanjutan, penilaian dan penetapan isu strategis, isu paling strategis dan isu prioritas.
- c) Melakukan kajian kebijakan, rencana, dan program (KRP) yaitu RPJMD terhadap kondisi lingkungan hidup yang meliputi; a) Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan; b) Baseline dan analisis data untuk menapis isu strategis ke isu prioritas; c) Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan 5) Analisis pengaruh hasil identifikasi KRP terkait dengan hasil perumusan isu pembangunan berkelanjutan.
- d) Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meliputi; perumusan alternatif tujuan, kebijakan, dan strategi, penyusunan alternatif indikasi program.



- e) Menyusun rekomendasi perbaikan KRP RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meliputi; perbaikan rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi, perbaikan rumusan muatan rencana, dan perbaikan indikasi program.
- f) Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- g) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara
- h) Permohonan Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan KLHS dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);



6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
12. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



25. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);



36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
42. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



BAB II

KONSEP KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.1. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara akan memberikan pengaruh yang substansial. Pandangan ini menjadi landasan pemikiran bahwa aspek- aspek substansial wilayah menjadi bahan atau masukan dan sekaligus sebagai keluaran utama proses KLHS RPJMD. Sebagai masukan, aspek substansial wilayah terikat pada rasionalitas lokal, yaitu landasan rasional yang berpijak pada aspek substansial wilayah, seperti tipologi ekosistem wilayah, kearifan lokal, dan juga kekhususan sistem ekonomi regional.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang berlandaskan pada pilar: a) ekonomi, b) sosial, dan c) lingkungan, maka dengan mempertimbangkan rasionalitas lokal sebagai masukan utama KLHS RPJMD. Konsep pembangunan berkelanjutan juga perlu ditransformasikan menjadi konsep pembangunan berkelanjutan daerah. Selanjutnya, dalam proses transformasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui proses kajian keberlanjutan terpadu, dikembangkan menjadi suatu kajian pembangunan berkelanjutan daerah yang mempertimbangkan rasionalitas lokal.

2.2. Nilai Penting KLHS RPJMD

Terdapat nilai penting yang harus direfleksikan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Selanjutnya Kebijakan, rencana, dan program yang menjadi obyek KLHS adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis, karena berbasiskan pada konteks interaksi sistem alam dan sistem sosial. Tindakan manusia yang mempengaruhi ekosistem akan direspons oleh ekosistem itu sendiri. Sebaliknya,



pengaruh ekosistem terhadap manusia akan direspons oleh sistem sosial, dalam berbagai bentuknya.

Systems Thinking adalah paradigma yang tepat digunakan untuk memandang objek KLHS, sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Nilai penting dan tujuan KLHS RPJMD ini dikonstruksikan berdasarkan paradigma *Systems Thinking*.

2.2.1. Keterkaitan

Keterkaitan dijadikan nilai penting agar KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal. Paradigma *Systems Thinking* memandang bahwa seluruh komponen sistem dalam suatu sistem tertentu, misalnya sistem pembangunan berkelanjutan, memiliki keterkaitan antar komponennya. Gangguan terhadap keterkaitan antar komponen sistem tersebut akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi seluruh komponen dalam RPJMD, sebagai suatu sistem saling memiliki keterkaitan, dan setiap komponennya memiliki perannya masing-masing. Keterkaitan sangat tepat menjadi nilai penting KLHS.

2.2.2. Keseimbangan

Keseimbangan sebagai nilai penting KLHS, dimaksudkan agar KLHS dijiwai oleh keseimbangan antar berbagai kepentingan, yaitu sosial-ekonomi dan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta keseimbangan pusat dan daerah. Paradigma *Systems Thinking* memahami keseimbangan sistem berbeda dengan pemahaman nilai keseimbangan dalam KLHS ini. Suatu sistem selain memiliki keterkaitan antar komponennya, juga memiliki interaksi diantaranya. Menggunakan paradigma *Systems Thinking*, keseimbangan yang dimaksud dalam nilai KLHS dapat dijelaskan sebagai keharmonisan interaksi antar komponen sistem.

2.2.3. Keadilan

Keadilan sebagai nilai penting, dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan



marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber atau modal atau pengetahuan. Dalam pandangan paradigma *Systems Thinking*, keadilan dalam konteks. KLHS dapat ditempatkan sebagai keluaran dari sistem yang menjadi objek KLHS.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan nilai penting KLHS, prinsip tercapainya tujuan RPJMD dan tujuan KLHS, maka nilai penting KLHS RPJMD adalah sebagai berikut:

1) Keterkaitan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk menjaga keterkaitan pembangunan antar sektor, wilayah, lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta komponen pembangunan berkelanjutan lainnya.

2) Keharmonisan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk menjaga interaksi yang harmonis dalam pembangunan antar sektor, wilayah, lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta komponen pembangunan berkelanjutan lainnya.

3) Keadilan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan, menjaga dan atau mencapai keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi.

4) Keberlanjutan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan

ekonomi. Berdasarkan tujuan KLHS dan RPJMD, KLHS RPJMD adalah untuk mewujudkan RPJMD yang berlandaskan dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.3. Pendekatan KLHS RPJMD

KLHS RPJMD menggunakan pendekatan kajian keberlanjutan secara terpadu yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan berlandaskan pada rasionalitas lokal, baik rasionalitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau didasarkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan daerah. Transformasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempertimbangkan rasionalitas lokal dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: Hasil Olahan Sendiri

Gambar 2.1. Rasionalitas Lokal dalam Kontinum KLHS

Proses isu pembangunan berkelanjutan (PB) KLHS RPJMD mengacu pada pasal 7 sampai pasal 9 dalam PP Nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyenggaraan KLHS. Paradigma dan pendekatan baru yang digunakan pada KLHS ini, yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan daerah, dan pendekatan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan rasionalitas lokal. Pendekatan KLHS digunakan untuk penyusunan KLHS RPJMD, disajikan pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1.

Pendekatan KLHS RPJMD

No	Jenis Pendekatan KLHS	Penjelasan
1.	Kerangka dasar analisis mengenai dampak lingkungan hidup	Menekankan kajian pada dampak KRP terhadap lingkungan hidup
2.	Pendekatan penilaian keberlanjutan lingkungan hidup	KLHS sebagai alat uji KRP untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup
3.	Kajian terpadu/penilaian keberlanjutan	Kajian keberlanjutan secara holistik yang mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan
4.	Kerangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	KLHS sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5.	Kajian terpadu pembangunan berkelanjutan daerah	Kajian komprehensif keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan berlandaskan pada rasionalitas lokal (sistem ekonomi regional, kearifan lokal, dan tipologi ekosistem wilayah)

2.4. Konsep RPJMD Berkelanjutan

PP Nomor 46 tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Penyelenggaraan KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:
 1. Perubahan iklim;
 2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;



3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permintaan masyarakat.

Integrasi RPJMD ke dalam Pembangunan Berkelanjutan Daerah akan menghasilkan RPJMD yang berkelanjutan. Keberlanjutan (*sustainability*) menurut Miller (2007) adalah konsep dasar dari ilmu lingkungan. Keberlanjutan pada awalnya berasal dari bidang kehutanan, perikanan dan pengelolaan air tanah (Rogers *et al.*, 2008) yang menjadi landasan konsep produksi maksimum untuk menjamin kelestarian produksi. Dalam paradigma sistem pendukung kehidupan bumi (*earth's life support systems*), keberlanjutan adalah kemampuan berbagai sistem yang ada di bumi, termasuk sistem budaya dan ekonomi untuk dapat bertahan dan menyesuaikan diri menghadapi perubahan kondisi lingkungan secara terus menerus (Miller, 2007). Pada tahun 1993, Mohan Munasinghe, pakar ekonomi Bank Dunia memperkenalkan tiga aspek pendekatan pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, ekologi dan sosial-budaya (Rogers *et al.*, 2008).

2.5. Konsep *Capacity Development* (CD) KLHS RPJMD

UNDP (2008) mendefinisikan *Capacity Development* sebagai *the process through which individuals, organizations, societies, strengthen and maintain the capabilities to set and achieve their own development objective over time*. *Capacity Development* diawali kondisi organisasi, institusi atau masyarakat terkait kapasitas yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan. Kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terjadi, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dapat



menjadi indikator kapasitas pemerintah dan atau masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya proses KLHS RPJMD yang partisipatif, *Capacity Development* menjadi metode yang tepat untuk diterapkan, khususnya untuk anggota Pokja, dan tim yang akan turut serta melalui kegiatan “partisipasi aktif”. *Capacity Development* dilakukan dalam setiap tahap dalam prosedur penyusunan KLHS RPJMD, sehingga *Capacity Development* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Keterlibatan Pokja secara langsung juga mempertimbangkan budaya kerja dalam konteks keterkaitan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga mempertimbangkan variasi kapasitas diantara anggota pokja. Rencana implementasi konsep “partisipasi aktif” dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Rencana Implementasi Konsep “partisipasi aktif” dalam KLHS RPJMD.

No	Tahapan KLHS RPJMD	Metode			
		Observasi, Wawancara, Telaah dokumen	FGD, Delphi, <i>Expert Judgment</i>	Tinjauan Literatur, Analisis Kebijakan	<i>System Dynamics, Spatial Modelling</i>
1	Persiapan	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	-
2	Pelingkupan	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Fasilitator
3	Kajian Pengaruh KRP dan Kajian Pembangunan Berkelanjutan	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Fasilitator
4	Perumusan Alternatif Penyempurnaan RPJMD	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Fasilitator
5	Penyusunan Rekomendasi	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	Fasilitator
6	Integrasi ke dalam RPJMD	Pokja/ Fasilitator	Pokja/ Fasilitator	-	-



BAB III GAMBARAN UMUM

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

3.1. Kondisi Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

3.1.1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km². Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 224,49 km² atau 25,15% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km² atau 3,28% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut.

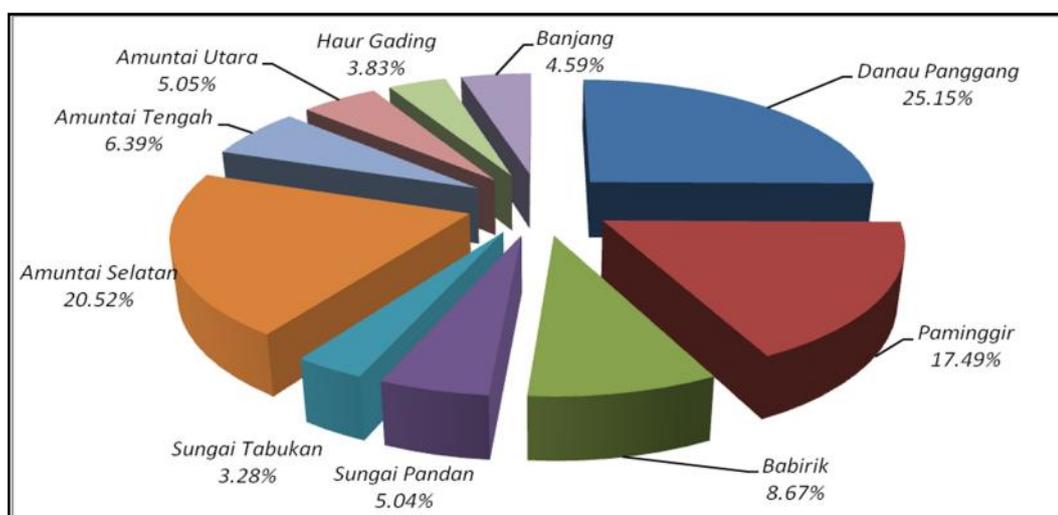
Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1.	Danau Panggang	224,49	25,15	-	16
2.	Babirik	77,44	8,67	-	23
3.	Sungai Pandan	45,00	5,04	-	33
4.	Amuntai Selatan	183,16	20,52	-	30
5.	Amuntai Tengah	56,99	6,39	5	24
6.	Banjang	41,10	4,59	-	20
7.	Amuntai Utara	45,00	5,05	-	26
8.	Haur Gading	34,15	3,83	-	18
9.	Sungai Tabukan	29,24	3,28	-	17
10	Paminggir	156,13	17,49	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2017



Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 25,15%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 3,26%. Secara lengkap proporsi masing-masing kecamatan terhadap luasan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :



Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.1.
Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Letak dan Kondisi Geografis

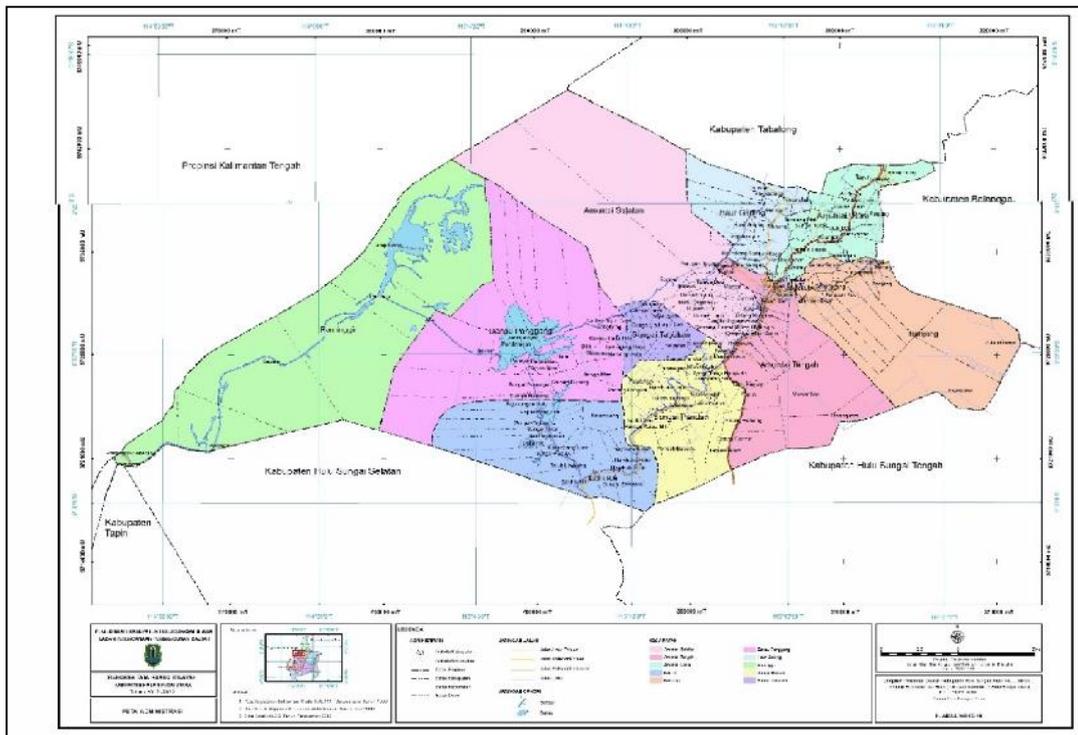
Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km² atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut :



- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada gambar 3.2 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah



Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032.

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 3.2.

Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara



B. Topografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (*flood plain*) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam *back swamp* dan *peat swamp*. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan *levee* yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan *back swamp* sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan *peat swamp* dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut (*dome*) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa *levee* dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah



kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

C. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim



penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah :

- 1) Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit $\pm 350 \text{ m}^3/\text{detik}$ merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit $\pm 250 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan $\pm 300 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- 2) Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (T_c) debit limpasan air hujan menuju titik *outlet* DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
- 3) Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *inflow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba, bahan baku air bersih dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada $115^0 17' \text{ BT}$ dan $02^0 17' \text{ LS}$ sampai $115^0 26' \text{ LS}$ dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai



pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *inflow* debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar 11,43 km² dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar 57,02 km². Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa 0,2 – 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5 m – 1,5 m.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklm di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai *Afaw* (menurut sistem *Koppen*) yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah



hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Sepanjang tahun 2016, kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami 219 kali hari hujan dengan jumlah curah hujan mencapai 4.300,8 mm. Rata-rata hari hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 18,25 hari dalam sebulan. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai utara adalah 358,4 mm perbulan. Bulan dengan jumlah hari hujan paling sedikit adalah Bulan Agustus yang hanya 5 hari hujan. Bulan yang paling sering hujan adalah Bulan Desember yang mencapai 27 hari hujan. Untuk curah hujan terbesar ada pada Bulan Pebruari yang mencapai 659,5 mm. Jumlah curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Jumlah Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh)
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016

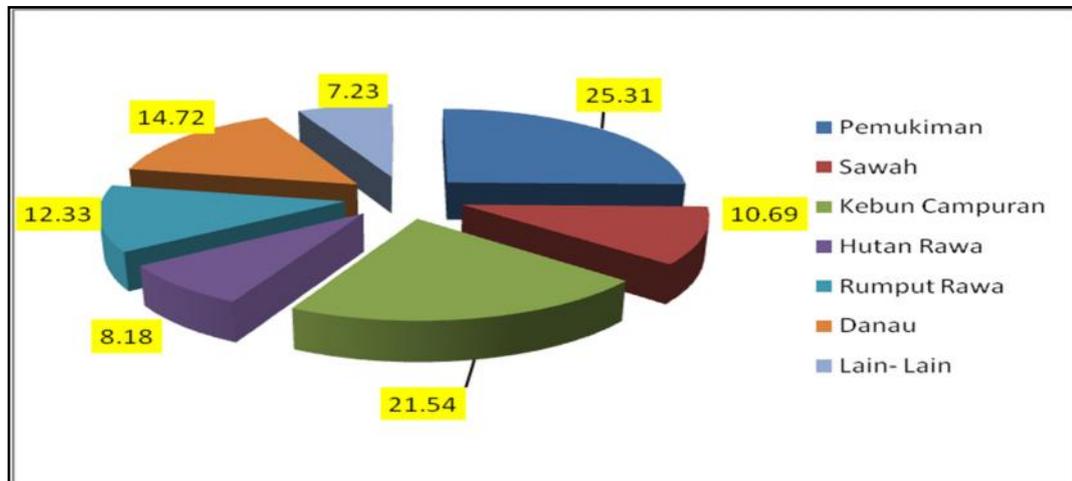
Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)					Hari Hujan (hh)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	239,53	256,7	187,7	390,5	279,5	14	16	15	28	22
Februari	209,75	310,8	118,5	409,7	659,5	13	15	11	26	22
Maret	305,48	176,7	308,1	293,3	610	17	13	17	23	19
April	290,82	298,6	227,1	428,9	441,5	18	14	16	19	20
Mei	113,25	232,9	151,5	133,90	294	7	13	13	12	17
Juni	106,48	68,4	134,2	130,9	279,5	8	8	9	17	13
Juli	63,58	179,6	57,6	30,9	214	7	13	5	10	16
Agustus	13,58	56,6	53,4	15,6	95	4	8	5	7	5
September	41,45	55	34,4	10	214	5	6	3	2	18
Oktober	96,6	80,7	44	40,00	214	17	8	6	6	18
November	163,16	206,5	185,2	240	587,5	18	13	12	21	22
Desember	355,28	300,8	279,2	278,8	412,3	25	15	18	23	27
Rata – rata	166,58	185	148,4	200,21	358,4	13	12	11	16	18,25



Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka, Tahun 2013-2017

D. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa hutan rawa, disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah gambar penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 3.3.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014

Berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.



Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan Mesjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami' Besar di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjarang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.



Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

3.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun terus-menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian.

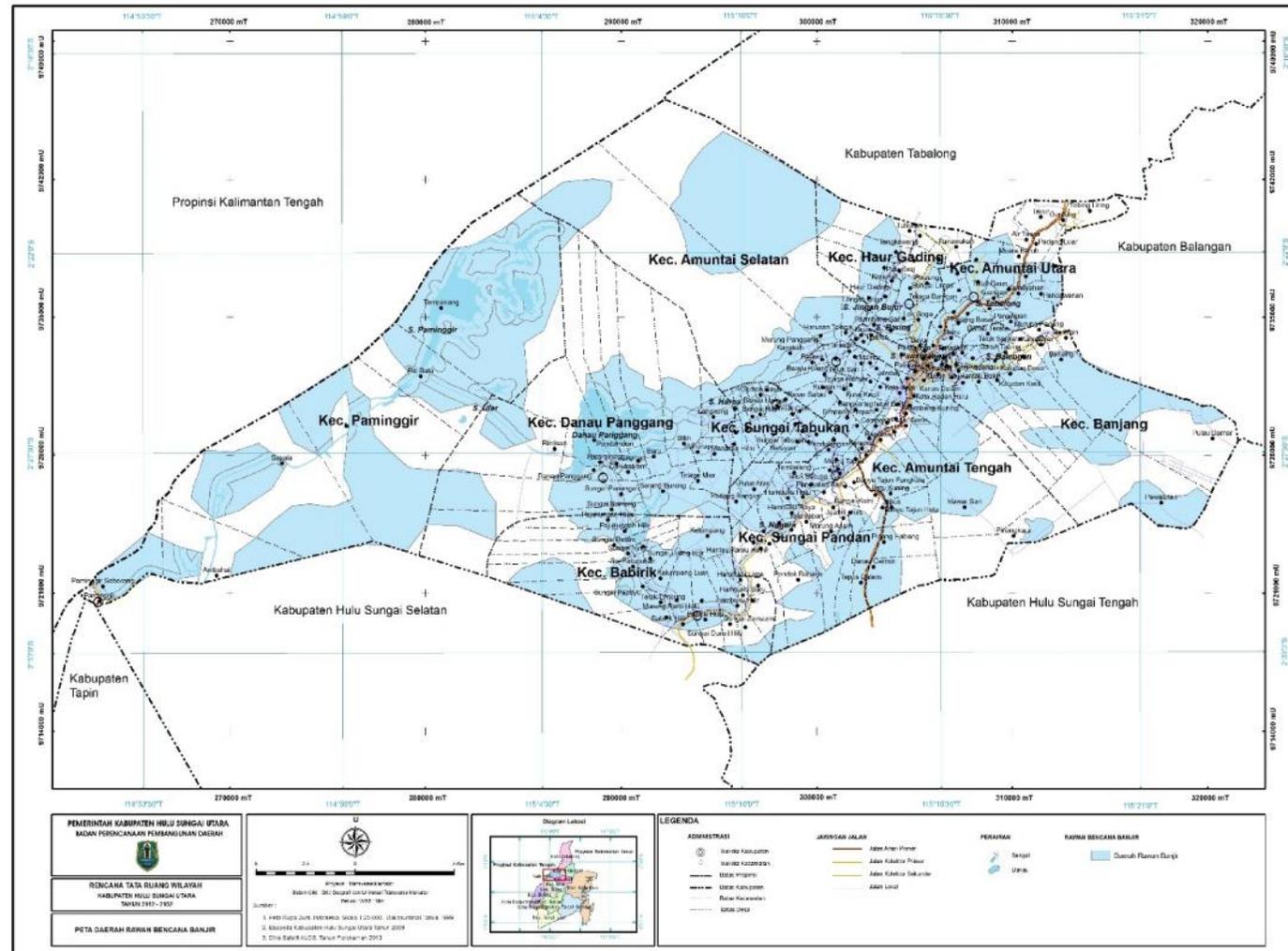
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan



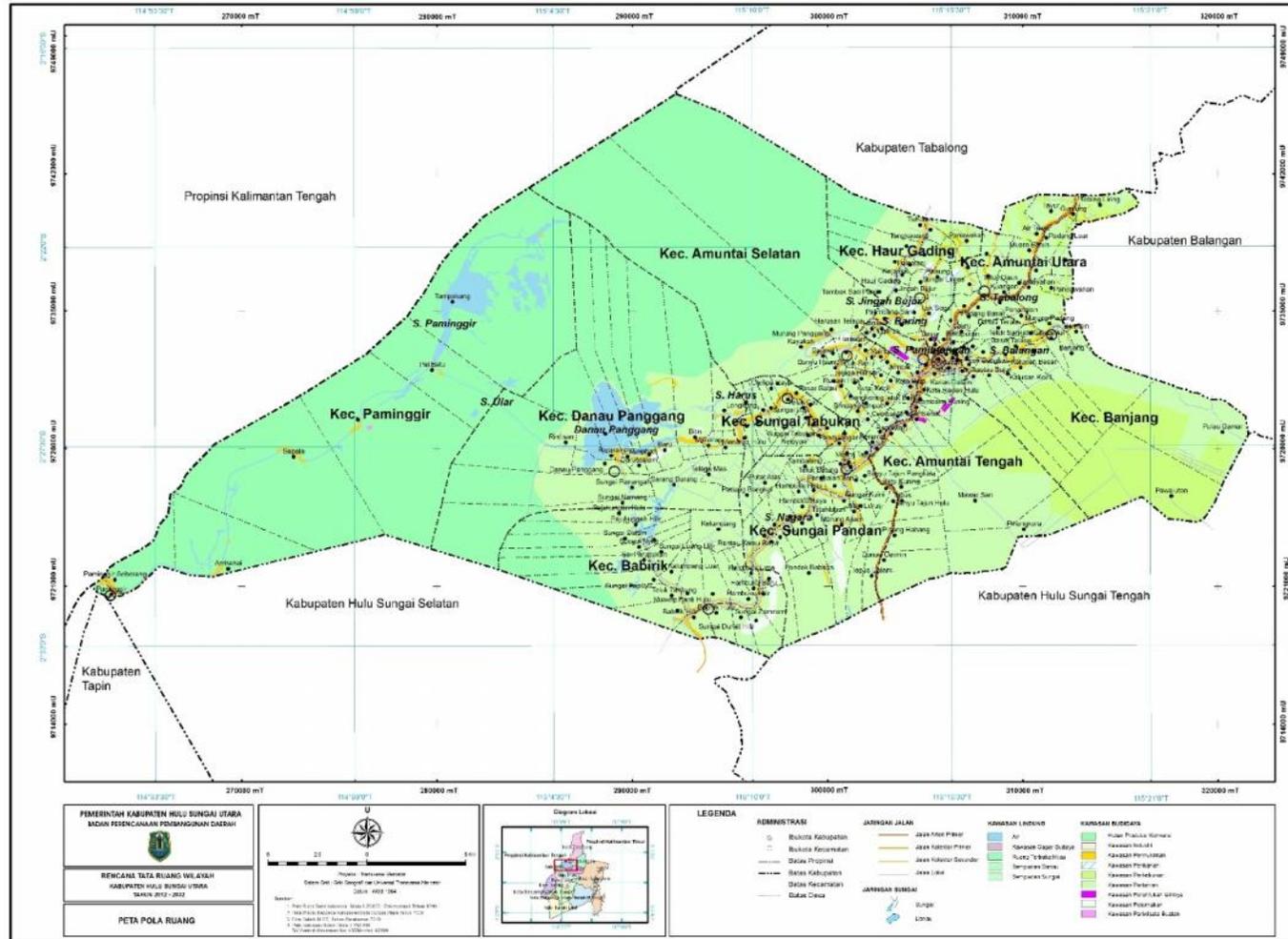
industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan produksi yang dapat di konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh sebab itu, kawasan ini dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan melihat peluang berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.



Gambar 3.4. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 3.5. Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara



Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan Amuntai Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 5.298 ha, Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan Sungai Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan Kecamatan Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 ha terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 ha dan Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 553 ha.

Optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak. Lokasinya tersebar di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunana rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjarang dan kecamatan Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan



perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutung, yang dinilai sesuai untuk dikembangkan di lahan rawa.

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjarang dan pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat perbibitan ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan; pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan sentra produksi telur dan pembesaran Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kecamatan kecuali paminggir.

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus (*Channa striata*), toman (*Channa micropeltes*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*) dan betok (*Anabas testudineus*).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana pengembangan daerah *reservaat* perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha.



Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dan tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai – sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian provinsi berupa sentra industri Amuntai yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang di alokasikan seluas kurang lebih 33 ha. Kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan di Desa Banyu Hirang (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai seluas kurang lebih 8 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, dan kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 ha, serta Kawasan industri rumah tangga kerajinan Mebel Aluminium di Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan seluas kurang lebih 5 ha

Untuk pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi peninggalan sejarah yang layak untuk dikembangkan, disamping kemungkinan



pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya. Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan obyek – obyek wisata yang ada serta pemanfaatan rawa sebagai potensi obyek pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata pada RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan seluas kurang lebih 10 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya (kawasan Candi Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan pariwisata buatan yang direncanakan adalah (a) pengembangan kawasan peruntukan pariwisata provinsi berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang; (b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 ha; dan (c) wisata belanja kerajinan rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu perlu pengembangan jalur wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.

3.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong di sebelah utara serta dua sungai lainnya yaitu Sungai Pamintangan dan Sungai Negara. Dengan adanya sungai besar yang mengelilingi dan elevasi kawasan yang tidak terlalu tinggi (sebagian besar kelerengannya 0 - 2%), maka wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar berpotensi banjir.

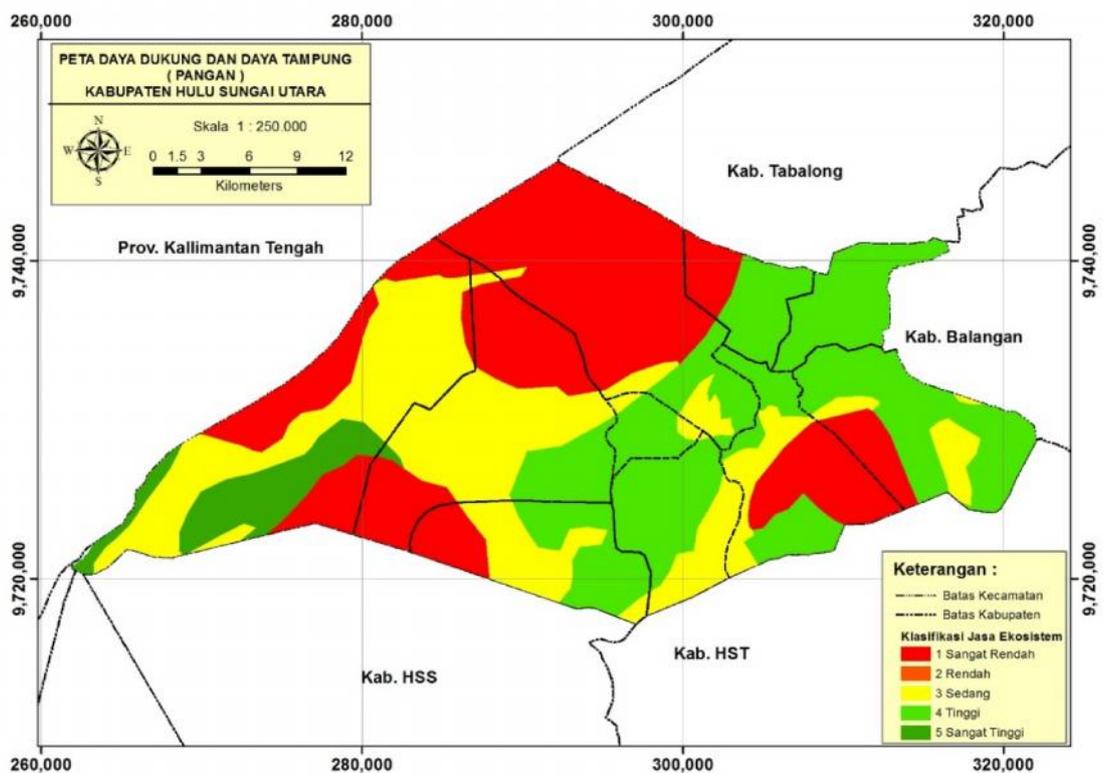
Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjarang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.

3.2. Kondisi Lingkungan

3.2.1. Jasa Penyediaan (*Provisioning*)

1. Pangan

Gambar 3.6. Peta DDDT Pangan



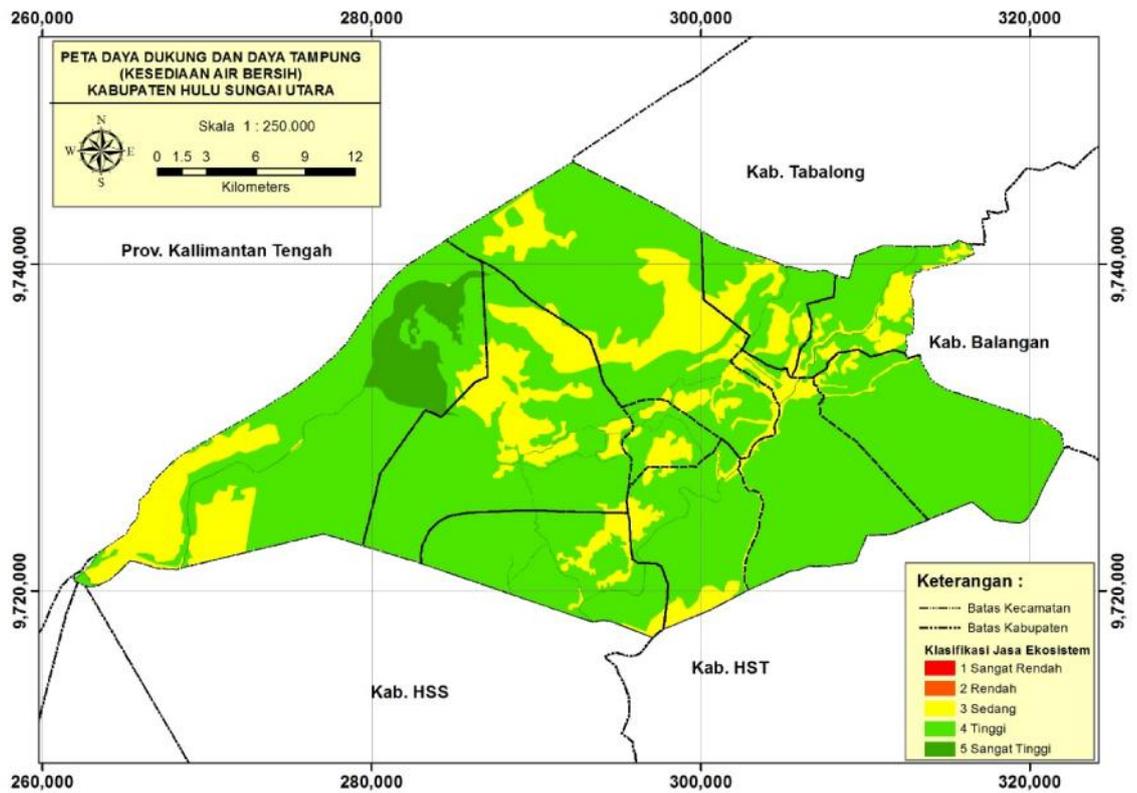
Tabel 3.3. Klasifikasi Pangan

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	31,115.36	34.86
2	Rendah	-	-
3	Sedang	25,412.98	28.47
4	Tinggi	28,291.24	31.69
5	Sangat Tinggi	4,450.42	4.99
Total		89,270.00	100.00



2. Air Bersih

Gambar 3.7. Peta DDDT Kesiediaan Air

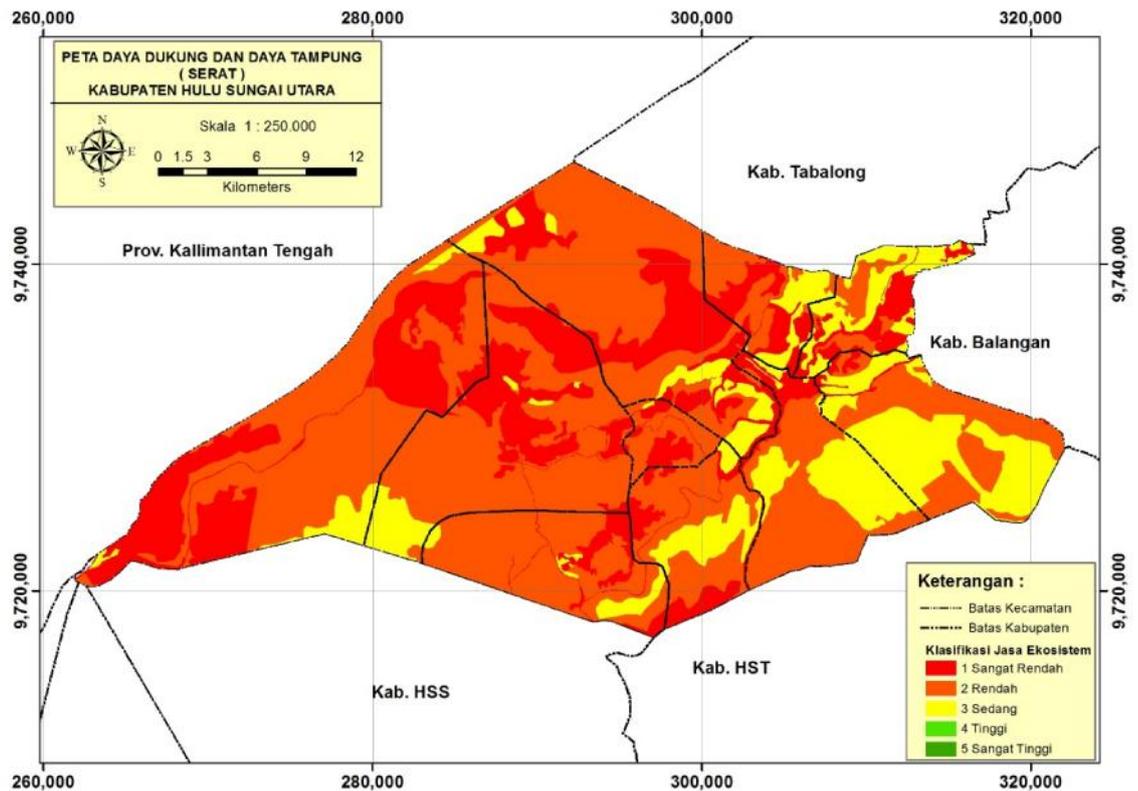


Tabel 3.4. Klasifikasi Kesiediaan Air Bersih

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	-	-
2	Rendah	-	-
3	Sedang	18,635.76	20.88
4	Tinggi	67,148.02	75.22
5	Sangat Tinggi	3,486.22	3.91
	Total	89,270.00	100.00

3. Serat (fiber)

Gambar 3.8. Peta DDDT Serat (Fiber)

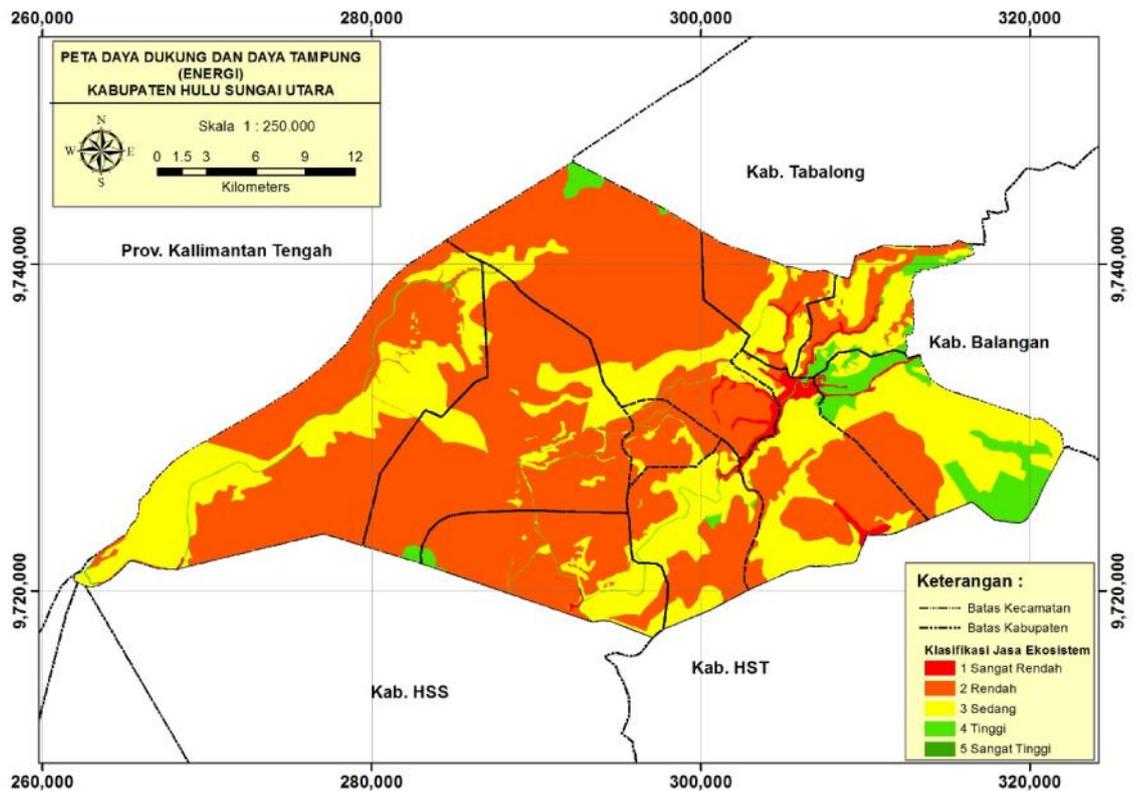


Tabel 3.5. Klasifikasi Serat (Fiber)

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	22,079.92	24.73
2	Rendah	51,298.08	57.46
3	Sedang	15,892.00	17.80
4	Tinggi	-	-
5	Sangat Tinggi	-	-
	Total	89,270.00	100.00

4. Energi

Gambar 3.9. Peta DDDT Energi

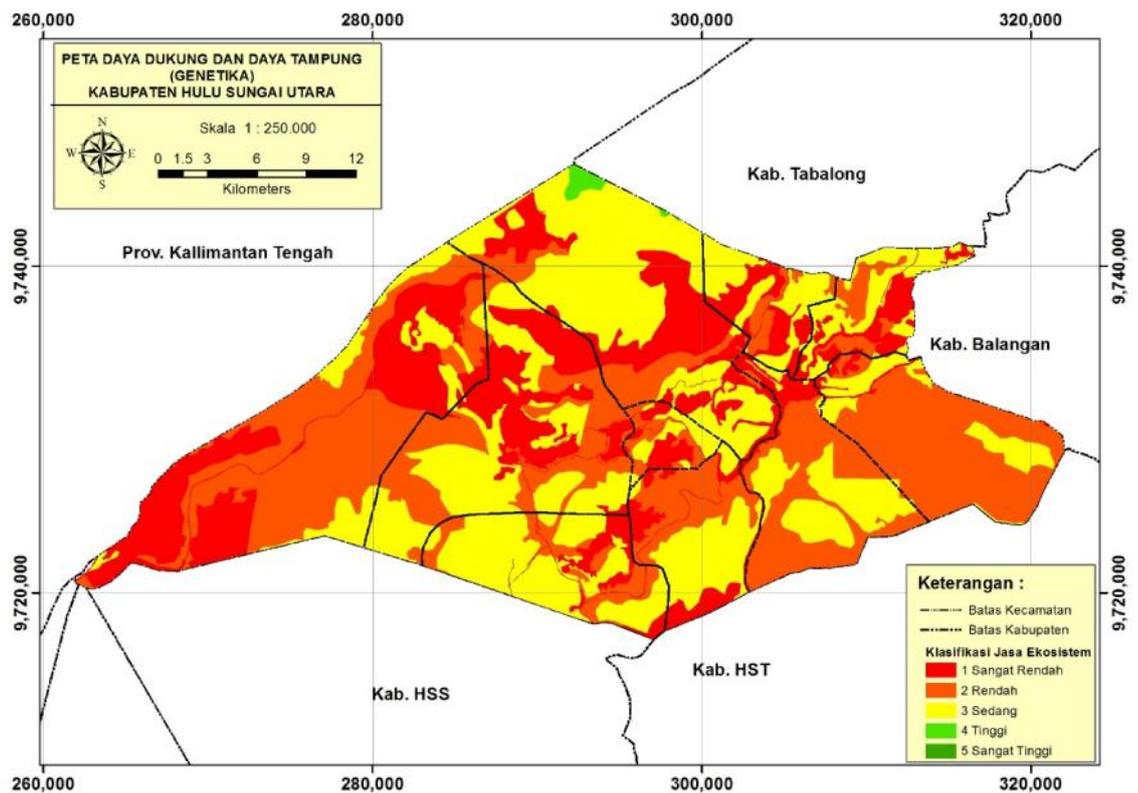


Tabel 3.6. Klasifikasi Energi

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	1,393.72	1.56
2	Rendah	55,917.65	62.64
3	Sedang	27,736.11	31.07
4	Tinggi	4,222.52	4.73
5	Sangat Tinggi	-	-
	Total	89,270.00	100.00

5. Sumber Daya Genetik

Gambar 3.10. Peta DDDT Sumber Daya Genetik



Tabel 3.7. Klasifikasi Sumber Daya Genetik

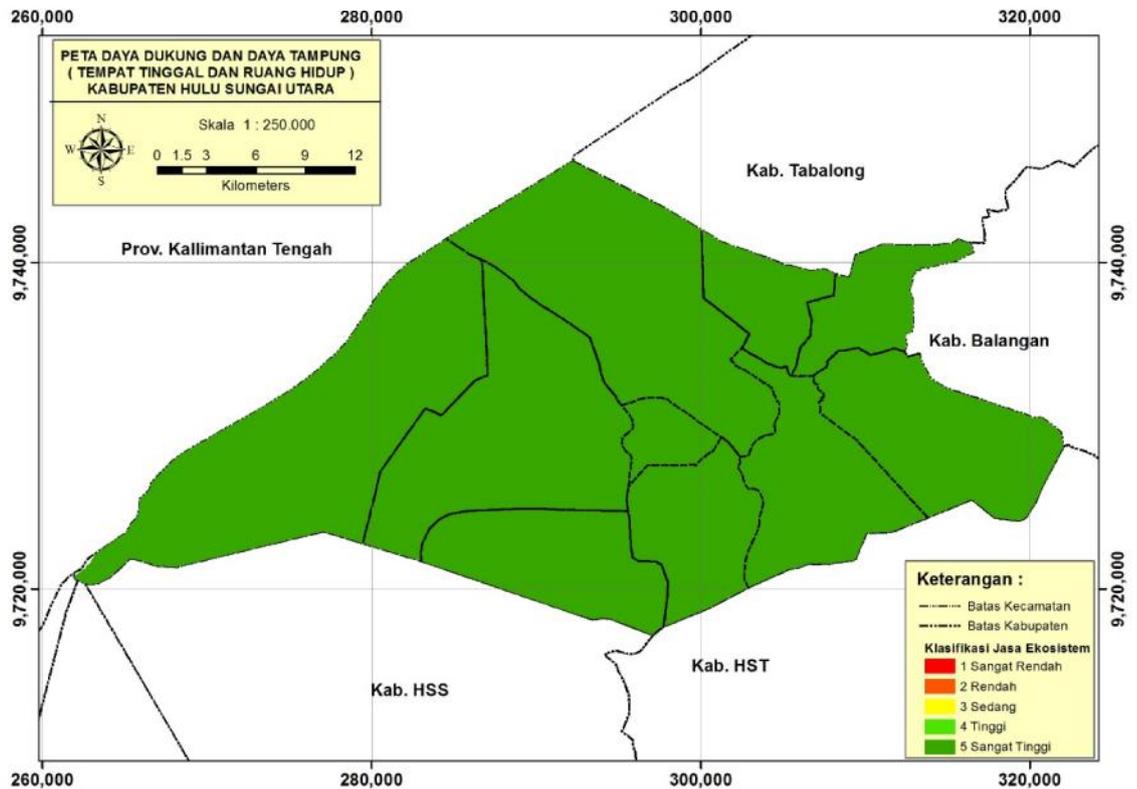
No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	22,079.92	24.73
2	Rendah	33,006.14	36.97
3	Sedang	33,865.76	37.94
4	Tinggi	318.18	0.36
5	Sangat Tinggi	-	-
	Total	89,270.00	100.00



3.2.2. Jasa Budaya (Cultural)

1. Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Sense of Place)

Gambar 3.11. Peta DDDT Tempat Tinggal & Ruang Hidup



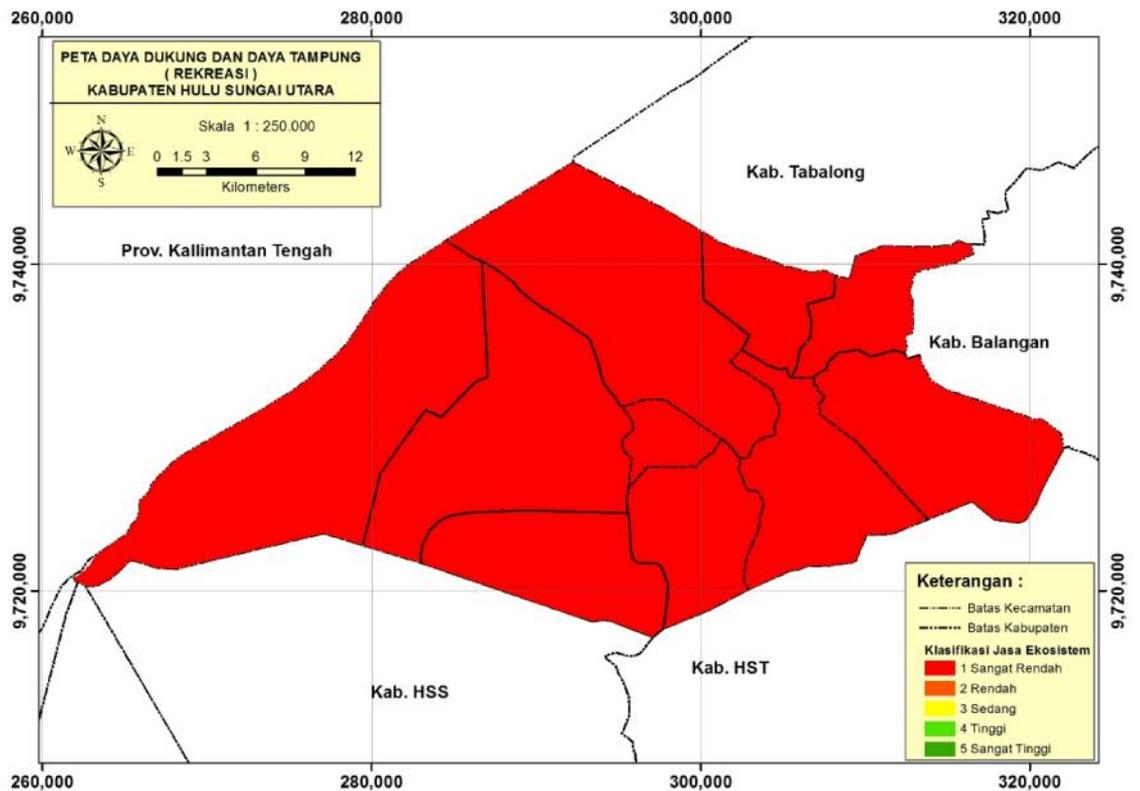
Tabel 3.8. Klasifikasi Tempat Tinggal & Ruang Hidup

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	-	-
2	Rendah	-	-
3	Sedang	-	-
4	Tinggi	-	-
5	Sangat Tinggi	89,270.00	100.00
	Total	89,270.00	100.00



2. Rekreasi dan *Ecotourism*

Gambar 3.12. Peta DDDT Rekreasi dan *Ecotourism*



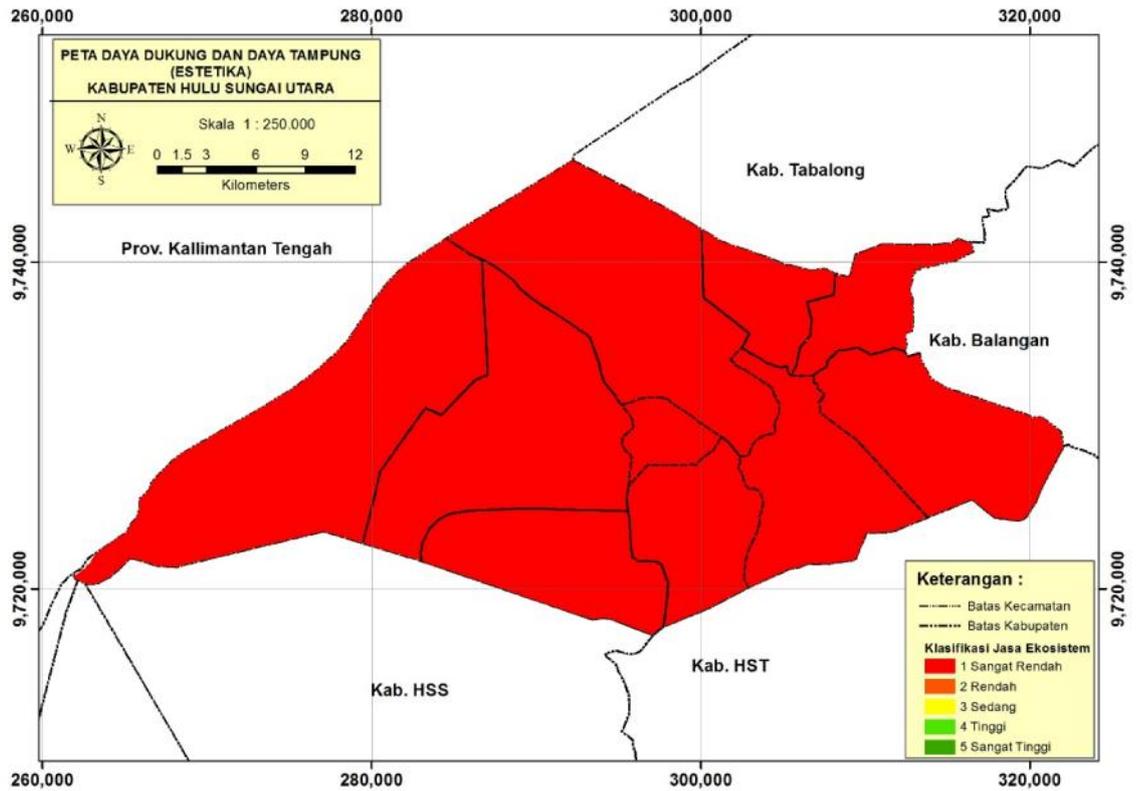
Tabel 3.9. Klasifikasi Rekreasi dan *Ecotourism*

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	89,270.00	100.00
2	Rendah	-	-
3	Sedang	-	-
4	Tinggi	-	-
5	Sangat Tinggi	-	-
	Total	89,270.00	100.00



3. Estetika

Gambar 3.13. Peta DDDT Estetika



Tabel 3.10. Klasifikasi Estetika

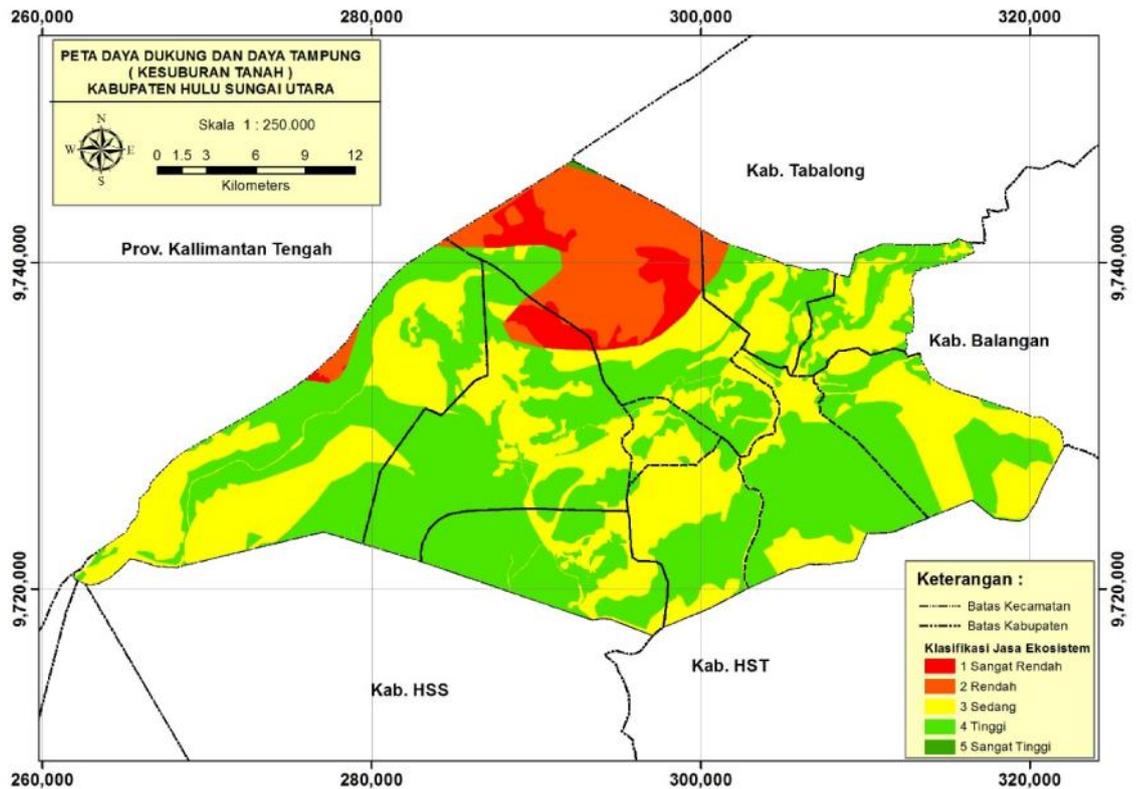
No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	89,270.00	100.00
2	Rendah	-	-
3	Sedang	-	-
4	Tinggi	-	-
5	Sangat Tinggi	-	-
	Total	89,270.00	100.00



3.2.3. Jasa Pendukung (Supporting)

1. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan

Gambar 3.14. Peta DDDT Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan

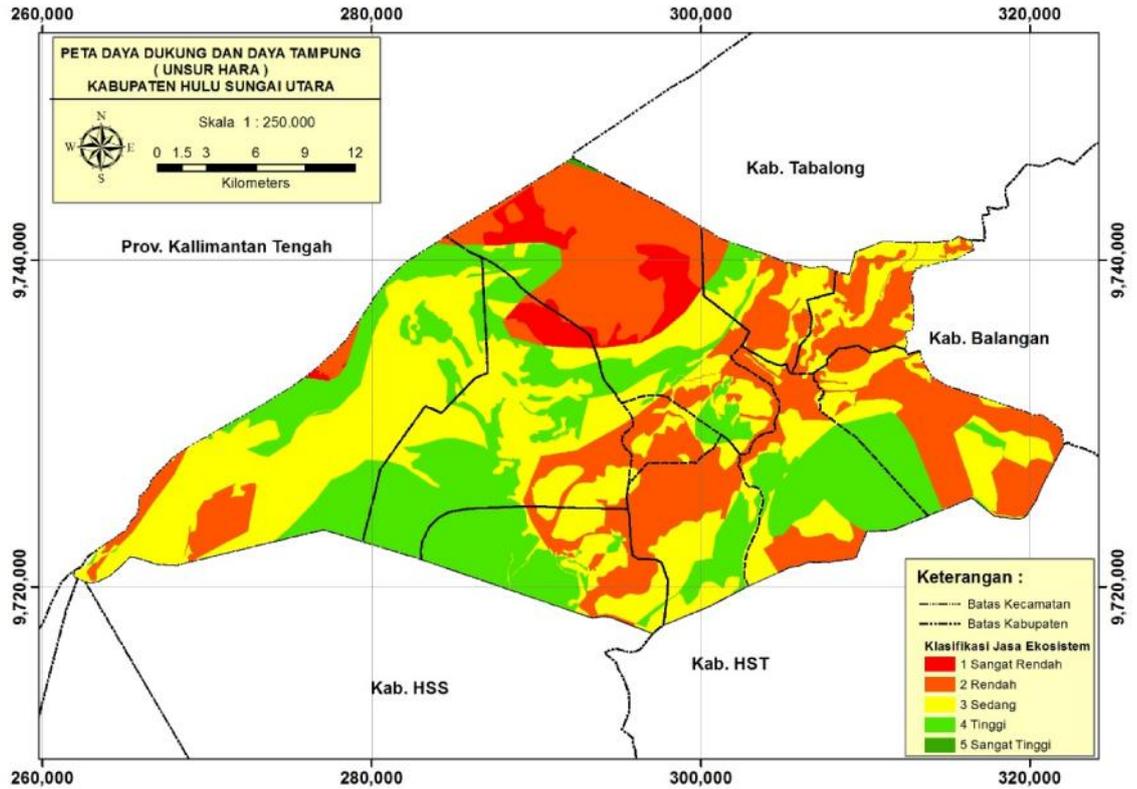


Tabel 3.11. Klasifikasi Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	3,032.00	3.40
2	Rendah	8,053.08	9.02
3	Sedang	33,813.53	37.88
4	Tinggi	44,325.90	49.65
5	Sangat Tinggi	45.48	0.05
	Total	89,270.00	100.00

2. Siklus hara (nutrient cycle)

Gambar 3.15. Peta DDDT Silus Hara

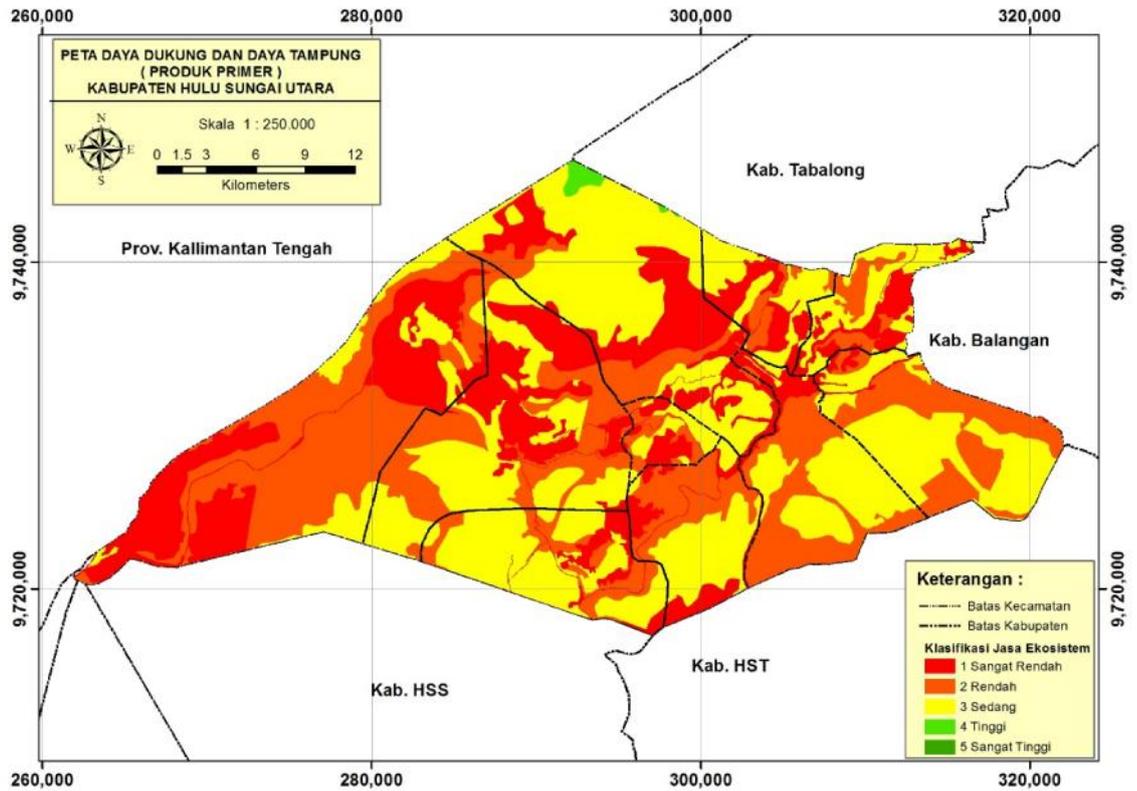


Tabel 3.12. Klasifikasi Silus Hara

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	3,032.00	3.40
2	Rendah	27,505.21	30.81
3	Sedang	33,814.51	37.88
4	Tinggi	24,872.80	27.86
5	Sangat Tinggi	45.48	0.05
	Total	89,270.00	100.00

3. Produk Primer

Gambar 3.16. Peta DDDT Produk Primer

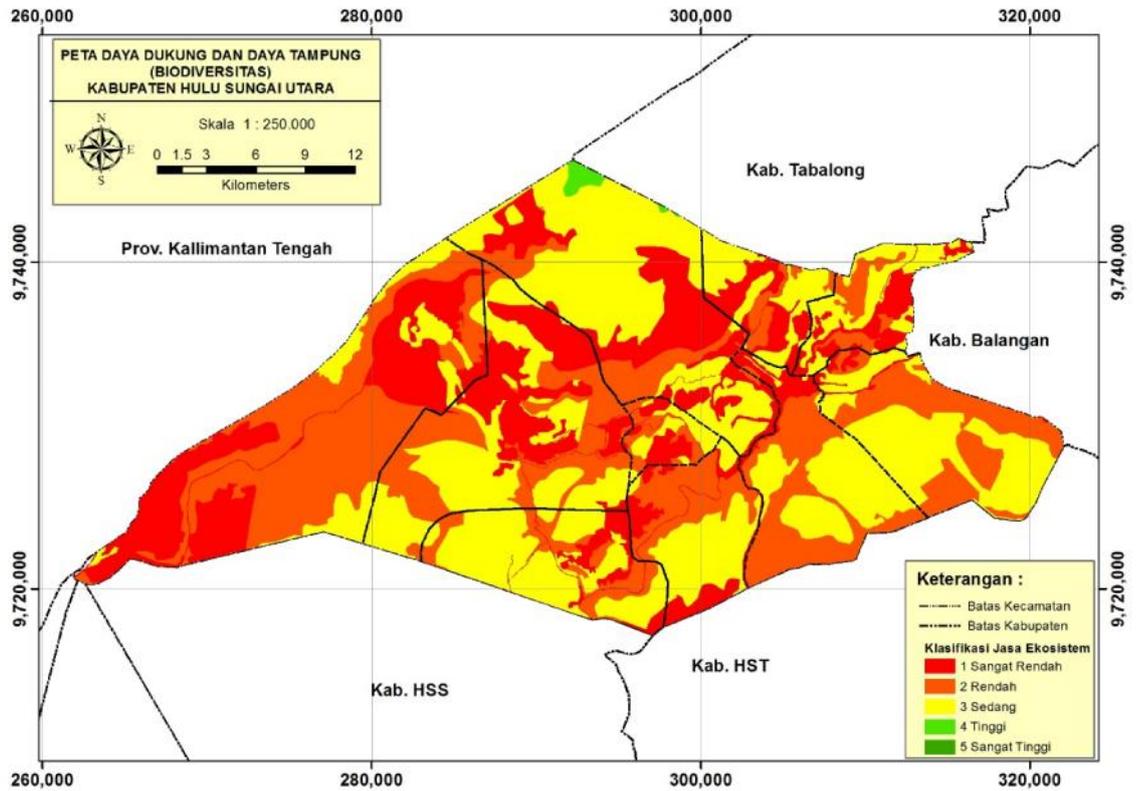


Tabel 3.13. Produk Primer

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	22,079.92	24.73
2	Rendah	29,062.28	32.56
3	Sedang	37,809.62	42.35
4	Tinggi	318.18	0.36
5	Sangat Tinggi	-	-
Total		89,270.00	100.00

4. Biodiversitas

Gambar 3.17. Peta DDDT Biodiversitas



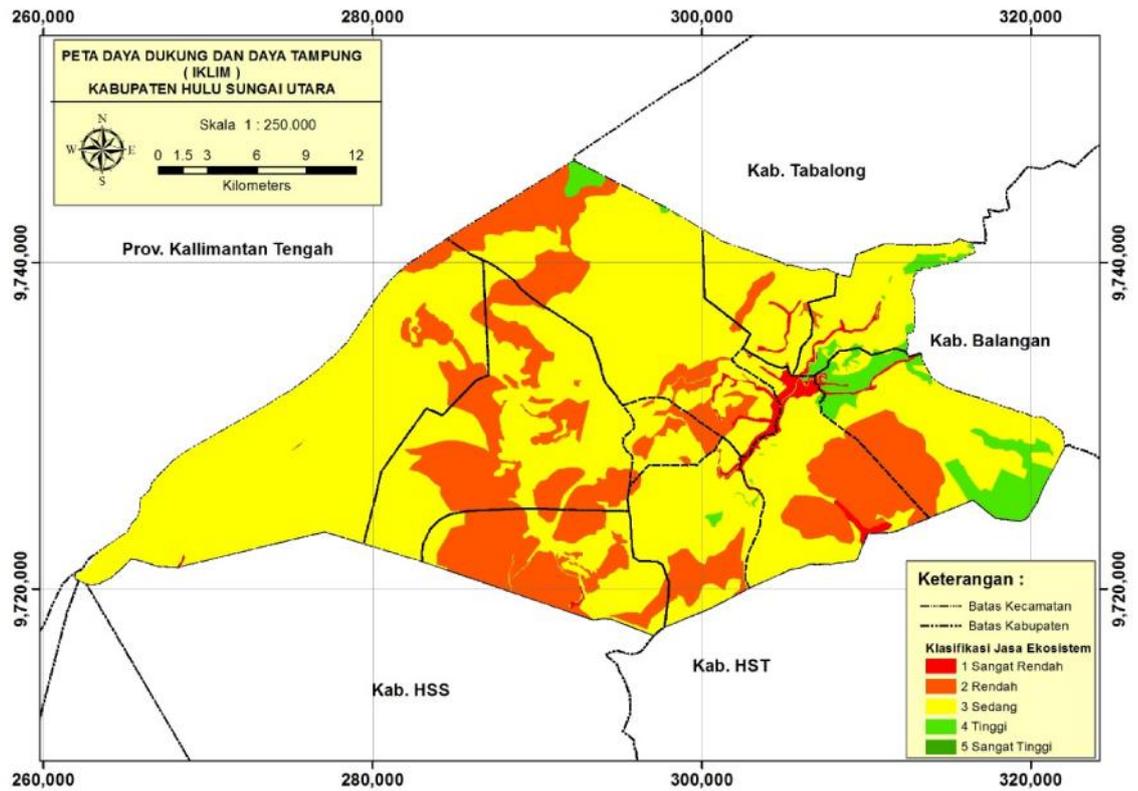
Tabel 3.14. Biodiversitas

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	22,079.90	24.73
2	Rendah	29,062.24	32.56
3	Sedang	37,809.69	42.35
4	Tinggi	318.18	0.36
5	Sangat Tinggi	-	-
Total		89,270.00	100.00

3.2.4. Jasa Pengaturan (Regulating)

1. Iklim

Gambar 3.17. Peta DDDT Iklim

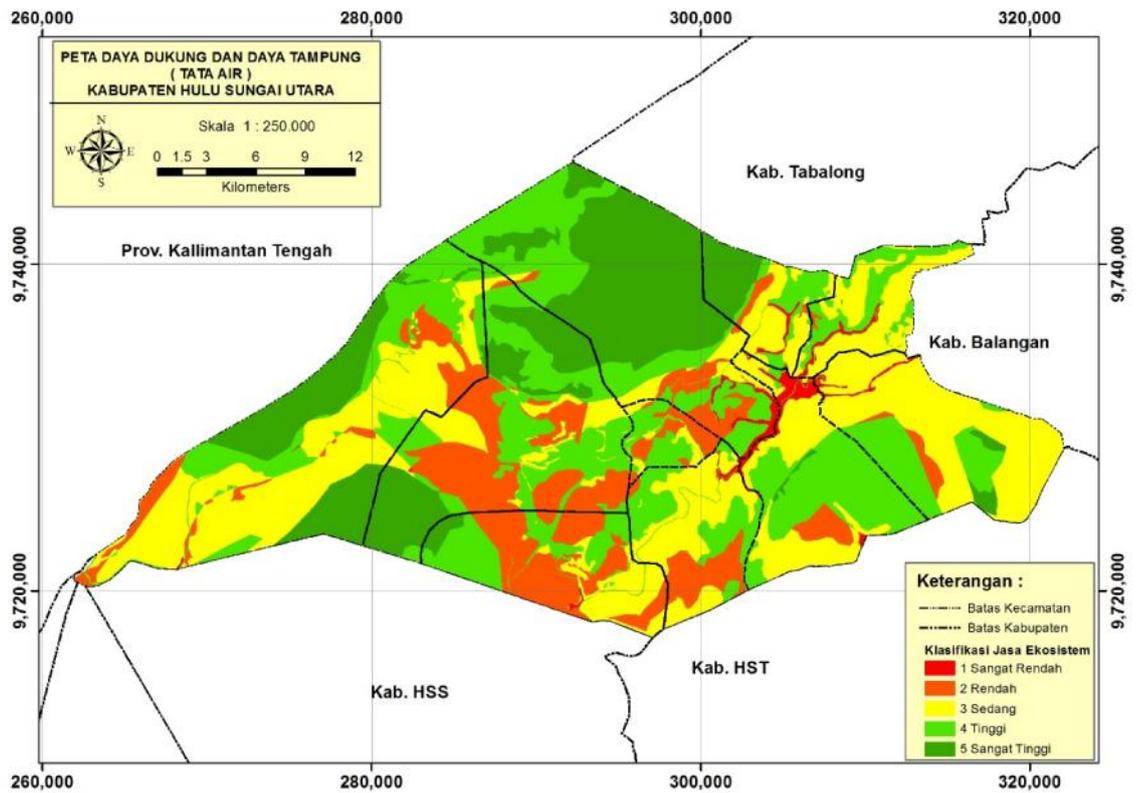


Tabel 3.15. Iklim

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	1,393.72	1.56
2	Rendah	21,721.05	24.33
3	Sedang	62,777.79	70.32
4	Tinggi	3,377.44	3.78
5	Sangat Tinggi	-	-
	Total	89,270.00	100.00

2. Tata Air

Gambar 3.18. Peta DDDT Tata Air



Tabel 3.16. Tata Air

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	1,256.37	1.41
2	Rendah	13,122.69	14.70
3	Sedang	28,648.07	32.09
4	Tinggi	27,929.79	31.29
5	Sangat Tinggi	18,313.08	20.51
	Total	89,270.00	100.00

3.3. Kondisi Ekonomi

3.3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang menyebabkan meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat



dan meningkatkan hubungan ekonomi regional yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung menurut harga tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan saat ini adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Dengan demikian, PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Di samping itu, penghitungan PDRB ini menggunakan konsep domestik, artinya seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di daerah/wilayah tertentu dihitung sebagai bagian dari nilai tambah yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepemilikan dari faktor produksi. Dengan kata lain, PDRB menunjukkan gambaran Production Originated.

Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Harga Konstan (ADHK Seri 2010) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB ADHK pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 2,41 Trilyun, meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2012 sebesar Rp.2,19 Trilyun. PDRB tahun 2014 tercatat sebesar



Rp. 2,55 Trilyun. PDRB Tahun 2016 sebesar Rp.2,81 Trilyun, meningkat dari Tahun 2015 sebesar 2,69 Trilyun. Secara kumulatif perkembangan PDRB ADHK Seri 2010 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 624 Milyar. Kenaikan nilai PDRB ADHK Seri 2010 bervariasi dari tahun ke tahun, hal ini dapat dipahami karena ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun Tahun 2013-2016 berfluktuatif. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen kemudian menaik tahun 2014 sebesar 5,99 persen. Pada Tahun 2014 ini kondisi perekonomian lebih kondusif, kemudian di tahun 2015 turun sebesar 5,34 persen dan tahun 2016 turun kembali sebesar 4,70 persen hal ini menunjukkan terjadi perlambatan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya tumbuh positif, namun peningkatan dan penajaman program-program pembangunan khususnya yang menyangkut bidang ekonomi pada tahun-tahun berikutnya perlu dijaga konsistensi dan kontinuitasnya dan perlu mendorong sektor-sektor yang mempunyai potensi tumbuh lebih besar tetapi belum tumbuh dengan baik.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha menunjukkan 5 sektor/kategori (Tahun 2016) dari 17 sektor/kategori yang ada dimana pertumbuhannya cukup tinggi yakni Kategori Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,33 persen, Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,98 persen, kategori Jasa Pendidikan 8,88 Persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,40 Persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,99 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Sektor Primer) hanya tumbuh sebesar 1,72 Persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2013-2016 sektor Jasa-Jasa dan Perdagangan tumbuh positif dan berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Tabel 3.17

PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	435.562,90	447.062,60	483.050,40	490.086,00	481.660,60
B	Pertambangan dan Penggalian	5.360,71	6.030,60	6.485,50	6.615,80	6.738,50
C	Industri Pengolahan	234.724,20	256.412,30	267.180,60	278.429,80	293.339,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.688,13	1.884,00	2.223,60	2.732,20	2.871,50
E	Pengadaan Air	15.847,01	17.080,00	18.909,30	19.919,40	21.494,10
F	Konstruksi	226.940,15	253.048,20	266.353,00	280.130,40	295.639,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	267.199,98	310.101,20	333.417,90	358.210,60	386.837,90
H	Transportasi dan Pergudangan	171.802,72	187.779,00	195.379,80	204.849,90	215.627,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.439,89	61.845,30	64.469,10	67.826,30	71.932,20
J	Informasi dan Komunikasi	82.112,90	91.584,90	98.353,60	105.243,20	114.693,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	59.896,11	70.797,20	75.163,60	78.422,20	85.011,80
L	Real Estate	84.065,39	91.507,30	94.594,30	99.092,10	104.662,90
M,N	Jasa Perusahaan	7.915,36	8.627,80	9.130,90	9.612,20	10.236,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	257.712,69	288.868,50	305.448,40	332.390,50	339.158,90
P	Jasa Pendidikan	193.163,73	215.166,70	227.629,50	243.939,80	265.605,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43.243,48	50.853,20	52.502,70	56.288,10	61.542,50
R,S,T,U	Jasa Lainnya	48.971,39	51.488,80	54.305,10	57.236,80	60.571,90
	PDRB	2.192.646,74	2.410.137,60	2.554.597,30	2.691.025,30	2.817.624,40

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (* = Data Sementara, ** = Data Sangat Sementara)



Tabel 3.18
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	452.110,72	482.196,32	508.887,36	586.782,78	649.477,33
B	Pertambangan dan Penggalian	5.635,88	6.320,74	6.773,02	7.816,95	8.623,66
C	Industri Pengolahan	226.659,67	262.516,45	296.663,07	333.706,99	369.065,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.577,27	1.648,43	1.638,50	1.962,04	2.743,15
E	Pengadaan Air	16.597,20	18.193,10	19.571,50	23.591,55	26.360,24
F	Konstruksi	240.289,06	259.594,56	283.728,11	323.637,31	370.849,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	288.205,01	322.822,83	364.848,56	416.864,44	474.151,67
H	Transportasi dan Pergudangan	180.393,55	195.933,31	213.535,71	239.057,40	264.935,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59.569,61	66.975,91	70.108,68	79.041,49	84.893,82
J	Informasi dan Komunikasi	86.637,08	95.109,90	101.984,22	114.511,10	126.292,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	62.149,98	70.688,96	85.830,15	93.835,15	101.862,35
L	Real Estate	88.319,69	95.324,22	103.741,72	116.315,91	125.365,61
M,N	Jasa Perusahaan	8.467,01	9.312,78	10.345,75	11.824,32	13.211,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	272.571,31	306.647,70	355.407,07	398.119,74	473.101,57
P	Jasa Pendidikan	203.672,99	225.546,10	244.852,23	269.927,54	314.736,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.685,49	51.579,65	57.871,01	63.570,34	75.127,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	51.759,61	55.951,89	58.239,60	65.779,26	74.648,00
	PDRB	2.290.301,13	2.526.362,85	2.784.026,26	3.146.344,31	3.555.445,37

Sumber : BPS Kabupaten HSU (* = Data Sementara, ** = Data Sangat Sementara)



Tabel 3.19
Laju Pertumbuhan Ekonomi (Rill) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2012-2016

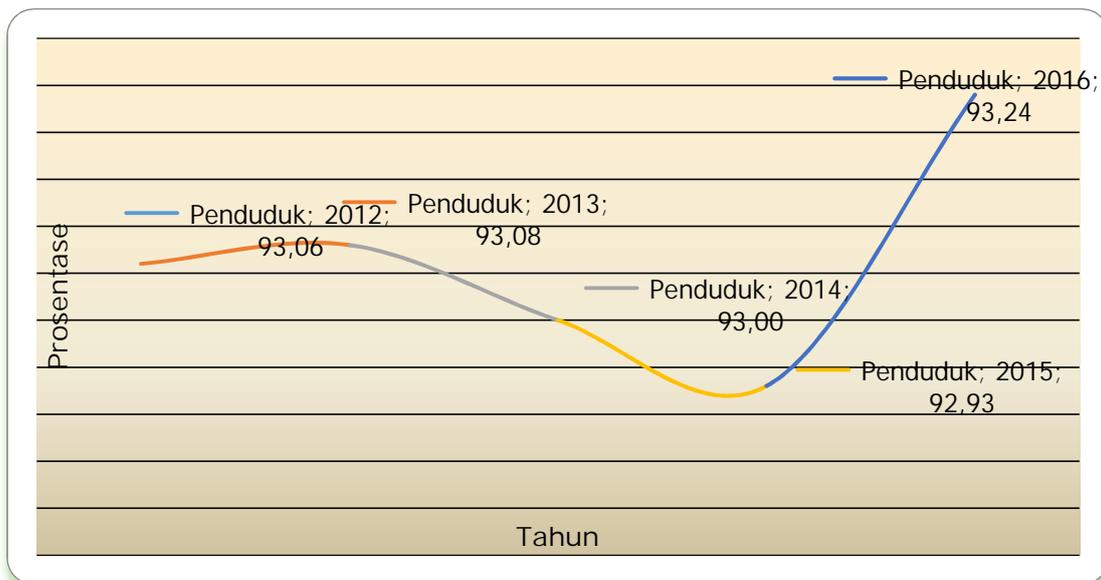
Kategori	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,92	0,27	8,04	1,46	1,72
B	Pertambangan dan Penggalian	8,02	4,14	7,54	2,01	1,86
C	Industri Pengolahan	10,27	9,24	4,74	4,21	5,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,08	2,32	12,57	22,88	5,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,08	4,56	10,71	5,34	7,91
F	Konstruksi	5,55	5,64	5,26	5,17	5,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,79	8,67	7,61	7,44	7,99
H	Transportasi dan Pergudangan	4,35	4,74	3,97	4,85	5,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,25	4,11	4,17	5,21	6,05
J	Informasi dan Komunikasi	6,25	4,98	7,39	7,00	8,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	14,10	6,17	4,34	8,40
L	Real Estate	3,66	5,01	3,31	4,75	5,62
M,N	Jasa Perusahaan	4,05	4,76	5,83	5,27	6,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	5,79	5,28	8,82	2,04
P	Jasa Pendidikan	5,11	5,98	5,75	7,17	8,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,04	9,86	3,03	7,21	9,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,02	2,06	5,21	5,40	5,83
	PDRB	5,40	5,34	5,98	5,34	4,70

Sumber : BPS Kabupaten HSU (* = Data Sementara, ** = Data Sangat Sementara)

3.4. Kondisi Sosial Budaya

3.4.1. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.



Sumber : BPS 2013-2017, diolah.

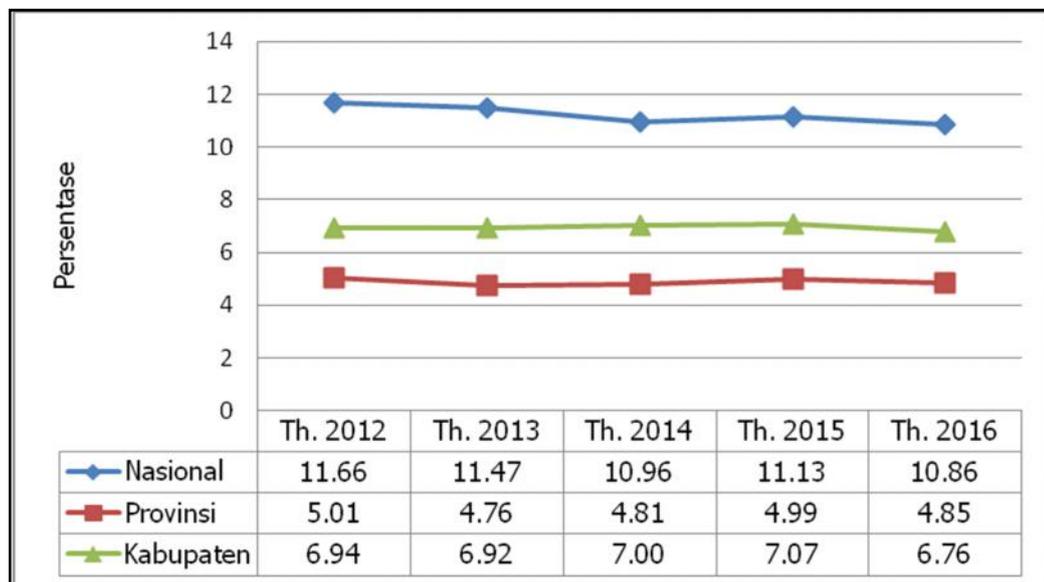
Gambar 3.19
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 -2016

Persentase Penduduk miskin dan Grafik Persentase penduduk diatas garis kemiskinan selalu berhubungan satu sama lainnya, yaitu saling mempengaruhi. Jika Persentase penduduk miskin trennya menurun maka tren persentase penduduk



diatas garis kemiskinan grafiknya naik dan sebaliknya jika tren persentase penduduk miskin naik maka grafik persentase penduduk diatas garis kemiskinan menurun, atau bisa juga dikatakan saling berbanding terbalik antara penduduk miskin dan penduduk diatas garis kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun dengan trend yang menurun. Meskipun terjadi penurunan, namun jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun Kab/Kota yang ada di Kalimantan Selatan persentase kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara paling tinggi. Hal ini disebabkan karena semua Kab/Kota berupaya yang sama untuk menurunkan kemiskinan. Meskipun begitu tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah dengan tingkat kemiskinan Nasional. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2017

Gambar 3.20

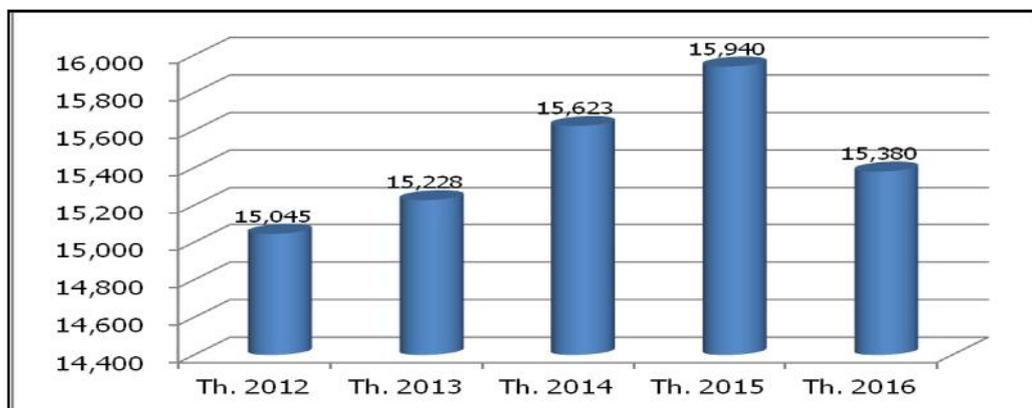
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan yang sama yakni terjadi penurunan tingkat kemiskinan walaupun dengan kelandaian yang berbeda, dimana pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 6,76%, Provinsi Kalsel sebesar 4,85 %, sedangkan Nasional sebesar 10,85 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pada periode 2012-2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan kontribusi terhadap penurunan persentase kemiskinan secara Nasional. Hal ini menunjukkan cukup efektifnya pencapaian hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2012 - 2016 melalui kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

❖ **Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan**

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terjadi fluktuasi, dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2012 sampai tahun 2015, namun terjadi penurunan pada tahun 2016. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 berkurang sebanyak 560 jiwa dari tahun 2015 yaitu dari 15.940 menurun menjadi 15.380 orang pada tahun 2016.

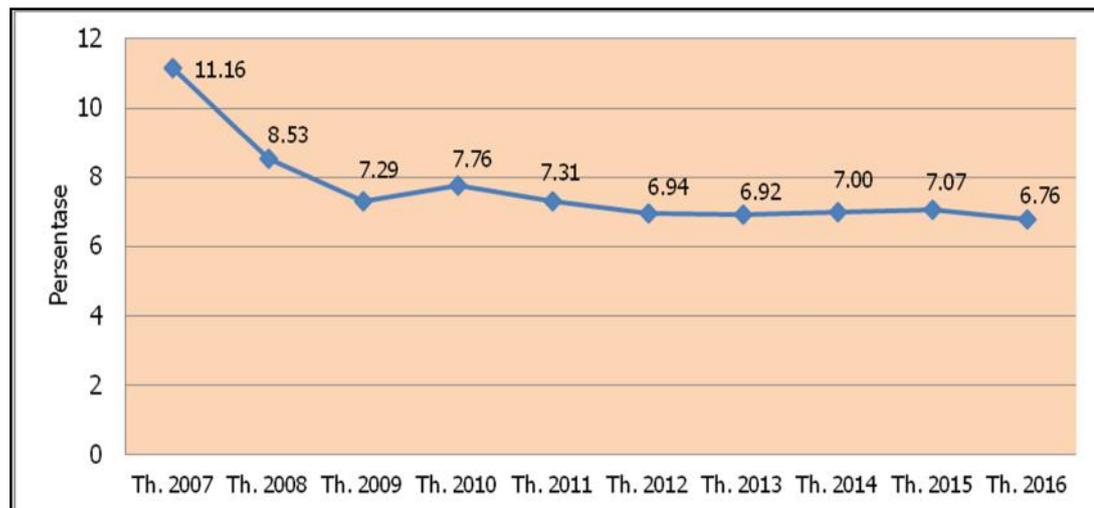


Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.21

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016

Begitu pula dari sisi Persentase atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara grafik pada rentang waktu tahun 2007 hingga tahun 2016 mengalami trend yang fluktuatif dengan beberapa kali kenaikan, namun secara umum tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun penurunannya melambat. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan telah efektif namun tidak dapat mempercepat penurunan karena saat ini penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada indeks kedalaman kemiskinan yang tinggi. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

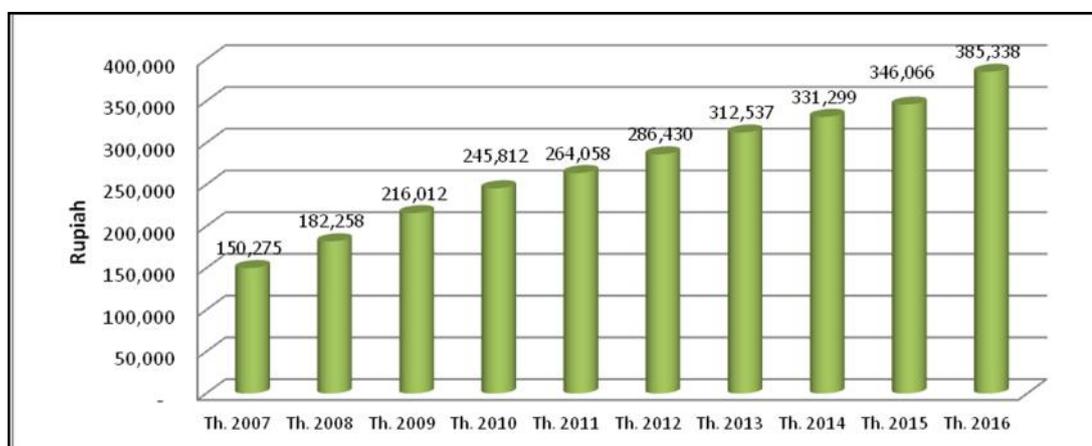
Gambar 3.22
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka ditentukan



biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan jumlah dan Persentase penduduk miskin.

Garis kemiskinan untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2012 sebesar Rp. 286.430,- perorang per bulan hingga menjadi Rp. 385.338,- per orang per bulan pada tahun 2016. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 98.908,-per orang per bulan selama kurun waktu 5 tahun. Adapun perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 – 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.23
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 – 2016

Tabel 3.20
Jumlah Individu Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

Nama Kecamatan	Status Kesejahteraan				TOTAL
	Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 % terendah	Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20 % terendah	Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30 % terendah	Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40 % terendah	
1 Amuntai Tengah	3,269	2,648	4,562	774	11,253
2 Amuntai Selatan	4,246	2,909	3,432	245	10,832
3 Amuntai Utara	2,596	2,420	3,328	312	8,656
4 Haur Gading	2,722	1,971	1,836	152	6,681
5 Sungai Pandan	5,072	2,786	2,880	213	10,951



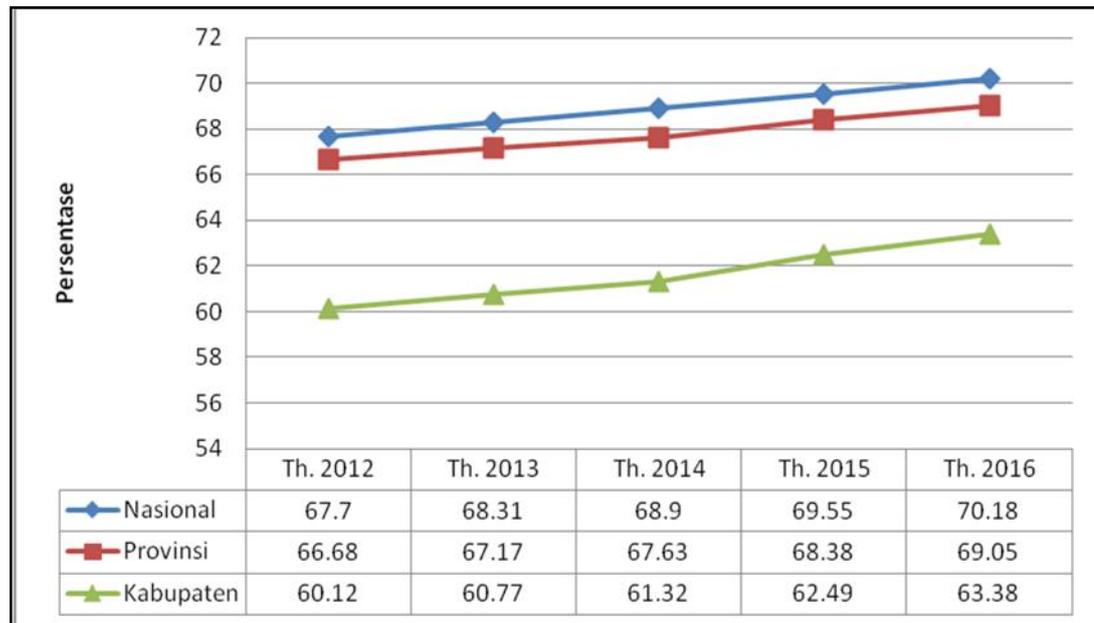
6	Sungai Tabukan	3,373	1,830	1,631	41	6,875
7	Babirik	5,898	2,828	1,849	55	10,630
8	Danau Panggang	5,152	1,823	918	29	7,922
9	Paminggir	1,907	818	448	24	3,197
10	Banjang	3,720	2,307	2,587	195	8,809
	JUMLAH	37,955	22,340	23,471	2,040	85,806

Sumber : TNP2K, 2016

Berdasar Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 (PBDT 2015) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), masyarakat dengan tingkat kesejahteraan di bawah 40 % di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 85.806 jiwa dengan jumlah individu terbanyak di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 11.253 jiwa.

3.4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.24

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, namun dari tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan, dimana pada periode 2015 hingga 2016 meningkat sebesar 1,43 % dan merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten tercepat yang mengalami kemajuan peningkatan IPM yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1,82 %) , Kabupaten Hulu Sungai Utara (1,43 %) dan Kabupaten Balangan (1,39%). Kemajuan pembangunan manusia di tiga Kabupaten tersebut di dorong terutama oleh dimensi Pendidikan.

Tabel 3.21

Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2011-2016

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (000)	IPM
2012	63.87	11.52	6.44	7.986	60.12
2013	64.17	11.75	6.61	8.067	60.77
2014	62.09	12.10	6.63	8.164	61.32



2015	62.49	12.78	6.73	8.298	62.49
2016	62.71	12.81	7.00	8.668	63.38

Sumber : BPS HSU tahun 2017

3.4.3. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan keberhasilan. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan metode baru, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

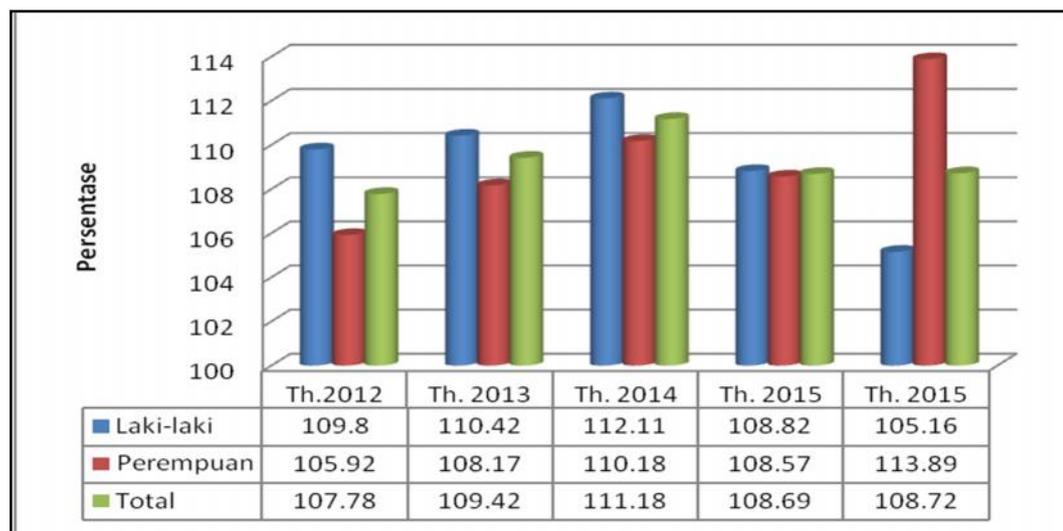
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI selama tahun 2012-2016 pada awalnya mengalami peningkatan, namun 2 tahun terakhir teridentifikasi dengan kecenderungan turun walaupun tidak signifikan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,24%. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 3.25

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2016

Namun penurunan APK dari tahun ke tahun selalu tumbuh perlu diapresiasi dan dijaga konsistensinya agar dalam jangka waktu tertentu terjadi keadaan dimana Angka Partisipasi Kasar akan linier dengan Angka Partisipasi Murni. Jika APK mendekati atau sama dengan APM bisa dikatakan sudah ideal.

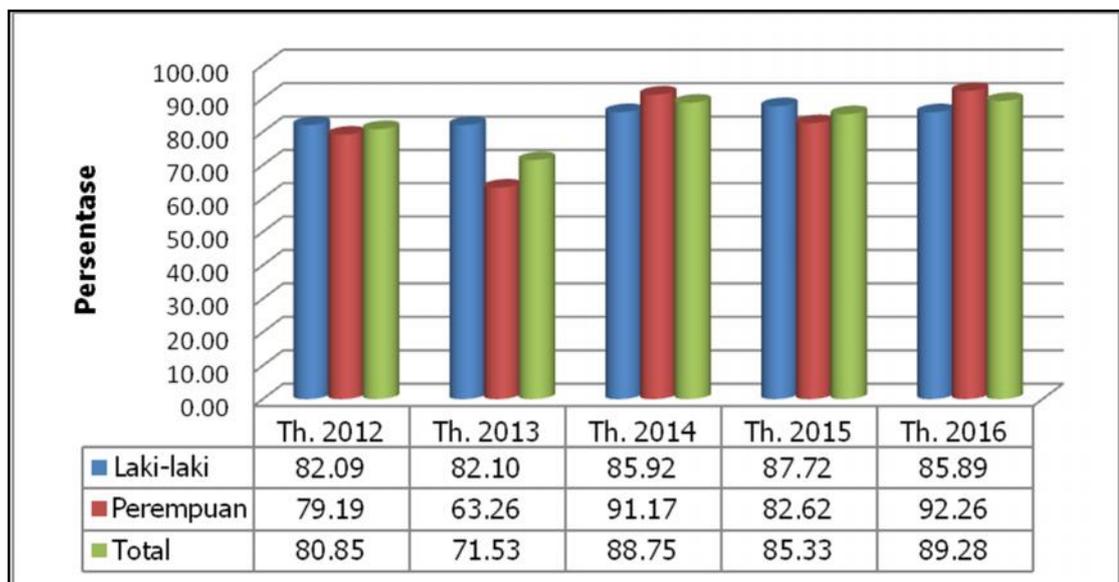


Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100 persen dapat diduga penyebabnya adalah akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Berdasarkan jenis kelamin Angka Partisipasi Kasar (APK) anak perempuan (113,89 %) Tingkat SD/Sederajat tahun 2016 lebih besar daripada APK anak berjenis kelamin laki-laki (105,16 %), hal ini diduga dikarenakan kesadaran kaum perempuan untuk menyekolahkan anak semakin tinggi dan ini harus diberi apresiasi oleh pemerintah agar tetap dijaga semangatnya agar tetap konsisten dalam menempuh pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat (13 – 15 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

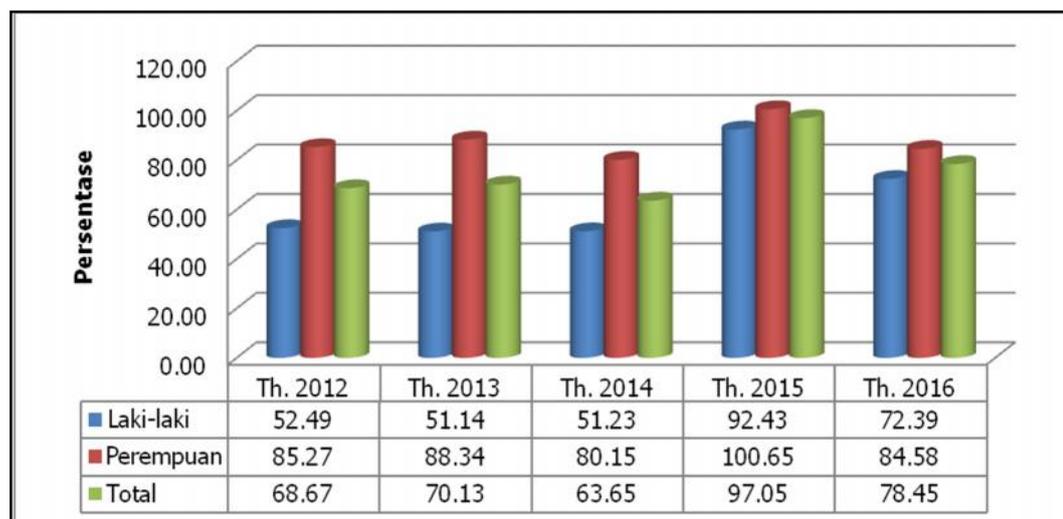
Gambar 3.26

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2016

Angka partisipasi Kasar tingkat SLTP dari tahun ke tahun berfluktuatif, APK tahun 2012 dari 80,85 % menjadi 71,53 % di tahun 2013, kemudian naik menjadi 88,75 % pada tahun 2014 untuk selanjutnya turun lagi menjadi 85,33 pada tahun 2015 dan naik lagi menjadi 89,28 pada tahun 2016. Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi penurunan APK. APK yang trendnya selalu turun adalah APK yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi dikarenakan akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang, penanganan pemerintah daerah diduga tidak tepat, atau bisa jadi karena himpitan ekonomi serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat tahun 2016 anak perempuan (92,26 %), lebih besar dari pada APK anak berjenis kelamin laki-laki (85,89 %).

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012–2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

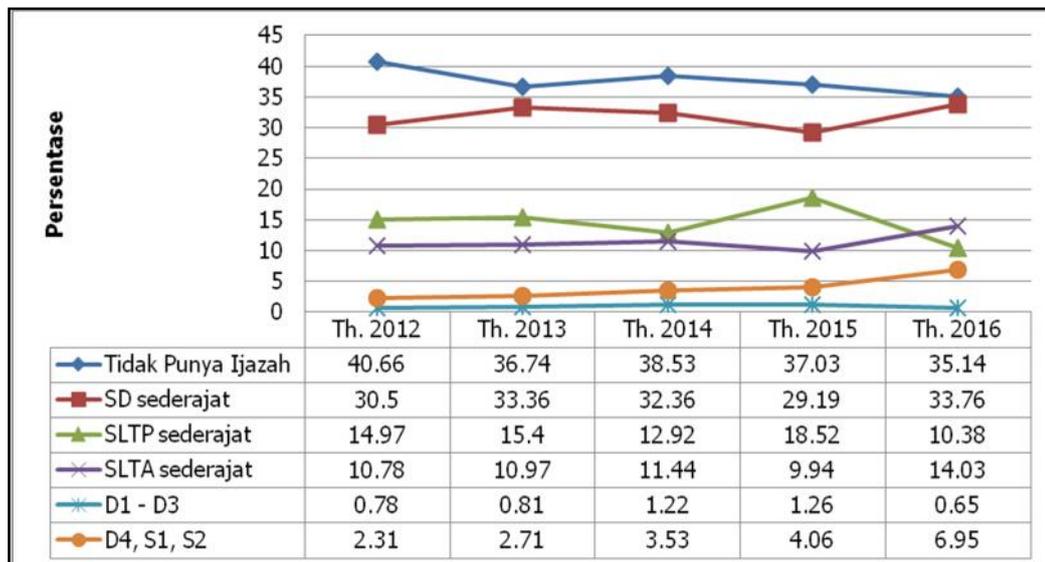
Gambar 3.27
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016



Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu selalu fluktuatif dan trendnya naik turun, bahkan di tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun di tahun 2016 turun menjadi 78,45 %. Angka ini sungguh sangat tidak diharapkan karena ini menunjukkan kurang berhasilnya program pendidikan. Permasalahannya juga hampir sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang, penanganan pemerintah daerah diduga tidak tepat, banyak siswa yang tinggal kelas atau bisa jadi karena himpitan ekonomi serta gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah maupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.28
Persentase Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 – 2016



Dari gambar tersebut diatas dapat digambarkan bahwa penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD dan penduduk yang mempunyai ijazah SLTP cenderung mengalami penurunan namun sebaliknya penduduk yang mempunyai ijazah setingkat SD sampai SLTA serta D4, S1 dan S2 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD dan yang mempunyai Ijazah SD lebih dari 50%, untuk penduduk yang mempunyai ijazah setingkat SLTP sampai SLTA masih rendah, sedangkan penduduk yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi di tahun 2016 baru sebesar 7,60 persen.

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Status Pendidikan	Tahun														
		2012			2013			2014			2015			2016		
		Lk	Pr	Jlh												
1	Tidak Punya Ijazah	37,25	43,90	40,66	36,41	37,07	36,74	35,87	41,06	38,53	34,98	39,00	37,03	33,91	36,34	35,14
2	SD sederajat	32,19	28,90	30,50	31,87	34,81	33,36	32,27	32,44	32,36	29,59	28,80	29,19	33,83	33,69	33,76
3	SLTP sederajat	14,97	14,96	14,97	15,38	15,43	15,40	14,90	11,04	12,92	18,69	18,35	18,52	4,89	12,22	10,38
4	SLTA sederajat	12,72	8,93	10,78	12,19	9,08	10,97	11,99	10,91	11,44	11,61	8,34	9,94	17,54	10,59	14,03
5	D.I – D.III	0,48	1,07	0,78	1,07	0,57	0,81	0,92	1,51	1,22	1,17	1,35	1,26	0,61	0,68	0,65
6	D.IV/ S1/ S2/ S3	2,38	2,24	2,31	2,35	3,05	2,71	4,04	3,03	3,53	3,95	4,18	4,06	5,61	6,47	6,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017

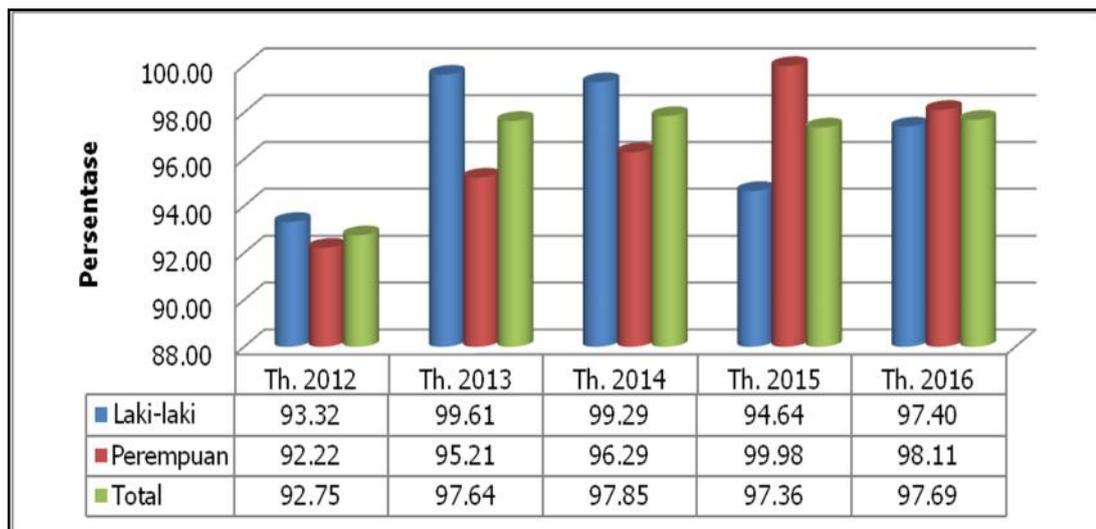
Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya

tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat (7–12 Tahun)

Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012–2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

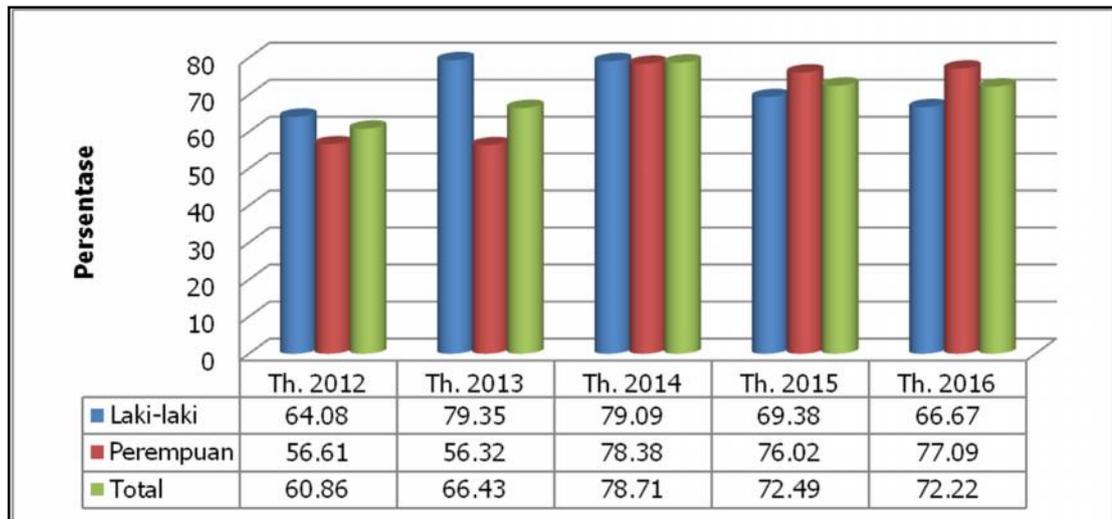
Gambar 3.29

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2016

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dimana APM SD/MI periode tahun 2012 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan namun pada tahun 2015 terjadi penurunan dari 97,85 % di tahun 2014 menjadi 97,36 % di tahun 2015 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 97,69 %. Secara garis besar selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 APM SD/MI terjadi peningkatan sebesar 4,94 %. Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya tampung sekolah untuk tingkat SD/MI sudah baik di Kabupaten HSU serta peran pemerintah daerah yang tinggi untuk meningkatkan wajib belajar pada masyarakat.

Jika dilihat berdasar jenis kelamin diketahui APM SD/ sederajat Perempuan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 walaupun perbedaannya tidak mencolok.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.30

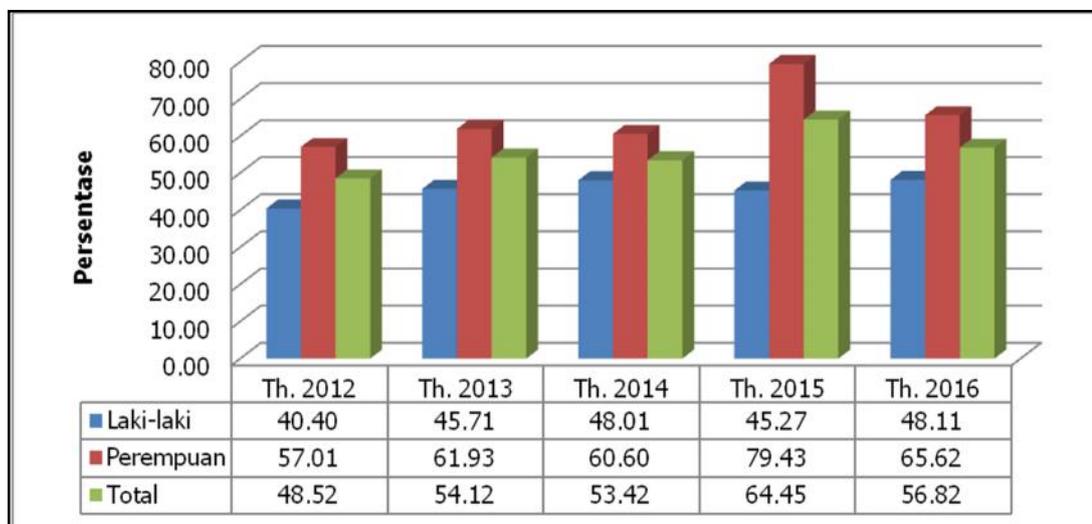
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2016

Dari gambar diatas diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat cenderung mengalami penurunan walaupun jika dilihat dalam periode lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 11,36 %.

Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 ada perbedaan pencapaian yang signifikan antara anak laki-laki (66,67 %) dengan anak Perempuan (77,09 %), hal ini menunjukkan minat belajar pada anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki atau mungkin karena faktor kemiskinan yang menyebabkan anak laki-laki memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)

Dari gambar dibawah diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat dari tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2015 menjadi 64.45 % dibanding tahun 2014 namun mengalami penurunan kembali ditahun 2016 menjadi 56.82 %. Secara umum jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan Angka Partisipasi Murni untuk SMA/MA/ sederajat untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8.30 %.



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.31

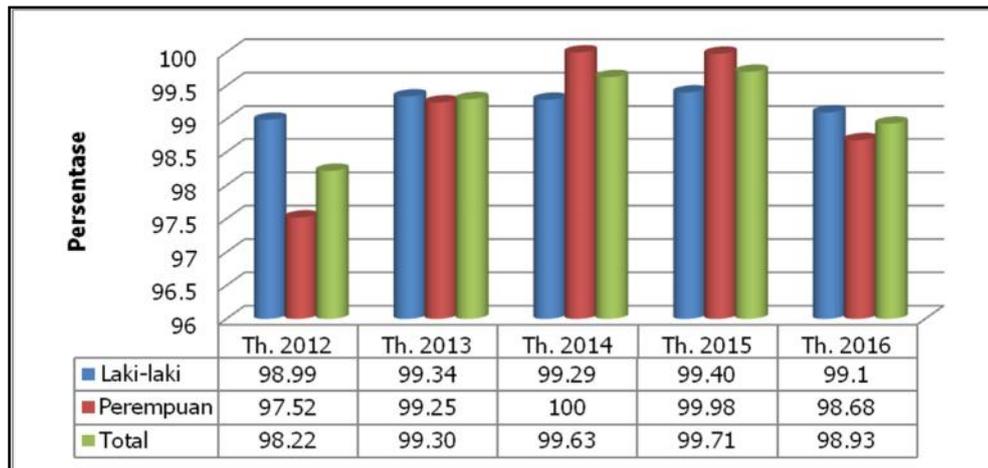
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016

Rendahnya APM SLTA/sederajat ini diduga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih kurangnya jumlah sekolah tingkat SLTA/sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/sederajat (7–12 Tahun). Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara

pada tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut. Selama Selama periode 2012 sampai dengan 2016, APS SD/MI terjadi fluktuasi dimana tahun 2012 sebesar 98,22 % hingga tahun 2016 sebesar 98,93 %, jika dilihat secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 0,71%.



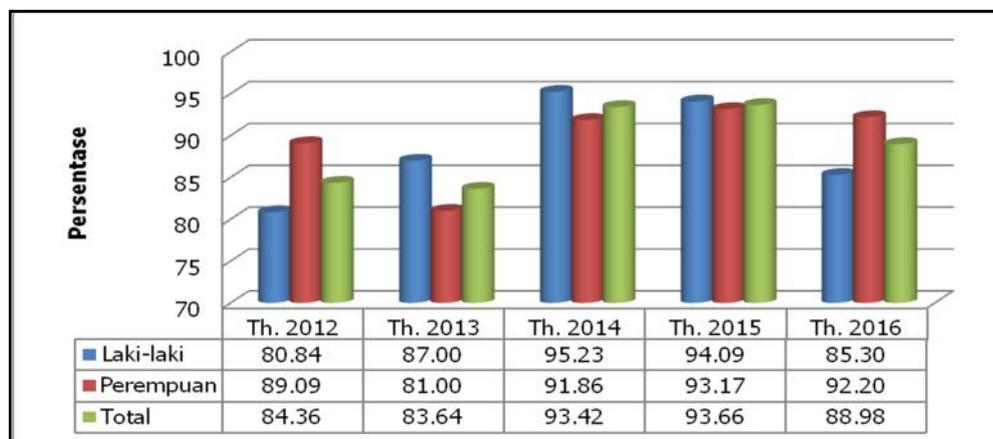
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 3.32

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012–2016

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/ sederajat (13–15 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 –2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

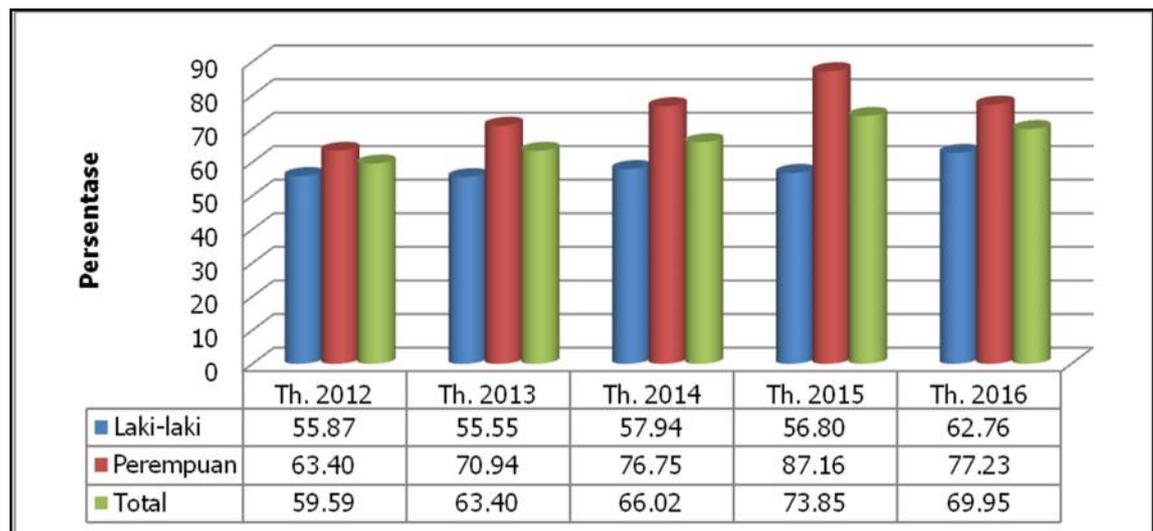
Gambar 3.33

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016

Demikian juga untuk APS tingkat SMP/MTs terjadi fluktuasi dimana tahun 2012 sebesar 84,36 % hingga tahun 2016 sebesar 88,98 %, jika dilihat secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 4,62 %.

▪ **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/ sederajat (16–18 Tahun)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 3.34

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2016

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK juga mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan dan penurunan terhadap APS SMA/MA/SMK, yang semula 73,85 % pada tahun 2015 menjadi 69,95% pada tahun 2016. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK masih sebesar 30,05 %. Perlu ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk

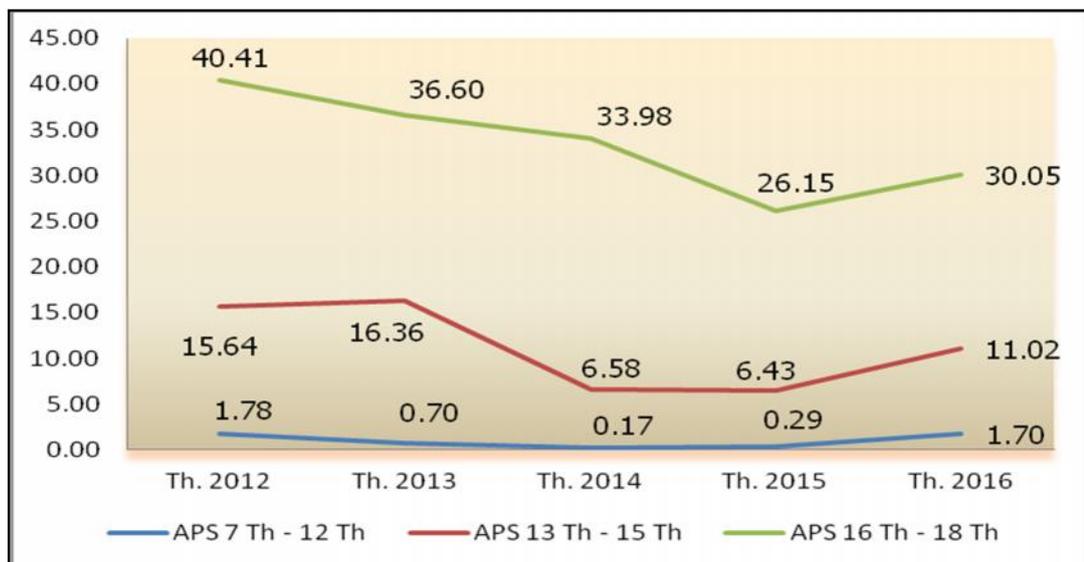


SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula.

Angka Putus Sekolah (APTS)

Anka Putus Sekolah adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Angka Putus sekolah untuk kelompok umur 7 – 12 tahun dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sudah baik, artinya dalam waktu tiga tahun terakhir hampir tidak ada lagi anak-anak kelompok umur 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah. Untuk kelompok umur 13 – 15 tahun dalam waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang membaik, dengan indikasi APTSnya menurun, jika APTS kelompok umur ini pada tahun 2012 masih berada pada angka 15,64% menurun menjadi 11,02% pada tahun 2016.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.35

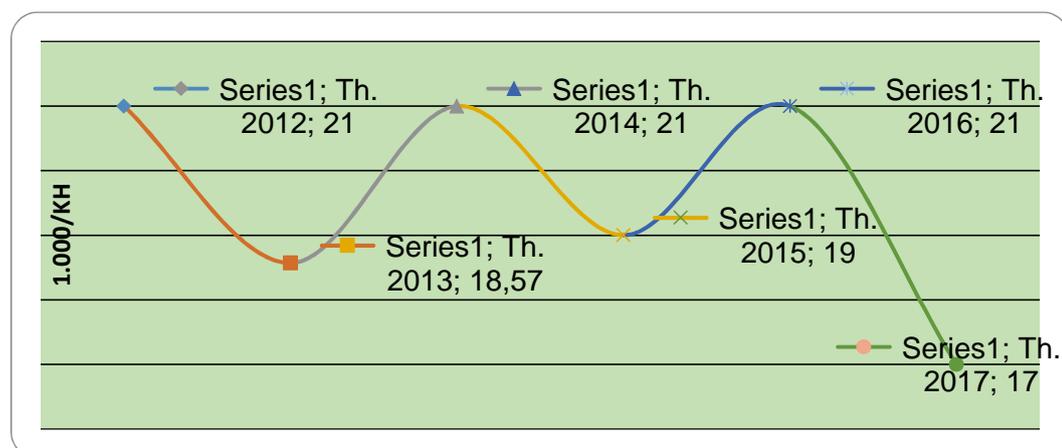
Angka Putus Sekolah (%) Berdasar Kelompok Umur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 - 2016

Demikian juga untuk kelompok umur 16 – 18 tahun juga menunjukkan tren yang baik, jika pada tahun 2012 APTSnya masih berada pada level 40,41% menurun menjadi 30,05% pada tahun 2016. Ini semua terjadi karena adanya program-program pemerintah bidang pendidikan yang pro terhadap masyarakat, misalnya BOS, Kartu Pintar dan lain-lain, sehingga hampir tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak sekolah. Problem yang masih sangat serius adalah APTS kelompok umur 16 – 18 tahun yang masih cukup tinggi, ini merupakan PR bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Stakholder maupun Masyarakat, jika permasalahan ini selesai dimungkinkan HSU akan bisa lekas sejajar dengan daerah lain.

3.4.4. Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan.



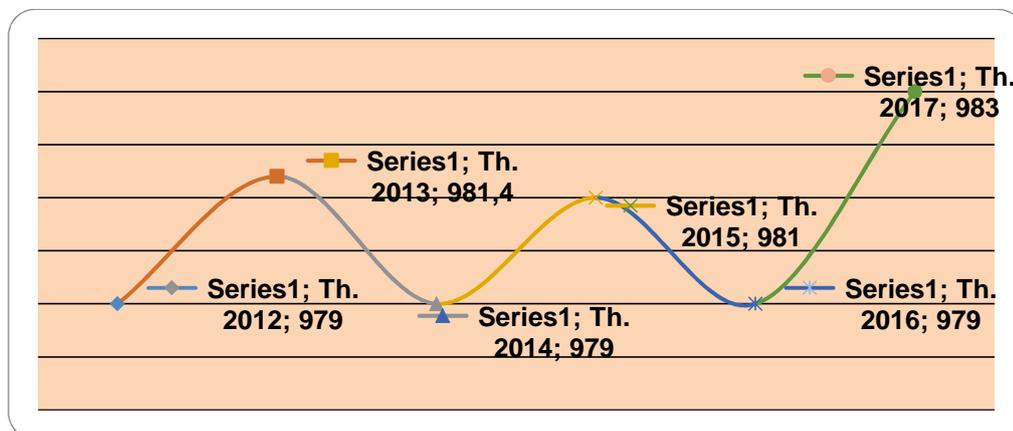
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 3.36
Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. HSU Tahun 2012-2017

Dari Gambar 2.31 diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2012 sampai Nopember 2017 berfluktuatif dan cenderung mengalami perbaikan, jika pada tahun 2012 AKB masih 21 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 17 per 1.000 kelahiran hidup pada periode Nopember 2017, yang berarti masih terdapat bayi yang mati dalam usia 0 – 1 tahun sebanyak 17 bayi dalam setiap kelahiran bayi hidup 1000 bayi..

Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, sedangkan Angka AKBH diperoleh dengan cara mengurangkan (1000 - AKB). Angka AKB dan AKHB adalah saling berbanding terbalik, jika AKB trendnya menurun maka AKHB trendnya harus naik. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2012 – 2017 terjadi fluktuasi.



Sumber : Dinas Kesehatan HSU

Gambar 3.37

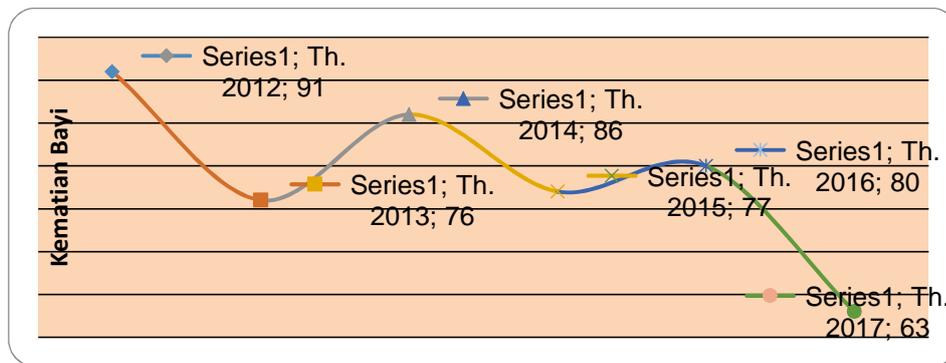
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kab. HSU Tahun 2012 – 2017

AKBH periode Nopember 2017 sebesar 983 bermakna bahwa dalam setiap 1000 kelahiran hidup, peluang hidup bayi hidup sampai dengan usia lebih 1 tahun sebanyak 983 bayi. Hubungan antara AKB dan AKHB adalah bahwa jika



AKB semakin sedikit nilainya (kematian bayi umur 0 – 1 tahun rendah), maka akan menyebabkan peluang bayi hidup lebih besar.

Jumlah Kematian Bayi didefinisikan akumulasi kematian bayi dari Bayi lahir mati, Bayi Mati pada usia 0 – 7 hari, Bayi mati pada usia 7 – 28 hari dan bayi mati pada usia 28 hari – 1 tahun. Jumlah Kematian Bayi tidak sama Angka Kematian Bayii (AKB). Jumlah kematian bayi 0-1 tahun dalam periode 2012 – bulan Nopember 2017 berfluktuatif, namun secara umum terjadi penurunan, jika pada tahun 2012 jumlah kematian bayi masih pada angka 91 bayi, menurun sampai bulan Nopember 2017 menjadi 63 bayi..



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 3.38

Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kab. HSU Tahun 2012 – 2017



BAB IV METODE KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Metode KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas 6 (enam) tahapan kegiatan, yang dimulai dari tahap kegiatan persiapan sampai tahap integrasi KLHS ke dalam RPJMD sebagai kegiatan tahap terakhir. Tahapan KLHS RPJMD disajikan pada Gambar 4.1. dan 4.2.



Gambar 4.1. Tahapan kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

4.1. Metode Persiapan

Tahapan pertama penyusunan KLHS RPJMD yaitu tahap persiapan, yang terdiri atas 4 tahap kegiatan, yaitu, tinjauan proses kebijakan RPJMD, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Kegiatan persiapan KLHS ditujukan untuk (1) mengetahui perkembangan RPJMD yang menjadi obyek KLHS, (2) mengumpulkan data dan informasi awal terkait perkembangan RPJMD, (3)

membentuk kelompok kerja (pokja) dan MSF atau forum para pihak terkait RPJMD, (4) menyusun rencana kerja, dan (5) rencana pengembangan kapasitas. Pada tahap persiapan juga dilakukan penetapan tenaga ahli dan tenaga teknis dari Pokja yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan KLHS. Tahapan dan metode kegiatan KLHS untuk tahap persiapan dapat dilihat pada Tabel 4.2.



Gambar 4.2. Tahapan kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pelibatan Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 PP No 46 tahun 2016 meliputi:

- masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.



Tabel 4.1.

Tahapan Kegiatan dan Metode Persiapan KLHS RPJMD

No	Tahapan Kegiatan	Metode
1	Identifikasi perkembangan proses RPJMD	Wawancara dan telaah dokumen
2	Pengumpulan data dan informasi awal terkait perkembangan RPJMD	Observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder
3	Pembentukan Pokja	Observasi dan wawancara
4	Penyusunan Rencana Kerja	FGD dan tinjauan literatur

Pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) didasarkan pada pengembangan kelompok para pihak dan disesuaikan dengan unsur-unsur penting terkait RPJMD dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pengelompokan MSF dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Kelompok MSF KLHS RPJMD

No	Kelompok Para Pihak	MSF	Keterangan
1	Pengambil Keputusan	MSF Pokja	Terdiri atas pengambil keputusan anggota pokja
		MSF KRP	Terdiri atas pengambil keputusan selain anggota pokja
2	Penyusun Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP)	MSF Pokja	Terdiri atas penyusun KRP anggota pokja
		MSF KRP	Terdiri atas penyusun KRP selain anggota pokja
3	Instansi Pemerintah		



		MSF Pokja	Terdiri atas Instansi pemerintah anggota pokja
		MSF KRP	Terdiri atas Instansi pemerintah selain anggota pokja
4	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan. Masyarakat yang memiliki informasi dan atau keahlian (perorangan/tokoh/kelompok)	MSF DAS MSF Penutupan Lahan/AFOLU MSF Fungsi Hutan MSF Ekonomi Regional MSF	Terdiri atas masyarakat dan pemangku kepentingan, masyarakat yang memiliki informasi dan atau keahlian (perorangan/tokoh/kelompok) sesuai konteks MSF
5	Masyarakat yang terkena dampak		

Berdasarkan anggota Pokja dan MSF yang dibentuk, juga diimplementasikan konsep “partisipasi aktif” agar KLHS RPJMD yang dilaksanakan dapat secara langsung dipahami dan dikuasai dengan baik oleh parapihak. Peserta “partisipasi aktif” dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Peserta “Partisipasi Aktif” KLHS RPJMD

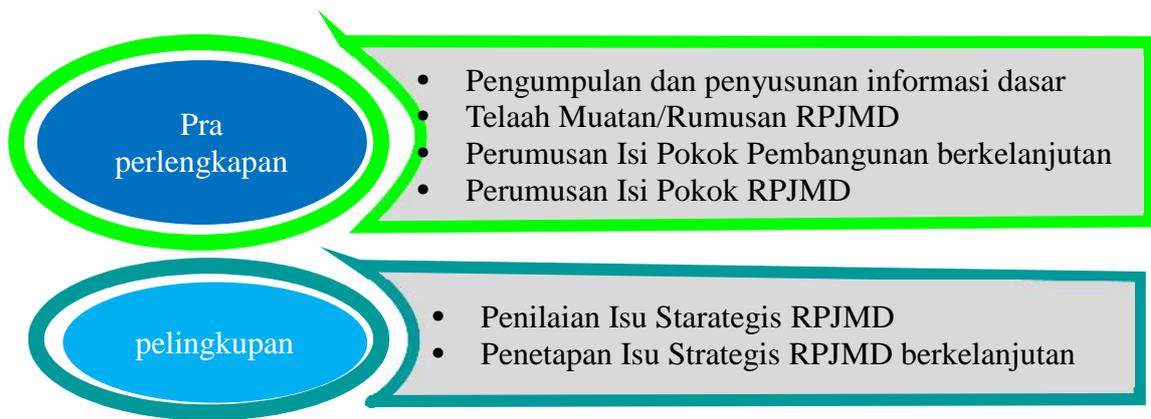
No	Instansi	Keahlian	Posisi dalam Tim KLHS
1	Bappelitbang	Perencanaan Pembangunan	Tenaga Ahli RPJMD/ Tenaga Teknis RPJMD



2	SKPD terkait lingkungan (Dinas Lingkungan hidup, kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perhubungan dll)	Lingkungan Hidup, Konservasi, Perkebunan, Pertanian, DAS, dll	Tenaga Ahli/Teknis bidang Lingkungan/ Perikanan/Pertanian
3	SKPD terkait aspek sosial (Dinas sosial, dll)	Ahli sosial dan budaya	Tenaga Ahli/Teknis bidang sosial
4	SKPD terkait aspek Ekonomi (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dll)	Ahli perekonomian, perindustrian, perdagangan	Tenaga Ahli/Teknis bidang ekonomi
5.	Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Perikanan, Pertanian, Kehutanan	Ahli Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Kelautan dan Perikanan, Pemetaan-GIS	Tenaga Ahli/Narasumber

4.2. Metode Pelingkupan

Tahap berikutnya dalam penyusunan KLHS adalah tahap pelingkupan. Kegiatan pelingkupan dilakukan setelah rencana kerja disusun dan disepakati oleh Pokja. Pelingkupan dan terdiri atas kegiatan persiapan pelingkupan, pra-pelingkupan, dan kegiatan pelingkupan itu sendiri. Kegiatan persiapan ditujukan untuk menetapkan dan mengembangkan pendekatan KLHS yang digunakan, persiapan pengumpulan data, dan persiapan pengembangan kapasitas untuk tahap pelingkupan. Kegiatan pra-pelingkupan bertujuan untuk menyajikan informasi dasar wilayah kajian, pemahaman muatan KRP RPJMD, dan memperoleh daftar panjang isu-isu pokok pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Pada tahap akhir, yaitu kegiatan pelingkupan itu sendiri, ditujukan untuk menilai dan menetapkan isu-isu strategis, paling strategis dan isu prioritas pembangunan berkelanjutan (PB) untuk RPJMD yang dilakukan secara partisipatif bersama dengan semua pemangku kepentingan. Tahapan pelingkupan dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Tahap Kegiatan Pelingkupan

Tahapan kegiatan dan metode untuk tahap pelingkupan yang digunakan diuraikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Tahapan Kegiatan dan Metode Pelingkupan

No	Tahapan Kegiatan	Metode
1	Pengumpulan dan penyusunan informasi dasar	Observasi, wawancara, dan telaah dokumen
2	Telaah Muatan/Rumusan RPJMD	FGD dan telaah dokumen
3	Perumusan isu pokok pembangunan berkelanjutan	FGD dan telaah isu
4	Penilaian isu strategis PB	FGD dan telaah isu
5	Penetapan isu paling strategis PB	FGD dan telaah isu
6	Penetapan isu prorioritas PB	FGD dan telaah isu

Instrumen untuk penilaian isu strategis PB berdasarkan muatan KLHS dan berdasarkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, menggunakan matriks seperti terlihat pada Tabel 4.5, table 4.6 dan Tabel 4.7.



Tabel 4.5.

Matrik penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan

CONTOH: PENILAIAN ISU STRATEGIS - KRITERIA

Isu Strategis	Kriteria						Total Nilai per Isu
	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektoral	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z	
Isu 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1
Isu 2	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1
Isu ... n	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1
Total Nilai per Kriteria							Tidak diisi

1 Sangat Kurang

2 Kurang

3 Sedang

4 Tinggi

5 Sangat tinggi

Isu Pokok	Kriteria						Total Pembobotan
	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektoral	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z	
Isu 1							
Isu 2	10 %	15 %	20 %	25 %	20 %	10 %	100 %
Isu ... n							

Tabel 4.6.

Matrik penentuan isu paling strategis pembangunan berkelanjutan

Pasal 8 : Contoh Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Paling Strategis:

Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:

Cth Isu PB	Karakteristik Wilayah			Pentingnya dampak		Isu PB terkait	KRP terkait	RPPLH	KLHS di atasnya
	RBI	RTR	LC	Luas/ lokasi	Prekwensi				
Banjir?	Topografi	Pola ruang	Terbuka?	Luas?	Tiap tahun?	Analisis sebab akibatnya	Lokasinya sama?	Sudah ada rencana pengelolannya?	Sudah ada penanganan dari KLHS pada hirarki KLHS di atasnya?
Longsor?	Kelerengan	Struktur ruang	Hutan ?	Kecil?	Baru terjadi?		Potensi pengaruhnya?		
Kekeringan ?	Diatas permukaan laut?		Tubuh air?						
Alih fungsi kawasan?	Sempadan ?		Karst?						

Melalui konsultasi Publik, disepakati Isu yang akan diambil menjadi **Isu PB yang Paling Strategis** dengan mempertimbangkan hasil telaahan tersebut

Tabel 4.7

Matrik penentuan isu prioritas pembangunan berkelanjutan

Pasal 9 : Contoh Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas:

1 Sangat Kurang
2 Kurang
3 Sedang
4 Tinggi
5 Sangat tinggi

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:

Isu PB Strategis	DDDT	Dampak LH	Jasa Ekosist	Cakupan Wil	Mutu SDA	Biodiversi tas	Perubahan Iklim	Masy miskin	Kesehat Masy	Kaw Adat
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Banjir?	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Kekeringan?	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4
Alih fungsi kawasan	5	5	5	3	5	5	5	2	2	5
...dst...										

Nilai bobot melalui konsultasi Publik yang disepakati untuk Isu yang akan diambil menjadi **Isu PB Prioritas**

Skala Bobot: 1 - 5 : tidak berpengaruh - sangat berpengaruh

4.3. Metode Kajian Pengaruh KRP dan Kajian Pembangunan Berkelanjutan

Kajian pengaruh dari kebijakan, rencana, dan program (KRP) RPJMD bertujuan untuk mengetahui pengaruh KRP RPJMD yang selama ini telah diterapkan pada isu strategis RPJMD. Kajian pengaruh KRP RPJMD ini bersifat restrospektif dan prospektif.

Kajian pengaruh KRP RPJMD retrospektif ditujukan untuk mengetahui pengaruh KRP RPJMD yang telah berjalan selama ini pada isu-isu strategis yang telah ditetapkan, sedangkan Kajian pengaruh KRP RPJMD prospektif, digunakan untuk memperoleh atau mengetahui pengaruh KRP RPJMD di masa mendatang, sesuai periode kajian KLHS RPJMD, yaitu 5 tahun. Kajian pengaruh KRP RPJMD prospektif digunakan untuk memperoleh *baseline* atau proyeksi kondisi tanpa tindakan untuk pembangunan berkelanjutan pada masa 5 tahun ke depan sebagai implikasi penerapan RPJMD. Selain itu juga digunakan untuk memperoleh proyeksi kondisi pembangunan berkelanjutan hasil skenario intervensi pada 5 tahun mendatang.

Kajian pengaruh KRP RPJMD terdiri atas kegiatan identifikasi KRP RPJMD dan KRP terkait, analisis pengaruh KRP, dan sintesis pengaruh KRP pada isu

strategis. Tahapan kajian pengaruh KRP dan kajian pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.5.

Tahapan kajian pengaruh KRP dan kajian pembangunan berkelanjutan

Tahapan kegiatan dan metode kajian pengaruh KRP RPJMD, KRP terkait, dan kajian pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 4.8.

Tahapan Kegiatan dan Metode Kajian Pengaruh KRP dan PB

No	Tahapan Kegiatan	Metode
1	Identifikasi profil pembangunan daerah	Telaah dokumen
2	Identifikasi KRP RPJMD eksisting	Telaah dokumen
3	Identifikasi KRP terkait (Perencanaan pembangunan dan kawasan hutan)	Telaah dokumen
4	Analisis Pengaruh KRP RPJMD dan KRP terkait untuk kondisi eksisting	Analisis kebijakan reprotrospektif, FGD, <i>expert judgment</i>



5	Analisis Pengaruh KRP RPJMD yang disusun	Analisis kebijakan prospektif, FGD, <i>expert judgment</i>
6	Identifikasi indikator pembangunan berkelanjutan daerah	Telaah dokumen dan <i>expert judgment</i>
7	Penyusunan pola referensi dan model pembangunan berkelanjutan daerah	<i>System Dynamics</i>
8	Penyusunan <i>baseline</i> pembangunan berkelanjutan daerah	<i>System Dynamics</i>

Kajian pembangunan berkelanjutan terdiri atas kajian keberlanjutan lingkungan, kajian keberlanjutan sosial dan kajian keberlanjutan ekonomi. Pada Analisis pola referensi dimaksudkan untuk memperoleh perilaku indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi pada periode *time series* yang digunakan, sesuai dengan ketersediaan data lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pembuatan model ditujukan untuk memperoleh model pembangunan berkelanjutan sesuai dengan pendekatan KLHS yang digunakan, yaitu KLHS berbasiskan pada pembangunan berkelanjutan daerah. Untuk melengkapi kajian pembangunan berkelanjutan, juga dilakukan kajian rantai nilai, untuk memperoleh gambaran lebih baik, khususnya terkait dengan sektor unggulan ekonomi regional. Hasil simulasi *baseline* selanjutnya disintesis untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan berkelanjutan daerah, dengan tetap didasarkan pada indikator kajian pembangunan berkelanjutan. Tabel sintesis kondisi pembangunan berkelanjutan daerah menggunakan Tabel 4.9.

Tabel 4.9.

Sintesis Kondisi Pembangunan Berkelanjutan Daerah

No	Aspek Pembangunan Berkelanjutan Daerah	Indikator keberlanjutan	Implikasi (periode 5 th RPJMD)	Keterangan
1	Keberlanjutan Lingkungan			
	1.1. Daya Dukung Ekosistem Perairan	Pencemaran dan kerusakan ekosistem	Kondisi daya dukung Perairan	



	1.2. Keanekaragaman Hayati	Potensi kehilangan keanekaragaman hayati	Kondisi keanekaragaman hayati	
	1.3. Emisi Karbon, dll	Emisi karbon, dll	Kondisi emisi karbon, dll	
	Keberlanjutan Sosial			
2	2.1. Kependudukan	Kemiskinan	Kondisi	
	2.2. Pembangunan Manusia, dll	Indeks Pembangunan Manusia, dll	Kondisi pembangunan manusia, dll	
	Keberlanjutan Ekonomi			
3	3.1. Ekonomi Regional	PDRB	Kondisi ekonomi regional	
		Pendapatan perkapita		
		Kontribusi sektoral		
	3.2. Keberlanjutan Ekonomi Regional, dll	Pengganda Basis, dll	Kondisi keberlanjutan ekonomi	

Berdasarkan pada pasal 3 PP 46 tahun 2016, dinyatakan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup, maka Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

- 1) Perubahan iklim;
- 2) Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- 3) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- 4) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- 5) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- 6) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- 7) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Instrumen penapisan KRP RPJMD disajikan pada Tabel 4.10, Analisis Pengaruh KPR RPJMD terhadap Isu PB disajikan pada Tabel 4.11 dan Analisis Muatan KPR RPJMD terhadap Muatan Kajian Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.10.

Penapisan KRP RPJMD

Contoh Penapisan KRP (pasal 10-11) :

No	Isu Draft Kebijakan Rencana dan/atau Program	Dampak dan/atau Resiko LH							Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Rencana Pembangunan Jalan Tol Sunter-Rawa Buaya	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan
2	Rencana Pembangunan Tanggul A	-	-	-	-	-	-	-	Tidak perlu
3	Rencana Tanggul B	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan
4	Rencana Pembangunan 17 Pulau	+	+	-/+	+	+	-/+	-	Signifikan
5	Rencana Pembangunan Kolam Retensi	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan

<p>DRAFT Kebijakan Rencana dan/atau Program</p>	}	<p>Muatan KRP yang berdampak:</p>

1. Perubahan Iklim
2. Kerusakan, Kerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
3. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
4. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
5. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
7. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Tabel 4.11.

Analisis Pengaruh KPR RPJMD terhadap Isu PB

Pasal 12 : Contoh Analisis Pengaruh

No	Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas				Keterangan
		Degradasi ekosistem perairan	Abrasi dan sedimentasi	Kesejahteraan	...dst...	
1	Rencana Pembangunan Jalan Tol Sunter-Rawa Buaya	ya	tidak	ya	...dst...	Perlu kajian muatan
2	Rencana Pembangunan Tanggul A	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu
3	Rencana Tanggul B	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu
4	Rencana Pembangunan 17 Pulau	ya	tidak	ya	...dst...	Perlu kajian muatan
5	Rencana Pembangunan Kolam Retensi	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu



Tabel 4.12.

Analisis Muatan KPR RPJMD terhadap Muatan Kajian Lingkungan Hidup

Analisis Pengaruh Berdasarkan Muatan Kajian yang Diharapkan (pasal 13)

No	Muatan KRP	Muatan Kajian Analisis					
		DDT	Jasa Ekosistem	SDA	Risiko dan Dampak LH	Perubahan Iklim	Kehati
1	Rencana Pembangunan Jalan Tol Sunter-Rawa Buaya						
2	Rencana Pembangunan Tanggul A						
3	Rencana Tanggul B						
4	Rencana Pembangunan 17 Pulau						
5	Rencana Pembangunan Kolam Retensi						

4.4. Metode Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP RPJMD dan Mitigasi

Kajian pengaruh KRP RPJMD dan kajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan KRP berpengaruh dan *baseline* atau kondisi tanpa tindakan pembangunan berkelanjutan pada 5 tahun mendatang. Kajian perumusan alternatif KRP RPJMD akan menghasilkan potensi permasalahan pembangunan berkelanjutan dalam konteks RPJMD pada masa 5 tahun mendatang, dan skenario penyempurnaan KRP RPJMD yang terdiri atas berbagai alternatif penyempurnaan KRP RPJMD dan tindakan mitigasi yang dibutuhkan. Tahapan kegiatan dan metode perumusan alternatif penyempurnaan KRP RPJMD dan mitigasi dapat dilihat pada Tabel 4.13. sebagai berikut.



Tabel 4.13.

Tahapan Kegiatan dan Metode Perumusan Alternatif
Penyempurnaan KRP dan Mitigasi

No	Tahapan Kegiatan	Metode
1	Identifikasi permasalahan pembangunan berkelanjutan daerah	<i>System Dynamics, Expert judgment</i>
2	Identifikasi permasalahan KRP RPJMD	FGD, <i>Expert judgment</i>
3	Perumusan alternatif penyempurnaan KRP RPJMD dan mitigasi	FGD, <i>expert judgment</i>

Tabel 4.14.

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Daerah

No	Aspek Pembangunan Berkelanjutan Daerah	Proyeksi Implementasi RPJMD (5 tahun)	Harapan di Akhir Implementasi RPJMD	Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Daerah
Keberlanjutan Lingkungan				
1.	1.1. Daya Dukung Ekosistem DAS	Kondisi daya dukung perairan	Harapan pada daya dukung perairan	Kesenjangan harapan dan proyeksi implementasi RPJMD (permasalahan keberlanjutan lingkungan)
	1.2. Keanekaragaman Hayati	Kondisi keanekaragaman hayati	Harapan pada kondisi keanekaragaman hayati	
	1.3. Emisi Karbon, dll	Kondisi emisi karbon, dll	Harapan pada emisi karbon, dll	
Keberlanjutan Sosial				
2.	2.1. Kependudukan	Kondisi kependudukan	Harapan kondisi kependudukan	kesenjangan harapan dan proyeksi implementasi RPJMD (permasalahan keberlanjutan sosial)
	2.2. Pembangunan Manusia, dll	Kondisi pembangunan manusia, dll	Harapan kondisi pembangunan manusia, dll	
Keberlanjutan Ekonomi				
3.	3.1. Ekonomi Regional	Kondisi ekonomi regional	Kondisi ekonomi regional	Kesenjangan harapan dan



3.2. Keberlanjutan Ekonomi Regional, dll	Kondisi keberlanjutan ekonomi, dll	Kondisi keberlanjutan ekonomi, dll	proyeksi implementasi RPJMD (permasalahan keberlanjutan)
--	------------------------------------	------------------------------------	--

Permasalahan pembangunan berkelanjutan diidentifikasi berdasarkan hasil simulasi model pembangunan berkelanjutan daerah dan harapan kondisi pembangunan berkelanjutan daerah pada periode RPJMD, yaitu 5 tahun. Tabel identifikasi permasalahan pembangunan berkelanjutan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15.

Matriks Identifikasi Permasalahan KRP RPJMD

No	Komponen KRP RPJMD	Isu Strategis		
		Lingkungan	Sosial	Ekonomi
1	Komponen Kebijakan - Tujuan - Kebijakan - Strategi	Permasalahan/ Bukan Permasalahan	Permasalahan/ Bukan Permasalahan	Permasalahan/ Bukan Permasalahan
2	Komponen Rencana -	Permasalahan/ Bukan Permasalahan	Permasalahan/ Bukan Permasalahan	Permasalahan/ Bukan Permasalahan
3	Komponen Program	Permasalahan/ Bukan Permasalahan	Permasalahan/ Bukan Permasalahan	Permasalahan/ Bukan Permasalahan

Setelah permasalahan KRP RPJMD teridentifikasi, selanjutnya dibuat rumusan alternatif penyempurnaan KRP RPJMD. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP RPJMD disusun menggunakan instrumen Tabel 4.16.



Tabel 4.16.

Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP RPJMD

Komponen KRP RPJMD yang Diperbaiki	Alternatif Penyempurnaan KRP RPJMD
Komponen Kebijakan: <ul style="list-style-type: none">- Tujuan- Kebijakan- Strategi	Ada/Tidak Ada Alternatif Penyempurnaan Komponen Kebijakan
Komponen Rencana	Ada/Tidak Ada Alternatif Penyempurnaan Komponen Rencana
Komponen Program	Ada/Tidak Ada Alternatif Penyempurnaan Komponen Program

4.5. Metode Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP RPJMD

Kajian pengaruh KRP RPJMD dan kajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan KRP berpengaruh dan *baseline* atau kondisi tanpa tindakan pembangunan berkelanjutan pada 5 tahun mendatang. Kajian perumusan alternatif KRP RPJMD akan menghasilkan potensi permasalahan pembangunan berkelanjutan dalam konteks RPJMD pada masa 5 tahun mendatang, dan skenario penyempurnaan KRP RPJMD yang terdiri atas berbagai alternatif penyempurnaan KRP RPJMD dan tindakan mitigasi yang dibutuhkan.

Penyusunan rekomendasi perbaikan KRP RPJMD terdiri atas formulasi strategi intervensi, formulasi rekomendasi, dan instrumentasi rekomendasi. Tahap penyusunan rekomendasi perbaikan KRP RPJMD ditujukan untuk memperoleh strategi intervensi pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih baik dari *baseline*, serta memperoleh formulasi rekomendasi, dan instrumentasi rekomendasi ke dalam bentuk KRP RPJMD. Tahapan penyusunan rekomendasi perbaikan KRP RPJMD beserta metodenya dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17.

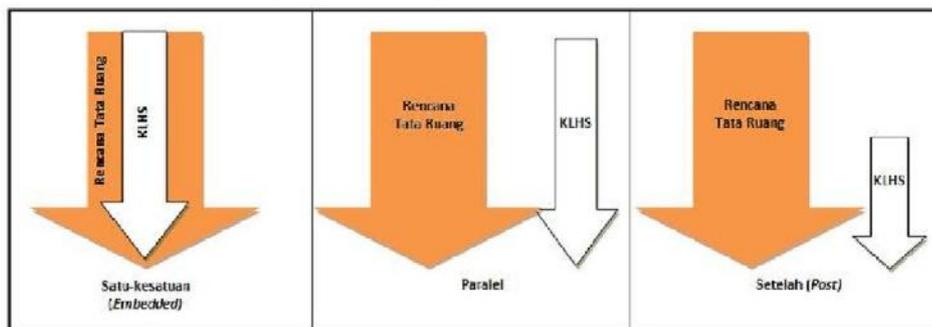
Tahapan Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP RPJMD

No	Tahapan Kegiatan	Metode
1	Identifikasi <i>leverage</i> untuk RPJMD berkelanjutan	<i>Expert judgment, System Dynamics</i>
2	Penyusunan skenario intervensi untuk RPJMD berkelanjutan	<i>Expert judgment, System Dynamics</i>
3	Penyusunan prinsip dan kriteria rekomendasi	FGD, Delphi, <i>expert judgment</i>
4	Formulasi rekomendasi perbaikan KRP RPJMD	FGD, Delphi, <i>expert judgment</i>

Penyusunan prinsip dan kriteria rekomendasi menggunakan konsep dasar strategi pembangunan berkelanjutan daerah, serta menggunakan prinsip dan kriteria dasar adaptasi dan mitigasi. Prinsip dan kriteria adaptasi dan mitigasi disusun menggunakan Tabel 4.18.

4.6. Metode Integrasi KLHS ke dalam RPJMD

Pelaksanaan KLHS harus terintegrasi di dalam RPJMD dan perencanaan tata ruang, dan pada prinsipnya, terdapat 3 tipe pendekatan integrasi pelaksanaan KLHS dalam RPJMD, seperti terlihat pada Gambar 4.5.

**Gambar 4.6.** Tipologi Pendekatan Integrasi KLHS ke dalam RPJMD/RTRW

Tipe pendekatan integrasi pertama adalah satu kesatuan, terlihat pada Gambar 4.6. (a), yaitu proses pelaksanaan KLHS berlangsung secara menyatu di dalam proses penyusunan rencana RPJMD. Pada tipe pendekatan ini, tim penyusun rencana RPJMD dan KLHS adalah satu tim yang sama. Pada tipe pendekatan integrasi kedua, seperti terlihat pada Gambar 4.6. (b) adalah tipe pendekatan



integrasi paralel, yang terdiri atas dua tim penyusun berbeda, yaitu tim penyusun RPJMD/rencana tata ruang dan tim penyusun KLHS. Pada tipe pendekatan integrasi ini, proses penyusunan KLHS dan RPJMD/rencana tata ruang dilakukan secara bersamaan. Pendekatan integrasi ketiga adalah sama dengan pendekatan kedua, yaitu terdiri atas dua tim penyusun yang berbeda (penyusun KLHS dan penyusun RPJMD/rencana tata ruang), namun KLHS dilakukan setelah selesainya penyusunan RPJMD/rencana tata ruang, baik sebelum atau sesudah tahap persetujuan substansi dengan kedudukan belum ditetapkan sebagai perda RPJMD. Pendekatan integrasi ketiga dapat dilihat pada Gambar 4.6. (c).

Implikasi kedudukan KLHS pada tahapan proses penyusunan RPJMD dan rencana tata ruang adalah sebagai berikut:

1. KLHS sebagai masukan pertimbangan lingkungan hidup pada saat proses penyusunan
2. RPJMD dan rencana tata ruang sampai pada tahap pengolahan dan analisis.
3. KLHS sebagai masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RPJMD dan penataan ruang pada saat penyusunan sampai pada tahap penyusunan konsepsi.
4. KLHS sebagai pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program setelah kebijakan dan strategi

Perkembangan proses penyusunan RPJMD menjelaskan kedudukan KLHS dalam penyusunan. Implikasinya, KLHS sebagai pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program. Pemanfaatan hasil KLHS dalam konteks integrasi sebagai rekomendasi menyempurnakan RPJMD sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah.



BAB V PERSIAPAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

5.1. Mengumpulkan data dan informasi awal serta membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka terlebih dahulu dikumpulkan data sekunder dan beberapa data primer yang mendukung penyelegaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022.

Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membentuk Pokja. Pokja penyelenggaraan KLHS disusun sesuai dengan bidang keahlian dan teknis di masing masing SKPD. Daftar Pokja PL disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pokja Pengendalian Lingkungan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perkim & LH	Ketua
2.	Kepala Bappelitbang HSU	Sekretaris
3.	Sekretaris Bappelitbang	Anggota
4.	Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbang	Anggota
5.	Kabid Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Bappelitbang	Anggota
6.	Kabid Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbang	Anggota



7.	Kasubid Ekonomi dan Pembangunan pada Bappelitbang	Anggota
8.	Kasubid Inovasi dan Teknologi pada Bappelitbang	Anggota
9.	Kasubid Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbang	Anggota
10.	Kasubag Keuangan dan Aset pada Bappelitbang	Anggota
11.	Kasubid Analisis Pendanaan pada Bappelitbang	Anggota
12.	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbang	Anggota
13.	Kasubid Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Bappelitbang	Anggota
14.	Kasubid Pengembangan Ekonomi pada Bappelitbang	Anggota
15.	Kasubid Infrastruktur pada Bappelitbang	Anggota
16.	Kasubid Pendidikan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbang	Anggota
17.	Kasubid Pemerintahan pada Bappelitbang	Anggota
18.	Kasubag Program dan Data pada Dinas Perkim & LH	Anggota
19.	Kasi Tata Lingkungan pada Dinas Perkim & LH	Anggota
20.	Staf Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (1 orang)	Anggota
21.	Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang (1 orang)	Anggota
22.	Staf Penataan Kawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Perkim dan LH (1 orang)	Anggota

Sumber: SK Bupati tahun 2017 dan 2018

Kelompok Kerja KLHS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menyusun kerangka acuan kerja;
2. Melaksanakan konsultasi publik;
3. Melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program



terhadap kondisi lingkungan hidup:

4. Melaksanakan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program;
5. Melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program;
6. Melaksanakan pengintegrasian hasil klhs ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
7. Menginisiasi pelaksanaan penjaminan kualitas klhs; dan
8. Melaksanakan pendokumentasian KLHS
9. Menyusun Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sesuai Pasal 32 dan pasal 33 PP 46 tahun 2016 diamatkan sebagai berikut:

1. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam membuat KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian pendapat, saran, dan usul;
 - b. Pendampingan tenaga ahli;
 - c. Bantuan teknis; dan
 - d. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

1. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
2. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.



Berdasarkan Hasil FGD 1 mengenai Identifikasi pemangku kepentingan di sajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP**	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP
			(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*
Pemerintah	DisperkimLH	DisperkimLH	4	4
	Bappelitbang	Bappelitbang	4	4
	PUPR	PUPR	4	4
	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	4	4
	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	4	4
	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	4	4
	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	4
	BPBD	BPBD	3	4
	Dinas PolPP Damkar	Dinas PolPP Damkar	2	2
	Dispora	Dispora	2	2
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tanaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tanaga Kerja	2	2
	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	3	3
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3	3
	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	2	2
	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2	2
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1	1
	Inspektorat	Inspektorat	1	1
	Dinas Sosial	Dinas Sosial	2	2
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2



Pemangku Kepentingan	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP**	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP
			(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1
	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	3	3
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	1
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1	1
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2	2
	10 Kecamatan	10 Kecamatan	3	4
Organisasi Non Pemerintah	LSM	LSM	4	4
	PKK	PKK	2	2
	KNPI	KNPI	3	3
	MUI	MUI	3	3
	NU	NU	3	3
	Muhammadiyah	Muhammadiyah	3	3
	WALHI	WALHI	4	4
	HAKLI	HAKLI	3	4
	IDI	IDI	2	1
	IBI	IBI	2	1
	PGRI	PGRI	3	3
	PEKKA	PEKKA	3	2
	KARANG TARUNA	KARANG TARUNA	2	2
	PRAMUKA	PRAMUKA	2	2
	IWAPI	IWAPI	2	1
	FKH	FKH	3	4
	HKTI	HKTI	4	4
	KTNA	KTNA	4	4
	FORUM ANAK	FORUM ANAK	2	2
	KADIN	KADIN	2	1



Pemangku Kepentingan	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP**	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP
			(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*
	PBI (Pelestari Burung Indonesia)	PBI (Pelestari Burung Indonesia)	2	1
	MELINGAI	MELINGAI	2	1
	REI	REI	3	3
Perguruan Tinggi/Akademia	STAI (RAKHA)	STAI	1	2
	STIPER	STIPER	2	3
	STIA	STIA	1	3
	ULM	ULM	2	4
Dunia Usaha	PDAM	PDAM	4	4
	PLN	PLN	2	2
	Gapensi	Gapensi	2	2
	TELKOM	TELKOM	2	2
	Pabrik Karet	Pabrik Karet	3	2
	Perkebunan Sawit (PDL)	Perkebunan Sawit (PDL)	4	3
	Perbankan	Perbankan	4	4
	IWAPI	IWAPI	2	2
	SPBU	SPBU	2	1
	AMP	AMP	3	1
	CBP	CBP	3	1
	Pertamina EP	Pertamina EP	1	1
	Perhotelan	Perhotelan	3	1
	Rumah Makan	Rumah Makan	3	1
	Sarang Walet	Sarang Walet	3	1
	Pemotongan Unggas	Pemotongan Unggas	2	1
	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan	4	2
	Industri Meubeler	Industri Meubeler	4	2
	PKL	PKL	4	1
	Peternakan	Peternakan	4	2
KADIN	KADIN	2	2	
Institusi/Organisasi Kemasyarakatan	NU	NU	2	2
	Muhammadiyah	Muhammadiyah	2	2
	LSM FKA	LSM FKA	2	2



Pemangku Kepentingan	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP**	Yang terkena dampak KRP*	Yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dgn substansi KRP
			(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*
	LSM YADIS	LSM YADIS	2	2

Sumber: Hasil FGD KLHS tahun 2017

5.2. Menyusun Rencana Kerja

Proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dimulai dari bulan Oktober tahun 2017, mengikuti dari proses penyusunan RPJMD. Adapun rencana kerja dari proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- A. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Aula Bappelitbang Kab. HSU, Jl. Ahmad Yani No.14, Amuntai.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para stakeholder di Kabupaten HSU tentang apa itu KLHS (peran, fungsi, mekanisme pelaksanaan dan proses penyusunan KLHS). Dalam kegiatan ini juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam hal penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam daftar panjang yang terbagi melalui isu lingkungan, isu sosial dan isu ekonomi.



- B. Focus Group Discussion (FGD) KLHS dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 bertempat di Aula Bappelitbang Kab. HSU. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan dari daftar panjang menjadi daftar pendek atau isu prioritas yang diperoleh dari pembobotan oleh peserta FGD.



- C. Diklat dan Pelatihan kepada Tim Penyusun KLHS RPJMD/Pokja KLHS RPJMD Kab. HSU, yang dilaksanakan mulai tanggal 23 – 26 Nopember 2017, bertempat di Fave Hotel Banjarbaru. Diklat dan Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan kepada tim penyusun KLHS RPJMD dalam hal proses penyusunan KLHS RPJMD dari awal sampai akhir.





Tabel 5.3
Materi dan Jadwal Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hari/ Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
Kamis, 23 November 2017	08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
	09.00 - 09.15	Pembukaan	Panitia
	09.15 - 10.00	Tujuan, Manfaat dan Metode Bimbingan Teknis	Siti Saidah, S.Hut., M.P.
	10.00 - 10.15	<i>Istirahat</i>	Panitia
	10.15 - 11.00	KLHS Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	Prof. Dr. Ir. Gt. Muhammad Hatta, M.S.
	11.00 - 11.45		
	11.45 - 12.30	Kebijakan KLHS terhadap KRP	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	12.30 - 13.30	ISHOMA	Panitia
	13.30 - 14.15	Kebijakan KLHS terhadap KRP	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	14.15 - 15.00	Mekanisme Pelaksanaan KLHS	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	15.00 - 15.45		
	15.45 - 16.00	<i>Istirahat</i>	Panitia
	16.00 - 16.45	Kondisi, Masalah dan Prospek Kab. HSU	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
	16.45 - 17.30		
Jumat, 24 November 2017	08.30 - 09.15	UU dan Peraturan KLHS di Indonesia	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	09.15 - 10.00	Identifikasi Pemangku Kepentingan	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
	10.00 - 10.15	<i>Istirahat</i>	Panitia
	10.15 - 11.00	Kelebihan dan Kekurangan KLHS_Penilaian Dampak dan Pemikiran Strategis	Prof. Dr. Ir. Gt. Muhammad Hatta, M.S.
	11.00 - 11.45	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	11.45 - 13.30	ISHOMA	Panitia
	13.30 - 14.15	Kerja kelompok Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	14.15 - 15.00		



	15.00 - 15.45	Baseline data	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
	15.45 - 16.00		
	16.00 - 16.45	Critical Decision Factor (CDF)	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
	16.45 - 17.30		
Sabtu, 25 November 2017	08.30 - 09.15	Six Thinking	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
	09.15 - 10.00		
	10.00 - 10.15	<i>Istirahat</i>	Panitia
	10.15 - 11.00	Identifikasi Muatan	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
	11.00 - 11.45		
	11.45 - 13.30	ISHOMA	Panitia
	13.30 - 14.15	Kajian Pengaruh	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	14.15 - 15.00		
	15.00 - 15.45	Alternatif Penyempurnaan	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	15.45 - 16.00		
	16.00 - 16.45	<i>Istirahat</i>	Panitia
	16.45 - 17.30	Berpikir strategis untuk KLHS	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
	Minggu, 26 November 2017	08.30 - 09.15	Strategi komunikasi dalam integrasi KLHS
09.15 - 10.00			
10.00 - 10.15		<i>Istirahat</i>	Panitia
10.15 - 11.00		Rekomendasi Penyempurnaan KRP	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
11.00 - 11.45			
11.45 - 13.30		ISHOMA	Panitia
13.30 - 14.15		Integrasi hasil KLHS kedalam KRP	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
14.15 - 15.00			
15.00 - 15.45		Dokumentasi dan Pelaporan	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
15.45 - 16.00			
16.00 - 16.45		Penjaminan Kualitas dan dokumentasi	Siti Saidah, S.Hut., M.P.
16.45 - 17.30	Validasi	Siti Saidah, S.Hut., M.P.	
17.30 - 17.45	<i>Penutup</i>	Panitia	

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. HSU

D. Focus Group Discussion (FGD) KLHS dilaksanakan dari tanggal 13 - 15 Pebruari 2018 bertempat di Aula Bappelitbang Kab. HSU. FGD yang dilaksanakan selama 3 hari ini membahas kajian pengaruh sampai rekomendasi/alternatif. Pada tanggal 13-14 Pebruari 2018 dilaksanakan kajian pengaruh, dimana dari 257 program yang ada di dalam RPJMD Kab.



HSU kemudian akhirnya menjadi 32 program yang dinilai berpengaruh. Sedangkan pada tanggal 15 Pebruari dilaksanakan Telaahan pengaruh dan Rekomendasi/Alternatif dari 32 program tersebut yang terdiri dari:

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya.
2. Program Penyelenggaraan BLUD
3. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)
4. Program pembangunan jalan dan jembatan
5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
7. Program pengembangan wilayah perbatasan
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman
9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10. Program Pemanfaatan Ruang
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
14. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
15. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG
16. Program Pengembangan Pasar Daerah
17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
18. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
19. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan
21. Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan
22. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
23. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
24. Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan
25. Optimalisasi Usaha Perikanan
26. Pengembangan Destinasi Pariwisata



27. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan
28. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
29. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan
30. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
31. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
32. Program pengembangan Industri Kecil Menengah

E. Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018 bertempat di Aula Bappelitbang. Forum Konsultasi Publik KLHS RPJMD ini merupakan salah satu rangkaian dalam proses penyusunan dokumen KLHS RPJMD. sedangkan Tujuan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik ini adalah untuk menerima saran dan masukan dari semua stakeholder yang hadir saat ini, untuk penyempurnaan dokumen KLHS yang sedang di susun. Hasil masukan dari peserta Forum dituangkan ke dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik. (lampiran)

Peserta Konsultasi Publik KLHS RPJMD pada hari ini terdiri dari:

1. Para Anggota Dewan
2. Para Kepala Badan, Dinas dan Bagian di Lingkungan Kab. HSU
3. Para Camat
4. Para Akademisi
5. Gapensi/Pengusaha
6. LSM dan tokoh masyarakat
7. Para Komunitas Pecinta Lingkungan
8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, dan
9. 8 (delapan) Bappeda Kabupaten Tetangga



BAB VI ANALISIS KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

6.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Proses pelaksanaan identifikasi isu-isu pokok pembangunan berkelanjutan di daerah dilakukan melalui FGD dengan melibatkan pokja PL dan para pemangku kepentingan, *Multi Stakeholder Forum (MSF)* yang mempunyai informasi dan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan juga melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.

Pokja PL merupakan satu kesatuan dengan tim Penyusun RPJMD dan wajib bekerjasama dengan Pokja lain dengan koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJMD. Pelaksanaan FGD Isu Pembangunan Berkelanjutan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Pelaksanaan FGD Isu Pembangunan Berkelanjutan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kelompok Para Pihak	MSF dan pokja PL	Metode
1	Pengambil Keputusan	MSF Pokja MSF KRP	FGD FGD
2	Penyusun Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP)	MSF Pokja MSF KRP	FGD FGD
3	Instansi Pemerintah	MSF Pokja MSF KRP	FGD FGD
4	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan, yaitu masyarakat yang memiliki informasi dan atau keahlian (perorangan/ tokoh/kelompok)	MSF Pokja MSF KRP	FGD



5	Perguruan tinggi	MSF Pokja MSF KRP	FGD
---	------------------	----------------------	-----

Sumber: Dokumen KLHS RZWP-3-K Prov. Kalsel

Proses penentuan identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan melalui proses *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan mulai bulan oktober 2017 – Pebruari 2018 dengan peserta seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kriteria Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan disajikan sebagai berikut:

1. Berpotensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda yang luas
2. Dapat bersifat lintas sektor
3. Bersifat lintas wilayah (potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaannya), memiliki relevansi tinggi terhadap kepentingan wilayah perencanaan
4. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan:
 - a. Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan
 - b. Berdampak mengganggu penerapan konsep pembangunan berkelanjutan
5. Dampak luas terhadap pemangku kepentingan, menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak

6.1.1. Isu Strategis pembangunan berkelanjutan (Daftar Panjang)

FGD penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan daftar panjang ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Aula Bappelitbang dengan di hadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Bapak H. Husairi Abdi, Lc. Proses FGD ini dilaksanakan dengan membagi peserta FGD menjadi 3 kelompok, yaitu Kelompok Lingkungan, Kelompok Ekonomi dan Kelompok Sosial Budaya. Adapun hasil dari FGD tersebut adalah:



Tabel 6.2.
Isu Lingkungan

NO	ISU POKOK LINGKUNGAN
A	Tema Isu : Pencemaran
1	Penurunan Kualitas Air
2	Pencemaran Udara
3	Gangguan Bunyi
4	Perubahan Iklim
5	Pengelolaan Sampah
B	Tema Isu : Tata Ruang (Hutan & Lahan)
1	Alih Fungsi Lahan
2	Keanekaragaman Hayati
3	Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Tata Ruang dan Bangunan
4	Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m
5	Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai
6	Lahan Kritis/ kurangnya RTH
7	Pengelolaan Lahan Rawa
C	Tema Isu : Sumberdaya Air
1	Banjir
2	Kualitas Air Baku
3	Sedimentasi Sungai tinggi

Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.3.
Isu Ekonomi

No	Isu Ekonomi
A	
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Peningkatan Daya Saing Daerah
3	Peningkatan Investasi Daerah
4	Ekonomi Kreatif
5	Kemiskinan
6	Pembangunan Sarang Burung Walet
7	Pengembangan Agribisnis



No	Isu Ekonomi
8	Kewirausahaan
9	Pengembangan Kelapa Sawit
10	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
11	Pemerataan Pendapatan antara Kota dan Pinggiran
12	Infrastruktur Perekonomian
13	Penguatan Kapasitas IKM, UMKM dan Koperasi
14	Pengelolaan Perikanan (tangkap dan Budidaya)
15	Perlindungan Plasma Nutfah (Itik alabio dan kerbau rawa)

Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.4.
Isu Sosial

A	TEMA ISU : Sosial
1	Mengurangi Angka Pengangguran
2	Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
4	Penurunan Angka Kriminalitas
5	Peningkatan Potensi Olahraga dan Pariwisata
6	Penyalahgunaan Nafza
7	Penurunan Angka Kemiskinan
8	Peningkatan Etos Kerja
	TEMA ISU : Pendidikan
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah
2	Peningkatan Pendidikan Karakter
3	Penurunan Angka Putus Sekolah
	Tema Kesehatan
1	Penurunan jumlah Kematian Ibu
2	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
3	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
4	Peningkatan Jaminan Kesehatan

Sumber: hasil analisa 2017



6.1.2. Isu paling strategis Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu paling strategis pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 46 tahun 2016 dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat pentingnya potensi dampak
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP
5. Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
6. Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dengan wilayah yang berdekatan dan memiliki keterkaitan/relevansi langsung.

FGD ini dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2017 bertempat di Aula Bappelitbang, dimana dalam pelaksanaan FGD ini diperoleh isu paling strategis, isu prioritas dan isu sangat prioritas (terpilih). Isu sangat prioritas inilah nantinya yang akan di lakukan kajian pengaruhnya ke dalam program-program yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 6.5.
Isu Lingkungan Paling Strategis

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Penurunan Kualitas Air
2	Pengelolaan Sampah
3	Alih fungsi lahan
4	Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Tata Ruang dan Bangunan
5	Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m
6	Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai
7	Pengelolaan Lahan Rawa
8	Banjir
9	Kualitas Air Baku
10	Sedimentasi Sungai tinggi

Sumber: hasil analisa 2017



Tabel 6.6.
Isu Ekonomi Paling Strategis

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Pengembangan Agribisnis
3	Infrastruktur Perekonomian

Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.7.
Isu Sosial Paling Strategis

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Mengurangi Angka Pengangguran
2	Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3	Pengurangan Penyalahgunaan Nafza
4	Penurunan Angka Kemiskinan
5	Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah
6	Peningkatan Pendidikan Karakter
7	Penurunan Angka Putus Sekolah
8	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
9	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
10	Peningkatan Jaminan Kesehatan

Sumber: hasil analisa 2017

6.1.3. Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan tahap identifikasi isu paling strategis PB, maka selanjutnya dilakukan identifikasi dan perumusan untuk memperoleh isu prioritas pembangunan berkelanjutan. Proses pilihan isu prioritas dilakukan melalui analisis dan diskusi diantara tim pokja PL bersama tim tenaga ahli yang diperbantukan dan kemudian diverifikasi oleh para pemangku kepentingan dalam satu kegiatan diskusi kelompok terfokus pada *Focus Group Discussion* (FGD).

Identifikasi isu prioritas pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 46 tahun 2016 paling sedikit berkaitan dengan:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung LH untuk pembangunan (DD);



2. Perkiraan dampak dan risiko LH (Dampak LH);
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem (Jasa Ekosistem);
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam (Cakupan Wil);
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (Mutu SDA);
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Biodiversitas);
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Perubahan Iklim);
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok Masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat (Miskin Masy);
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (Kesehatan Masy); dan/atau
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat (Kaw Adat).

Hasil identifikasi isu prioritas pembangunan berkelanjutan yang disepakati pada FGD dan kajian tenaga ahli disajikan pada Tabel 6.7 – 6.9

Tabel 6.8
Isu Prioritas Lingkungan

No	Isu Prioritas
1	Penurunan Kualitas Air
2	Pengelolaan Sampah
3	Alih fungsi lahan
4	Banjir

Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.9.
Isu Prioritas Ekonomi

No	Isu Prioritas
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Pengembangan Agribisnis
3	Infrastruktur Perekonomian

Sumber: hasil analisa 2017



Tabel 6.10
Isu Prioritas Sosial

No	Isu Prioritas
1	Penyalahgunaan Nafza
2	Angka Kemiskinan
3	Pendidikan Karakter
4	Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Sumber: hasil analisa 2017

6.1.4. Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (terpilih)

Setelah diketahui isu sangat prioritas, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan isu sangat prioritas pembangunan berkelanjutan (terpilih). Berdasarkan hasil FGD antara tim Pokja PL dan tim tenaga ahli ditetapkan bahwa untuk isu sangat prioritas yaitu:

Tabel 6.11
Isu Sangat Prioritas (Terpilih)

No	Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (terpilih)
A. Lingkungan	
1	Alih fungsi lahan
2	Banjir
B. Ekonomi	
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Pengembangan Agribisnis
C. Sosial	
1	Pendidikan Karakter
2	Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Sumber: hasil analisa 2017

6.2. Identifikasi Materi Muatan KRP – RPJMD yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, hal ini dilakukan kajian sesuai dengan pasal 3 pada PP 46 tahun 2016. Kebijakan, Rencana,



dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. Perubahan iklim;
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi dan sedimentasi
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Hasil identifikasi materi muatan KRP-RPJMD yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup yang disepakati pada FGD dan kajian tenaga ahli disajikan pada Tabel 5.13, sedangkan proses penentuan identifikasi materi muatan KRP-RPJMD disajikan pada Lampiran 3.

- + : Materi Muatan KRP berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko LH
- : Materi Muatan KRP tidak berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko LH
- ? : Tidak ada ketegasan / kepastian keterkaitan
- 0 : Tidak ada kaitan/hubungan

Tabel 6.12

Identifikasi materi muatan KRP-RPJMD yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup

No	KRP-RPJMD	Dampak dan/atau Resiko LH							Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	0	0	0	-	0	0	+	Signifikan



No	KRP-RPJMD	Dampak dan/atau Resiko LH							Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	
2	Program Penyelenggaraan BLUD	0	0	0	0	0	0	-	Signifikan
3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	0	+	+	-	+	0	+	Signifikan
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	0	+	+	-	+	0	+	Signifikan
5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	0	0	0	-	+	0	+	Signifikan
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	0	-	+	-	+	0	+	Signifikan
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	0	-	-	-	+	0	+	Signifikan
8	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	0	0	-	-	+	+	+	Signifikan
9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	0	0	-	+	+	0	+	Signifikan
10	Program Pemanfaatan Ruang	0	-	-	-	+	+	+	Signifikan
11	Program Pengembangan Perumahan	0	-	-	-	+	0	+	Signifikan
12	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	0	0	0	-	+	0	0	Signifikan
13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	0	0	-	-	+	+	+	Signifikan
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0	0	0	-	0	+	0	Signifikan



No	KRP-RPJMD	Dampak dan/atau Resiko							Nilai
		LH							
		1	2	3	4	5	6	7	
15	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	0	-	-	-	0	+	0	Signifikan
16	Program Pengembangan Pasar Daerah	0	0	-	-	0	+	0	Signifikan
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	0	0	0	-	0	0	0	Signifikan
18	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	0	0	0	-	0	0	0	Signifikan
19	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	0	-	0	-	+	+	+	Signifikan
20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	0	-	0	-	+	+	0	Signifikan
21	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan	0	0	0	-	+	+	0	Signifikan
22	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	+	+	+	-	+	+	+	Signifikan
23	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	+	+	+	-	+	+	+	Signifikan
24	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan	0	-	-	-	+	+	+	Signifikan
25	Optimalisasi Usaha Perikanan	0	0	0	-	+	+	+	Signifikan
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	-	-	+	+	0	Signifikan
27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	0	-	-	-	+	+	+	Signifikan
28	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	0	-	-	0	0	+	+	Signifikan



No	KRP-RPJMD	Dampak dan/atau Resiko LH							Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	
29	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	0	-	-	-	0	+	+	Signifikan
30	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	0	-	-	-	0	+	0	Signifikan
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	-	0	0	-	0	+	0	Signifikan
32	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	-	-	-	-	0	+	0	Signifikan

Sumber: hasil analisa 2018

6.3. Analisis Pengaruh KRP RPJMD dengan Isu Prioritas PB

Analisis pengaruh dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil konsultasi publik sebagaimana amanat pasal 11 PP Nomor 46 tahun 2016.

Pelaksanaan analisis pengaruh materi muatan KRP RPJMD dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat pasal 12 PP Nomor 46 tahun 2016 memperhatikan:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah;
3. Keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan/atau
4. Kesepakatan antar ahli.



Hasil analisis pengaruh materi muatan KRP RPJMD dengan isu prioritas pembangunan berkelanjutan (isu Lingkungan, isu ekonomi, dan isu sosial budaya) di peroleh 32 materi muatan yang berpotensi memberikan pengaruh negatif (-) terhadap kondisi lingkungan hidup.

Tabel 6.13

Pengaruh Materi Muatan KRP RPJMD prioritas dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No	Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup	Keterangan
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Perlu Kajian Muatan
2	Program Penyelenggaraan BLUD	Perlu Kajian Muatan
3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Perlu Kajian Muatan
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Perlu Kajian Muatan
5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Perlu Kajian Muatan
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perlu Kajian Muatan
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	Perlu Kajian Muatan
8	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	Perlu Kajian Muatan
9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Perlu Kajian Muatan
10	Program Pemanfaatan Ruang	Perlu Kajian Muatan
11	Program Pengembangan Perumahan	Perlu Kajian Muatan
12	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Perlu Kajian Muatan
13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Perlu Kajian Muatan



No	Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup	Keterangan
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Perlu Kajian Muatan
15	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Perlu Kajian Muatan
16	Program Pengembangan Pasar Daerah	Perlu Kajian Muatan
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Perlu Kajian Muatan
18	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Perlu Kajian Muatan
19	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perlu Kajian Muatan
20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Perlu Kajian Muatan
21	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan	Perlu Kajian Muatan
22	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Perlu Kajian Muatan
23	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Perlu Kajian Muatan
24	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan	Perlu Kajian Muatan
25	Optimalisasi Usaha Perikanan	Perlu Kajian Muatan
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Perlu Kajian Muatan
27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Perlu Kajian Muatan
28	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Perlu Kajian Muatan
29	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Perlu Kajian Muatan
30	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Perlu Kajian Muatan



No	Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup	Keterangan
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perlu Kajian Muatan
32	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Perlu Kajian Muatan

Sumber: hasil analisa 2018

6.4. Analisis Pengaruh KRP RPJMD terhadap Kajian Muatan LH

Berdasarkan amanat pasal 13 PP Nomor 46 tahun 2016, analisis pengaruh muatan paling sedikit memuat kajian:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis pengaruh KRP RPJMD dengan 6 (enam) kajian muatan LH yang prioritas berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup telah disepakati terdapat 32 muatan KRP.



Tabel 6.14

Pengaruh KRP RPJMD dengan 6 (Enam) Kajian Muatan

No	Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Kajian Muatan					
		DDDT	Dampak Resiko LH	Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Perubahan Iklim	Kehati
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
2	Program Penyelenggaraan BLUD	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
8	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh



No	Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Kajian Muatan					
		DDDT	Dampak Resiko LH	Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Perubahan Iklim	Kehati
9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Menaikkan	Tidak beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
10	Program Pemanfaatan Ruang	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
11	Program Pengembangan Perumahan	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
12	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Menaikkan	Tidak beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Menaikkan	Tidak beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
15	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
16	Program Pengembangan Pasar Daerah	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
18	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh



No	Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Kajian Muatan					
		DDDT	Dampak Resiko LH	Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Perubahan Iklim	Kehati
19	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
21	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
22	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
23	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
24	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
25	Optimalisasi Usaha Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh



No	Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Kajian Muatan					
		DDDT	Dampak Resiko LH	Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Perubahan Iklim	Kehati
28	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak berpengaruh	Dapat berpengaruh
29	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
30	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Ada	Dapat berpengaruh
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh
32	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat Berpengaruh

Sumber: Hasil Analisa 2018

Keterangan:

DDDT = daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

SDA = sumber daya alam

Kehati = keanekaragaman hayati

6.4.1. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)

Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung (DD) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung (DT) adalah



kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem, semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pada tabel 6.13 diketahui bahwa ada 25 program RPJMD yang menaikkan atau mendukung peningkatan DDDT dan terdapat 7 program RPJMD yang jika dilaksanakan dapat menurunkan DDDT. Program-program tersebut adalah:

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya

Pelaksanaan Program ini dikatakan dapat menurunkan DDDT karena dikhawatirkan dalam pelaksanaan peningkatan puskesmas ini tidak memperhatikan kondisi lingkungan, seperti:

- a. Pembangunan tidak dengan konsep rumah panggung, seperti yang diamanatkan dalam Perda No: 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
- b. Pembuangan limbah medis dan B3 nya tidak terkelola dengan baik
- c. Pembangunannya tidak disertai dengan dokumen lingkungan

2. Program Penyelenggaraan BLUD

Penyelenggaraan BLUD RSUD Pambalah Batung dikhawatirkan hasil limbahnya akan dapat mencemari sungai dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan sungai Negara.

3. Program pengembangan wilayah perbatasan

Pengembangan wilayah perbatasan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dan kabupaten, akan tetapi dalam pengembangan wilayah perbatasan ini di khawatirkan juga akan menurunkan DDDT kawasan tersebut apabila tidak dikendalikan. Apalagi kebanyakan wilayah perbatasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kawasan hutan, gambut, Pertanian dan Perkebunan.

4. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman

Program ini dikhawatirkan dapat menurunkan DDDT lingkungan juga, hal ini disebabkan percepatan pembangunan permukiman di Kabupaten Hulu



Sungai Utara lebih banyak mengalihfungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan pembangunannya dengan sistem urugan tanah.

5. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini merupakan kumpulan indikasi program di dalam RTRW Kab. HSU yang berisi seluruh perencanaan baik itu dari struktur ruang, pola ruang maupun kawasan strategis.

6. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dikhawatirkan dapat menurunkan DDDT lingkungan juga, hal ini disebabkan percepatan pembangunan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih banyak mengalihfungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan pembangunannya dengan sistem urugan tanah.

7. Program pengembangan Industri Kecil Menengah

Limbah dari kegiatan industri kecil menengah berupa limbah hasil purun yaitu zat pewarna yang langsung dibuang ke lingkungan sekitar dan hasil kegiatan industri pembuatan kerajinan alumenium yang berupa limbah padat dari kaca dan alumenium tersebut.

6.4.2. Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu:

1. Manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air;
2. Manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit;
3. Manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; dan
4. Manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005)

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik



yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman atau kebutuhan lainnya bagi konsumsi manusia.

Berdasarkan tabel 6.13 diketahui bahwa 7 program pada RPJMD apabila dilaksanakan maka dapat menurunkan jasa ekosistem. Program-program tersebut adalah:

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya.
2. Program penyelenggaraan BLUD
3. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan
4. Program Percepatan Pembangunan Sanitas dan Permukiman
5. Program Pemanfaatan Ruang
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

6.4.3. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini yang utama adalah mencegah timbulnya pengaruh negatif yang timbul terhadap lingkungan dan mengusahakan kelestarian sumber daya alam agar bisa digunakan terus menerus untuk generasi-generasi di masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan akan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia untuk jangka yang lebih panjang.

Berdasarkan Tabel 6.13, program RPJMD yang berpengaruh terhadap Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebanyak 18 program, sedangkan program yang tidak berpengaruh sebanyak 5 program dan 10 program yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.



6.4.4. Dampak Resiko LH

KRP RPJMD dapat berdampak negatif bagi penurunan kualitas lingkungan dan pencemaran (udara, tanah, air, laut), cadangan SDA menipis, ketidakseimbangan iklim pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu perlu sinergisme antara pembangunan dan lingkungan hidup.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan tabel 6.13 diketahui bahwa ada sebanyak 25 program yang apabila dilaksanakan mempunyai dampak resiko terhadap Lingkungan Hidup dan 8 program yang tidak mempunyai dampak resiko terhadap Lingkungan Hidup.

6.4.5. Perubahan Iklim

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi selama periode Januari sampai April dengan curah hujan tertinggi mencapai 358 mm, sementara pada bulan Agustus dan September paling sedikit diguyur hujan.

Jika diamati pada tiga tahun terakhir ini, maka rata-rata curah hujan maupun hari hujan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan fenomena alam ini merupakan salah satu dampak dari *global warming* yang sedang disoroti oleh pemerhati lingkungan di seluruh dunia.

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai Afaw (menurut sistem Koppen) yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.



Program yang mempengaruhi perubahan iklim adalah Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura, hal ini disebabkan karena apabila nantinya ada pembukaan lahan secara luas untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan terutama pembukaan lahan perkebunan yang berada di lahan Gambut.

6.4.6. Keanekaragaman Hayati

Biodeversitas atau keanekaragaman hayati adalah seluruh bentuk kehidupan secara ilmiah yang dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses ekologi lainnya yang menjadi bagian kehidupan.

Program RPJMD yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati adalah sebanyak 9 program, program yang tidak berpengaruh sebanyak 6 program dan program yang diperkirakan dapat berpengaruh adalah sebanyak 17 program.



6.5. Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU

Tabel 6.15

Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU

No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Telaahan pengaruh terhadap Program ini lebih dikarenakan belum keluarnya perizinan untuk operasional 2 incenerator yang ada di puskesmas Sungai Pandan dan Banjarang	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya: Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Program Penyelenggaraan BLUD	Telaahan pengaruh terhadap Program ini lebih dikarenakan belum keluarnya perizinan untuk operasional 1 incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung	Program Penyelenggaraan BLUD: Penyelesaian Perizinan Operasional 1 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan : 1) akan menimbulkan pencemaran air; 2) akan menimbulkan limbah padat pada saat kontruksi, 3) menimbulkan limbah B3 4) tertutupnya saluran air/drainase	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan :1.Melakukan penyiraman saat kegiatan 2) membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuatan akhir sampah 3. Membuang limbah b3 ke tempat yang
4	Program pembangunan jalan dan jembatan		
5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
		terhambat; 4) meningkatnya perubahan penggunaan lahan, 5) serta menurunnya sistem tata air; sehingga akan mengganggu efisiensi pemanfaatan SDA dan kehati	sesuai 4. pembuatan gorong-gorong atau box culvaert dan saluran drainase yang sesuai dengan kondisi lapangan; 4. Pengetatan penggunaan lahan ; 5. meningkatkan pengawasan /pengendalian bangunan.
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Akan menaikkan pirit, 2. carbon-carbon saat bungkarakan gambut akan menimbulkan gas rumah kaca 3. perubahan penggunaan lahan 4. akan berkurangnya spesies tertentu	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya diharapkan: Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum, desain irigasi memperhitungkan kontur tanah setempat.
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	Program pengembangan wilayah perbatasan akan menimbulkan 1. Perubahan penggunaan lahan 2. mempengaruhi tata air 3. mempengaruhi ekosistem	Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan: 1. Pembangunan dengan sistem panggung dan 2. pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
8	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman menimbulkan: 1. kurangnya Ketersediaan tempat untuk	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman diharapkan: Masyarakat menyediakan lokasi untuk menyediakan sapsras untuk sanitasi di pemukiman



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
		pembangunan sanitasi (sampah, limbah, dan drainase)	
9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku akan menimbulkan: 1. Limbah hasil olahan yang di buang ke badan sungai akan menurunkan kualitas air 2. ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan pengelohan air baku 3. menghasilkan limbah B3	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan: 1. membuat kajian air limbah 2. ketersediaan lahan untuk penyediaan Sarana pengelolaan dan pengolahan air baku dan limbah
10	Program Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang akan menimbulkan: 1. alih fungsi lahan 2. perubahan ekosistem	Program Pemanfaatan Ruang diharapkan 1. pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya
11	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan akan menimbulkan 1)dengan bertambahnya perumahan akan meningkatkan pencemaran, 2) akan meningkatnya volume limbah padat dan cair, 3) pengurukan lahan didaerah rawa akan mengurangi daerah resapan air dan 4) perubahan alih fungsi lahan 5) Perubahan ekosistem	Program Pengembangan Perumahan perlu pembuatan IPAL/ septiktank, RTH, Drainase, subdrainase (Drainase bawah tanah),TPS, sumur resapan, hidrand dan pengetatan perizinan perumahan pada areal tertentu, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Dan menyediakan alokasi lahan untuk PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
12	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Telaahan Pengaruh terhadap program ini lebih dikarenakan 2 faktor yaitu: budaya masyarakat yang kebanyakan memakamkan anggota keluarganya di lingkungan tempat tinggal dan faktor yang ke dua adalah pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Program Pengelolaan Areal Pemakaman: Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan). Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk melindunginya. selain itu juga perlujuga dibuatkan regulasi regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda)
13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) berdampak terhadap lingkungan disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia/anorganik	Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas pertanian padi organik
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Telaahan pengaruh program ini adalah pengaruh kegiatan perkebunan sawit di kabupaten HSS yang menyebabkan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan: Perlu upaya pengembalian tata air di kawasan paminggir



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
		terbatasnya sumber daya air di wilayah kecamatan paminggir	
15	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Telaahan pengaruh program ini adalah pengaruh kegiatan perkebunan sawit di kabupaten HSS yang menyebabkan keringnya wilayah kecamatan paminggir	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG: Perlu upaya pengembalian tata air di kawasan paminggir
16	Program Pengembangan Pasar Daerah	Program pengembangan pasar daerah memberikan resiko dampak terhadap lingkungan hidup terkait dengan pemanfaatan lahan untuk pembangunan pasar, serta terkait dengan pengelolaan persampahan, limbah cair	Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan pola ruang di tata ruang daerah, harus dibangun TPS di setiap pasar, ada penampungan/pengelolaan limbah cair
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga ini berpotensi merubah kawasan pertanian yang ada menjadi kawasan sport centre, selain itu juga kawasan sport centre ini masih kekurangan penghijauan (taman)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga: perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan sport centre sebenarnya tidak bermasalah, karena kawasan pertanian yang ada di sekitar kawasan tersebut adalah kawasan pertanian yang bisa di alih fungsi. Perlunya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre, sehingga pembangunan venue olahraga dapat lebih



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
			terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau.
18	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan berdampak terhadap penurunan kualitas tanah dan air disebabkan penggunaan pakan, pembuatan kolam di lahan rawa	Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pembuatan kolam harus sesuai dengan peruntukkan lahan di tata ruang
19	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Budidaya Perikanan berdampak terhadap ekosistem perairan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan contoh penggunaan tuba, setrum, dll	Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge, lalangit, lunta dll
20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi
21	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan		
22	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya		



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
23	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan dapat menimbulkan: 1. penurunan kualitas air dari sisa makanan ikan di tambak dan keramba, 2. penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 3. penggunaan bahan pengawet yang berbahaya 4. menghasilkan limbah cair dan padat 5. perubahan fungsi lahan pertanian menjadi usaha perikanan. 6. pengkapan overfishing	Usaha Perikanan diharapkan: 1. Pemberian pakan yang sesuai dengan daya tampung ikan 2. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan 3. penggunaan bahan pengawet alami 4. Perlu penampungan limbah cair dan padat 5. pembuatan tambak yang sesuai dengan peruntukannya 6. penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi
24	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan		
25	Optimalisasi Usaha Perikanan		
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata menimbulkan: 1. perubahan fungsi lahan 2. Limbah padat dan cair dari pengunjung atau bangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata 3. penyediaan Sarana dan prasarana penunjang pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan: Sesuai dengan peruntukannya 2. Penyediaan tempat-tempat penampungan sampah dan ipal 3. memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat
27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan berdampak terhadap lingkungan disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia/anorganik	Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas pertanian padi organik



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
28	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tidak berpengaruh terhadap lingkungan	--
29	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan berdampak dengan lingkungan khususnya yang berdekatan dengan lokasi permukiman	Perlu penerapan GPF (Good Practice Farming) yaitu beternak secara baik
30	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura berdampak terhadap penurunan kualitas air dan tanah serta Pembukaan lahan untuk perkebunan secara luas dapat berakibat terhadap perubahan iklim dan biodiversity	Kajian AMDAL
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian berdampak disebabkan penggunaan alat/mesin bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil yang bisa mencemari tanah pertanian	Perawatan alat/mesin secara berkala
32	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Program pengembangan Industri Kecil Menengah dapat menyebabkan turunnya	Penggunaan pewarna alami



No	Program	Telaahan Pengaruh	Alternatif Perbaikan RPJMD
		kualitas air dan tanah yang disebabkan oleh industri rumah tangga contoh penggunaan pewarna pada kerajinan anyaman purun dan eceng gondok	

Sumber: Hasil Analisa dan FGD KLHS RPJMD Tahun 2018



6.6. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

6.6.1. Rekomendasi Lingkungan

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan:
 - a) Melakukan penyiraman jalan saat kegiatan
 - b) Membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuangan akhir sampah
 - c) Membuang limbah b3 ke tempat yang sesuai
 - d) Pembuatan gorong-gorong atau box culvert yang sesuai dengan kondisi lapangan dan saluran drainase sepanjang jalan;
 - e) Pengetatan penggunaan lahan ;
 - f) Meningkatkan pengawasan/pengendalian bangunan.
 - g) Penghijauan kiri kanan jalan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya diharapkan:
 - a) Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum,
 - b) Pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.
3. Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan:
 - a) Pembangunan dengan sistem panggung dan
 - b) Pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
4. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman diharapkan: Masyarakat berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapras untuk sanitasi yang dihibahkan kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-10 kepala keluarga.
5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan:
 - a) Membuat fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah sludge
 - b) Ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana pengelolaan dan



pengolahan air baku

6. Program Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang dan DDDT
7. Program Pengembangan Perumahan perlu:
 - a) Pembuatan IPAL/ septiktank kedap air, RTH, Drainase, TPS, sumur resapan, hidrand,
 - b) Pengetatan perizinan lingkungan perumahan
 - c) Mengalokasikan lahan untuk PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan diharapkan:
 - a) Konversi pakan yang sesuai tumbuh kembang ikan
 - b) Penggunaan bahan pengawet alami
 - c) Perlu penampungan limbah cair dan padat
 - d) Pembuatan kolam ikan yang sesuai dengan daya dukung lahannya dan
 - e) Penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi
9. Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan:
 - a) Pemanfaatan kawasan wisata Sesuai dengan peruntukannya
 - b) Pengelolaan sampah
 - c) Memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat dan
 - d) Pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata

6.6.2. Rekomendasi Sosial Budaya

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya → Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator yang ada di Kecamatan Sungai Pandan dan Banjang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



2. Program Penyelenggaraan BLUD → Penyelesaian Perizinan Operasional 1 Incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman:
 - a) Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan).
 - b) Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk melindunginya.
 - c) Perlu dibuatkan regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda).
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan → Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu.
5. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG → Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga → perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan sport centre sebenarnya tidak bermasalah, karena kawasan pertanian yang ada di sekitar kawasan tersebut adalah kawasan pertanian yang bisa di alih fungsi. Perlunya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre yang seluas ± 7 ha, sehingga pembangunan venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.

6.6.3. Rekomendasi Ekonomi

1. Program Pengembangan Pasar Daerah, pemanfaatan lahan harus sesuai dengan Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar dan ada



- pengelolaan limbah.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan harus menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pembuatan kolam ikan harus sesuai dengan peruntukkan lahan dan tata kelola air.
 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, harus memperhatikan Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge, lalangit, lunta dll (*digabung dengan Rekomendasi dari Pokja Lingkungan*)
 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, harus memperhatikan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis serta dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan peningkatan luas pertanian padi organik.
 5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan perlu penerapan GPF (Good Practice Farming) yaitu Cara beternak dengan baik.
 6. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang akan diusahakan.
 7. Program pengembangan Industri Kecil Menengah, perlu penggunaan pengawet, penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses pembuatan produk dan pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan.

6.7. Pengambilan Keputusan Rekomendasi KLHS

Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan: 1) hasil analisis pengaruh KRP RPJMD dengan isu PB sangat prioritas; 2) hasil analisis pengaruh KRP RPJMD terhadap kajian muatan lingkungan hidup dan; 3) hasil perumusan alternatif perbaikan KRP RPJMD serta; 4) penyusunan rekomendasi perbaikan KRP RPJMD. erdasarkan hasil analisis tersebut, maka selanjutnya para pemangku kepentingan, Pokja PL, tenaga ahli penyusunan dokumen RPJMD dan tenaga ahli KLHS memutuskan bahwa rekomendasi hasil KLHS RPJMD di integrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022.



6.8. Integrasi KLHS ke dalam Dokumen RPJMD Kab. HSU

Integrasi hasil KLHS ke dalam KRP RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 dilakukan dengan melakukan pemaparan hasil rekomendasi KLHS oleh Tim Penyusun KLHS (Pokja PL) kepada tenaga ahli penyusunan dokumen RPJMD Kab. HSU dengan cara:

1. Menampilkan isu pembangunan berkelanjutan sangat prioritas yang disepakati pemangku kepentingan.
2. Menampilkan hasil kajian pengaruh KRP terhadap pembangunan berkelanjutan.
3. Menampilkan langkah alternatif penyempurnaan KRP RPJMD
4. Menyampaikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan perbaikan KRP dalam RPJMD.

Tabel 6.16
Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kab. HSU

No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Program Penyelenggaraan BLUD	Penyelesaian Perizinan Operasional 1 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	1. Melakukan penyiraman saat kegiatan
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	2. Membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuatan akhir sampah
5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3. Membuang limbah B3 ke tempat yang sesuai
		4. pembuatan gorong-gorong atau box culvert dan saluran drainase yang sesuai dengan kondisi lapangan
		5. Pengetatan penggunaan lahan
		6. Meningkatkan pengawasan / pengendalian bangunan.
		7. Penghijauan Kiri Kanan Jalan



No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum2. Pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.3. Pengendalian Tata Air Ekosistem Gambut dan Rawa**
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dengan sistem panggung dan2. Pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
8	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi pelarangan dan penertiban jamban-jamban dipinggir sungai untuk kemudian diarahkan penggunaan WC Komunal.***2. Masyarakat berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapras untuk sanitasi yang dihibahkan kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-10 kepala keluarga.
9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah sludge2. Ketersediaan lahan untuk penyediaan Sarana pengelolaan dan pengolahan air baku
10	Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang dan DDDT
11	Program Pengembangan Perumahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan IPAL/ septiktank kedap air, RTH, Drainase, TPS, sumur resapan, hidrand2. Pengetatan perizinan lingkungan perumahan3. Mengalokasikan lahan untuk PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)
12	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	<ol style="list-style-type: none">1. Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan).



No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
		<ol style="list-style-type: none">2. Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk melindunginya.3. perlu dibuatkan regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda)
13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	<ol style="list-style-type: none">1. Perlunya strategi untuk mengantisipasi kemarau panjang.***2. Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas pertanian padi organik.
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu
15	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
16	Program Pengembangan Pasar Daerah	Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar, ada pengelolaan limbah.
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Perlunya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre yang seluas \pm 7 ha, sehingga pembangunan venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.
18	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Harus menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)2. Pembuatan kolam harus sesuai dengan peruntukkan lahan dan tata kelola air.3. Perlunya pembuatan sistem pembuangan limbah hasil panen ikan.***



No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
19	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Harus memperhatikan Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge, lalangit, lunta dll
20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	1. Pemberian pakan yang sesuai dengan daya tampung ikan 2. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan 3. Penggunaan bahan pengawet alami 4. Perlu penampungan limbah cair dan padat 5. Pembuatan tambak yang sesuai dengan peruntukannya 6. Penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi
21	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan	
22	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	
23	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	
24	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan	
25	Optimalisasi Usaha Perikanan	
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pemanfaatan kawasan wisata sesuai dengan peruntukannya 2. Pengelolaan Sampah 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat 4. Pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata
27	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan*	Memperhatikan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis serta dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan peningkatan luas pertanian padi organik.
28	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*	Perlu penerapan GPF (Good Practice Farming) yaitu beternak secara baik
29	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan*	Perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang akan diusahakan.
30	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura*	



No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
31	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Penggunaan pengawet, penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses pembuatan produk dan pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan.

Sumber: Hasil Analisa dan FGD KLHS RPJMD Tahun 2018

* Perubahan Nama Program Setelah Adanya Verifikasi Renstra SKPD

** Hasil Masukan dari Forum Konsultasi Publik

***Masukan hasil Validasi KLHS RPJMD Kab. HSU



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pelaksanaan tahapan KLHS dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya pada PP 46 tahun 2016, maka dapat disimpulkan hasil akhir KLHS RPJMD Kab. HSU sebagai berikut:

- A. Hasil pengkajian pengaruh KRP RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan hingga diperoleh isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilaksanakan melalui FGD dengan melibatkan pokja PL, pemangku kepentingan dan tenaga ahli.
 2. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan diperoleh: 15 isu lingkungan, 15 isu sosial budaya dan, 15 isu ekonomi.
 3. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan paling Strategis diperoleh: 10 isu lingkungan, 10 isu sosial budaya dan, 3 isu ekonomi.
 4. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan Prioritas diperoleh: 4 isu lingkungan, 4 isu sosial budaya dan, 3 isu ekonomi.
 5. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan Sangat Prioritas (terpilih) diperoleh: 2 isu lingkungan yaitu Alih Fungsi Lahan dan Banjir, 2 isu sosial budaya yaitu: Pendidikan Karakter dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan 2 isu ekonomi yaitu: Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan agribisnis.



6. Tahap identifikasi materi muatan KRP RPJMD yang signifikan berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup diperoleh:
 - 1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya.
 - 2) Program Penyelenggaraan BLUD
 - 3) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)
 - 4) Program pembangunan jalan dan jembatan
 - 5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - 6) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - 7) Program pengembangan wilayah perbatasan
 - 8) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman
 - 9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 10) Program Pemanfaatan Ruang
 - 11) Program Pengembangan Perumahan
 - 12) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
 - 13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
 - 14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - 15) Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG
 - 16) Program Pengembangan Pasar Daerah
 - 17) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 18) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - 19) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - 20) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan
 - 21) Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan
 - 22) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
 - 23) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
 - 24) Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan
 - 25) Optimalisasi Usaha Perikanan



- 26) Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 27) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan
 - 28) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - 29) Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan
 - 30) Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
 - 31) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 32) Program pengembangan Industri Kecil Menengah
7. Tahap analisis Pengaruh KRP RPJMD dengan Isu PB Prioritas diperoleh hasil bahwa perlu dilakukan kajian muatan LH terhadap: 32 program yang ada di RPJMD Kab. HSU
 8. Tahap analisis pengaruh KRP RPJMD terhadap kajian muatan LH diperoleh hasil yaitu:
 - a) 7 (tujuh) program menurunkan DDDT
 - b) 7 (tujuh) program menurunkan jasa ekosistem
 - c) 18 (delapan belas) program yang berpengaruh terhadap efisiensi pemanfaatan SDA
 - d) 25 (dua puluh lima) program yang mempunyai dampak resiko LH
 - e) 2 (dua) program yang dapat menyebabkan perubahan iklim
 - f) 9 (sembilan) program dapat berpengaruh kepada keanekaragaman hayati



B. Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU yang disepakati adalah:

Tabel 7.1

Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU

No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Program Penyelenggaraan BLUD	Penyelesaian Perizinan Operasional 1 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	1. Melakukan penyiraman saat kegiatan
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	2. Membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuatan akhir sampah
5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3. Membuang limbah B3 ke tempat yang sesuai
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	4. pembuatan gorong-gorong atau box culvert dan saluran drainase yang sesuai dengan kondisi lapangan
7	Program pengembangan wilayah perbatasan	5. Pengetatan penggunaan lahan
8	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	6. Meningkatkan pengawasan / pengendalian bangunan.
		7. Penghijauan Kiri Kanan Jalan
		1. Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum
		2. Pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.
		3. Pengendalian Tata Air Ekosistem Gambut dan Rawa**
		1. Pembangunan dengan sistem panggung dan
		2. Pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
		1. Sosialisasi pelarangan dan penertiban jamban-jamban dipinggir sungai untuk kemudian diarahkan penggunaan WC Komunal.***



No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
		2. Masyarakat berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapras untuk sanitasi yang dihibahkan kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-10 kepala keluarga.
9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1. Membuat fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah sludge 2. Ketersediaan lahan untuk penyediaan Sarana pengelolaan dan pengolahan air baku
10	Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang dan DDDT
11	Program Pengembangan Perumahan	1. Pembuatan IPAL/ septiktank kedap ai, RTH, Drainase, TPS, sumur resapan, hidrand 2. Pengetatan perizinan lingkungan perumahan 3. Mengalokasikan lahan untuk PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)
12	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1. Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan). 2. Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk melindunginya. 3. perlu dibuatkan regulasi regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda)
13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1. Perlunya strategi untuk mengantisipasi kemarau panjang.*** 2. Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas pertanian padi organik.



No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu
15	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
16	Program Pengembangan Pasar Daerah	Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar, ada pengelolaan limbah.
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Perlunya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre yang seluas \pm 7 ha, sehingga pembangunan venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.
18	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Harus menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)2. Pembuatan kolam harus sesuai dengan peruntukkan lahan dan tata kelola air.3. Perlunya pembuatan sistem pembuangan limbah hasil panen ikan.***
19	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Harus memperhatikan Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge, lalangit, lunta dll
20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian pakan yang sesuai dengan daya tampung ikan2. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan3. Penggunaan bahan pengawet alami4. Perlu penampungan limbah cair dan padat5. Pembuatan tambak yang sesuai dengan peruntukannya6. Penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi
21	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan	
22	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	
23	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	



No	Program	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
24	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan	
25	Optimalisasi Usaha Perikanan	
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pemanfaatan kawasan wisata sesuai dengan peruntukannya 2. Pengelolaan Sampah 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat 4. Pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata
27	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan*	Memperhatikan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis serta dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan peningkatan luas pertanian padi organik.
28	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*	Perlu penerapan GPF (Good Practice Farming) yaitu beternak secara baik
29	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan*	Perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang akan diusahakan.
30	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura*	
31	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Penggunaan pengawet, penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses pembuatan produk dan pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan.

Sumber: Hasil Analisa dan FGD KLHS RPJMD Tahun 2018

* Perubahan Nama Program Setelah Adanya Verifikasi Renstra SKPD

** Hasil Masukan dari Forum Konsultasi Publik

***Masukan hasil Validasi KLHS RPJMD Kab. HSU

7.2.Saran

- 1) Hasil dari KLHS RPJMD ini harus dipedomani oleh semua SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyusunan Renstra SKPD 2017-2022.



- 2) Perlunya peningkatan kekompakkan tim penyusun KLHS RPJMD Kab.HSU terutama dalam hal perumusan analisis dan penyusunan laporan KLHS RPJMD.
- 3) Peserta FGD dari SKPD dan pemangku kepentingan yang hadir sering bergantian mengikuti FGD KLHS RPJMD, sehingga perlu penyampaian materi dan hasil FGD sebelumnya berulang-ulang. Selanjutnya diharapkan kedepannya ditetapkan nama peserta FGD yang mewakili SKPD terkait.



LAMPIRAN

- 1. TABEL KERJA ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
- 2. PENJAMINAN KUALITAS**
- 3. KOMPETENSI TENAGA AHLI**
- 4. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAHUN 2017 DAN 2018**
- 5. FGD I**
- 6. FGD II**
- 7. BIMTEK PENYUSUNAN KLHS**
- 8. FGD III – VII**
- 9. KONSULTASI PUBLIK KLHS RPJMD KAB HSU**
- 10. VALIDASI KLHS RPJMD**



TABEL KERJA ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



TABEL KERJA ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
Bab I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang	Y			
1.2	Dasar Hukum Penyusunan		Tidak		
1.3	Hubungan Antar Dokumen		Tidak		
1.4	Maksud dan Tujuan		Tidak		
1.5	Sistematika Penulisan		Tidak		
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	Y		a) Memasukkan permasalahan / tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	Sudah
				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungan dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan.	Sudah
				c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat.	Sudah
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Y		a) Memasukkan permasalahan / tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	Sudah
				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungan dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan.	Sudah

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
				c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat.	Sudah
2.3	Aspek Pelayanan Umum	Y		a) Memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat	Sudah
				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungan dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan.	Sudah
				c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek pelayanan umum.	Sudah
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	Y		a) Memberikan gambaran terkait kondisi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.	Sudah
				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi eksisting daya saing daerah, usaha peningkatan dan pencapaian target pembangunan berlandaskan asas berkelanjutan di akhir tahun dokumen perencanaan.	Sudah
				c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek daya saing daerah.	Sudah

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.3	Kerangka Pendanaan		Tidak		
Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan	Y		a) Memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitas; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunann kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Sudah
				b) Memasukkan hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan di daerah.	Sudah
4.2	Isu Strategis	Y		a) Menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan	Sudah

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
				pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman, pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	
				b) Memasukkan isu utama hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah.	Sudah
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
5.1	Visi	Y		Disesuaikan dengan visi kepala daerah.	Sudah
5.2	Misi	Y		Memastikan dokumen rencana daerah sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung asas pembangunan berkelanjutan.	Sudah
5.3	Tujuan dan Sasaran	Y		Memastikan dokumen rencana sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah	Sudah

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
6.1	Strategi	Y		Menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Sudah
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	Y		Menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Sudah
6.3	Program Pembangunan Daerah	Y		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan	Sudah dimasukkan, kecuali untuk fokus lokasi masih belum teridentifikasi

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
				<p>gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitas; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan.</p>	pada program yang ada
				<p>b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program pembangunan di daerah, disertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.</p>	
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan				

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
	Program Perangkat Daerah				
7.1	Program Perangkat Daerah	Y		<p>a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan daerah yang disusun diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi perenaran program yang diagendakan</p> <p>b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program perangkat daerah, disertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil</p>	<p>Sudah</p> <p>Sudah dimasukkan, kecuali untuk fokus lokasi masih belum teridentifikasi pada program yang ada</p>

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs	Ket
		Ya	Tidak		
				kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.	
				c) Memasukkan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program perangkat daerah	Sudah
7.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2017-2022	Ya		Memasukkan/mengintegrasikan hasil rekomendasi / alternatif KLHS ke dokumen RPJMD	Sudah
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tidak		
Bab IX	Penutup		Tidak		



PENJAMINAN

KUALITAS





PENJAMINAN KUALITAS KLHS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, dengan cara:

1. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasi, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;
2. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
3. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan KLHS untuk penyempurnaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022. Proses pelaksanaannya terdiri atas:

1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - a. Proses pelaksanaan Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - b. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - c. Identifikasi dan Perumusan Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan
 - d. Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
 - e. Identifikasi dan Perumusan Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
 - f. Identifikasi Materi Muatan KRP RPJMD yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - g. Analisis Pengaruh KRP RPJMD dengan Isu Prioritas PB
 - h. Analisis Pengaruh KRP RPJMD terhadap Kajian Muatan
2. Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD
3. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

4. Pengintegrasian Alternatif Perbaikan ke dalam dokumen RPJMD
 - a. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan RPJMD
 - b. Pengambilan Keputusan Rekomendasi KLHS
 - c. Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke dalam dokumen KRP.

Penyelenggaraan KLHS RPJMD sesuai dengan pasal 14 sampai 19 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sesuai dengan pasal 6 sampai 16 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyebutkan bahwa Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai penyusun Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian dokumen penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, diucapkan terimakasih.

An. Bupati Hulu Sungai Utara
Plt. Sekretaris Daerah,


Drh. H. SUYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610521 198903 1 006

**PENJAMINAN KUALITAS
KLHS RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017-2022**

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan penilaian mandiri yang kriteria pokoknya adalah sebagai berikut :

Nama KLHS	KLHS RPJMD
Nama Kebijakan, Rencana, atau Program (KRP)	KRP KLHS RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
K/L Penanggung Jawab	BUPATI HULU SUNGAI UTARA
Tahun Pelaksanaan	2017 dan 2018

Penilaian : Desain proses KLHS		
K	Penilaian	Ket
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c	Ya	
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?		
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?		
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	Ya	Sesuai SK Bupati tentang Pokja PL dan SK Tenaga Ahli
Ringkasan kesimpulan: Harus menjelaskan apakah proses KLHS sesuai ketentuan, dan rekomendasinya layak (relevan, memenuhi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah peraturan perundangan yang terkait)		
Penilaian : Laporan KLHS		
Kriter	Penilaian	Ket.
Apakah Laporan KLHS telah memuat :	Nilai : • Belum lengkap • Lengkap • Terpenuhi sebagian • Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan)	

f d

1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	Lengkap	Sesuai UU No:32/2009 dan PP No: 46/2016
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Lengkap	Metode dan Teknik 1. Telaah Dokumen 2. FGD 3. Retrospektif 4. Prospektif Tahapan Kegiatan 1. Identifikasi dan perumusan isu PB 2. Identifikasi dan perumusan isu PB Paling Strategis 3. Identifikasi dan perumusan isu PB Prioritas 4. Identifikasi dan perumusan isu PB Sangat Prioritas 5. Identifikasi Materi Muatan KRP RPJMD yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH 6. Analisa Pengaruh KRP RPJMD dengan Isu Prioritas PB 7. Analisa Pengaruh KRP RPJMD terhadap Kajian Muatan LH
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	Lengkap	Metode dan Teknik 1. Telaah Dokumen 2. FGD 3. <i>Expert Judgement</i> Tahapan Kegiatan 1. Memperhatikan kesimpulan kajian pengaruh 2. Merumuskan alternatif
4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Lengkap	1. DDDT 2. Dampak Resiko LH 3. Jasa Ekosistem 4. Efisiensi Pemanfaatan SDA 5. Perubahan Iklim 6. Keanekaragaman Hayati
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	Lengkap	Integrasi hasil KLHS ke dalam KRP RPJMD Kab. HSU 2017-2022 dilaksanakan dengan melakukan pemaparan hasil rekomendasi KLHS oleh tim penyusun KLHS RPJMD dalam rangka pengambilan keputusan untuk dilakukan pengintegrasian ke dalam KRP RPJMD

6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	Lengkap	Masyarakat pemangku kepentingan yang terkena dampak dan memiliki informasi dilibatkan pada FGD untuk: 1. Memberikan pendapat, saran dan usul 2. Pendampingan Tenaga Ahli 3. Bantuan Teknis 4. Penyampaian informasi dan pelaporan 5. Merumuskan Kesepakatan Bersama
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS	Lengkap	Menjadi tanggungjawab penyusun KRP RPJMD dalam rangka pelaksanaan dan monev KRP
8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas	Lengkap	Rekomendasi diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Identifikasi dan perumusan Isu PB Sangat Prioritas 2. Identifikasi materi muatan KRP RPJMD yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH 3. Analisis pengaruh KRP RPJMD dengan isu prioritas PB 4. Analisis pengaruh KRP RPJMD terhadap kajian muatan LH 5. Perumusan Alternatif 6. Penyusunan Rekomendasi

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas?	Sudah	
Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan :		
1. Karakteristik wilayah	Sudah	Isu-Isu Strategis: 1. Penurunan Kualitas Air 2. Pengelolaan Sampah 3. Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Tata Ruang dan Bangunan 4. Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m 5. Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai 6. Alih fungsi lahan 7. Pengelolaan Lahan Rawa
2. Tingkat pentingnya potensi dampak	Sudah	
3. Keterkaitan antar isu strategis	Sudah	
4. Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Sudah	
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau	Belum ada RPPLH	

6.	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.	Sudah	8. Banjir 9. Kualitas Air Baku 10. Sedimentasi Sungai Tinggi 11. Pertumbuhan ekonomi 12. Pengembangan agribisnis 13. Infrastruktur perekonomian 14. Mengurangi angka pengangguran 15. Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 16. Pengurangan Penyalahgunaan Nafza 17. Penurunan Angka Kemiskinan 18. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah 19. Peningkatan Pendidikan Karakter 20. Penurunan Angka Putus Sekolah 21. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) 22. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 23. Peningkatan Jaminan Kesehatan
Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	Sudah	Isu-Isu Prioritas adalah: 1. Penurunan Kualitas Air 2. Pengelolaan Sampah 3. Alih Fungsi Lahan 4. Banjir 5. Pertumbuhan ekonomi 6. Pengembangan agribisnis 7. Infrastruktur perekonomian 8. Penyalahgunaan Nafza 9. Angka Kemiskinan 10. Pendidikan Karakter 11. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Sudah	
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem.	Sudah	
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	Sudah	
5.	Status mutu dan ketersediaan SDA.	Sudah	
6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	Sudah	
8.	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.	Sudah	
9.	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	Sudah	
10.	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	Sudah	
Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas?		Sudah	Diuraikan pada Bab 3

Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?	Sudah	Diuraikan pada Bab 3
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?	Sudah	Diuraikan pada Bab 5

Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?	Ya	
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Ya	
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?	Ya	
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?	Tidak	
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh : isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi		

Penilaian : Pengkajian

Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah pengkajian memuat :		
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	Sudah	Diuraikan pada bab 3
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Sudah	Diuraikan pada bab 6
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Sudah	Diuraikan pada bab 6
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Sebagian	Ketersediaan data yang minim
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan	Sudah	Diuraikan pada bab 6
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	Diuraikan pada bab 6
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?	Ya	Diuraikan pada bab 6

Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Tidak	Program-program di dalam RPJMD belum menyebutkan lokasi/keruangan
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Ya	Diuraikan pada bab 6

Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi		
Kriteria	Penilaian	Ket
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai dibawah ini:		
1. Perubahan tujuan atau target	Tidak	Diuraikan pada bab 6
2. Perubahan strategi pencapaian target	Tidak	
3. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi	Ya	
4. Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Ya	
5. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	Tidak	

1 A

6.	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	Ya	
7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ya	
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternative KRP serta rekomendasi KLHS?		Ya	Diuraikan pada bab 6
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas?		Ya	
Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin/masih akan muncul?		Ya	
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas?		Ya	
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian, dan penyusunan alternatif?		Ya	
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?		Ya	

Penilaian : Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	Pemenuhan	Ket
Apakah telah terpenuhi :	Nilai : • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
Data dukung proses konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	Sudah	Diuraikan pada bab 5
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	Sudah	Diuraikan pada bab 5
Dokumen penjaminan kualitas	Sudah	Diuraikan pada Lampiran
Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	Sudah	Diuraikan pada Lampiran
SK Kelompok Kerja KLHS	Sudah	Diuraikan pada Lampiran



Penilaian : Integrasi Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan		
Kriteria	Pemenuhan	Ket
Apakah telah terpenuhi :		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP	Ya	Diuraikan pada bab 6
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP	Ya	Diuraikan pada bab 6
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP	Ya	Diuraikan pada bab 6
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)	Ya	Diuraikan pada bab 6
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	Ya	Diuraikan pada bab 6
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS	Ya	Diuraikan pada bab 6
Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP	Ya	Diuraikan pada bab 6

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Ya	Diuraikan pada bab 5
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Ya	Diuraikan pada bab 5
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Ya	Diuraikan pada bab 5
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Ya	Diuraikan pada bab 5

Keterangan:

KRP = kebijakan, rencana, dan/atau program

10

4. Pengintegrasian Alternatif Perbaikan ke dalam dokumen RPJMD
 - a. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan RPJMD
 - b. Pengambilan Keputusan Rekomendasi KLHS
 - c. Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke dalam dokumen KRP.

Penyelenggaraan KLHS RPJMD sesuai dengan pasal 14 sampai 19 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sesuai dengan pasal 6 sampai 16 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyebutkan bahwa Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai penyusun Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian dokumen penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, diucapkan terimakasih.

An. Bupati Hulu Sungai Utara
Plt. Sekretaris Daerah,

Drh. H. SUYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610521 198903 1 006



KOMPETENSI TENAGA AHLI



CURRICULUM VITAE

1. N a m a : Prof.Dr.Ir. H.Syarifuddin Kadir,M.Si
2. NIP : 19630408 198903 1 018
4. Tempat/Tanggal Lahir : Tamatia (Gowa Sul-Sel) 04-08-1963
5. Agama/Jenis Kelamin : Islam / Laki-laki
6. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
7. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
8. Unit kerja (Kantor) : Fakultas Kehutanan Unlam Kalimantan Selatan
9. Alamat Kantor dan Nomor Telp/ : Jl. Jend A. Yani Km 36 Banjarbaru 0511 (47722900)
10. Alamat Rumah : Jl. Haruan No.61/19 Komplek Cahaya Ratu Elok
Banjarbaru Kal-Sel
- Tlp/HP/e-mail : 0511-4773763; 081349776113
email odeng1987@yahoo.com
11. Pendidikan terakhir : S-3 (Pascasarjana) Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan, Universitas Brwijaya Malang

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Mulai Kuliah	Tahun Lulus	PENDIDIKAN	Perguruan Tinggi/Kota	Jurusan/Bidang Studi
1981	1986	Sarjana (S-1)	Universitas Hasanuddin/ Di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Manajemen Hutan
1994	1996	Pascasarjana (S-2)	Universitas Hasanuddin/ Di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelolaan Lingkungan Hidup/Pengelolaan DAS
2010	2014	Doktor (S3)	Universitas Brawijaya/ Di Malang Provinsi Jawa Timur	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan/Pengelolaan DAS

A. Narasumber/Fasilitator Bidang Lingkungan Hidup Strategis

1. Konsultan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kerjasama Departemen Dalam Negeri) Jakarta Mei sampai dengan Desember 2010 sumber Biaya **DANIDA 2010**).
2. Konsultasi Jejaring Kerjasama Perguruan Tinggi Mendukung Inplementasi KLHS di Indonesia di Holtel Santika Jogjakarta 14-16 Oktober 2010.
3. Persiapan Fasilitasi KLHS Provinsi, di Yogyakarta, 1 Februari 2011
4. Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) dalam RTRW dan RPJMD di Gedung Serbaguna Kementerian Dalam Negeri Jakarta, 8 Februari 2011

5. Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk 9 Provinsi di Hotel Bidakara Jakarta, 9 – 11 Februari 2011
6. Pemaparan pembelajaran Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Hotel Bali Handara, Bali, 31 Mei- 1 Juni 2011
7. Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) lingkup Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, 18 – 20 Agustus tahun 2011.
8. Pembahasan Sosialisasi dan Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Pontianak, di Hotel Jayakarta Bandung, 20 – 21 September 2011.
9. Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) lingkup Provinsi Sumatera Selatan, di Hotel Jayakarta Daira Palembang, 25 – 28 September tahun 2011.
10. Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) lingkup Provinsi Lampung di Hotel Novotel Lampung 29 September – 1 Oktober tahun 2011.
11. Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Bangka Belitung di Grand Jatra Hotel Balikpapan, 24 – 26 Oktober tahun 2011.
12. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tahun 2011
13. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotabru Nopember tahun 2011
14. Nasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Pemindahan perkantoran Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten HSS Kandangan, 15 Novenver tahun 2011
15. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk RTRW Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 14 Novenber tahun 2011
16. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk RTRW Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 29 Desember tahun 2011
17. Refleksi Ahir Tahun Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Hotel Goodway Nagoya Batam, 21 – 22 Desember 2011
18. Rakornas KLHS di Ancol Jakarta tanggal 10 Juli 2012
19. Konsultan lokal untuk KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Kal-Sel tahun 2012 (Kerjasama PT Dazyia Ina Mandiri sumber Biaya **Danida ESP-2** tahun 2012)
20. Konsultan KLHS RPJM Kabupaten Barito Kuala tahun 2013
21. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2014
22. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014
23. Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015

24. Narasumber/Fasilitator KLHS Kawasan Strategis Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015
25. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan 2016
26. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 2016
27. Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016
28. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan 2016
29. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 2016
30. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 2016
31. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 2016
32. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 2016
33. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau 2016
34. Narasumber/Fasilitator KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017
35. Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017.
36. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017
37. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017

B. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Hotel Ambara Jakarta 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
2. Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup Strategis (KLHS) di Hotem Palm Banjarmasin April 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
3. Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup (KLHS) di Jakarta, Agustus 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
4. Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup (KLHS) di Banjrmasin, Oktober 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
5. Workshop I Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Banjarmasin Oktober 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
6. Workshop II Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) S di Banjarmasin Nopember 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)

7. Workshop III Kajian Lingkungan Hidup Startegis KLHS di Banjarmasin Desember 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
8. Workshop Nasional muatan Rencana Peraturan Pemerintah dan panduan umum KLHS, di Jakarta Agustus 2011 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup)
9. Pelatihan Auditor Lingkungan, dilaksanakan, tanggal 26 Nop – 01 Des 2011. (pelaksana UGM)
10. Workshop Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD di Jogjakarta, Maret 2012 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup)
11. Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel Millenium Jakarata tanggal 13 – 15 Juni 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .
12. Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel A Banjarmasin tanggal 26 – 28 Juni 2012(pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .
13. Workshop dan sosialisasi KLHS RJMD di Hulu Sungai Utara tanggal 17-19 Juli 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)
14. FGD dan workshop KLHS RPJMD HSU di Hotel Rattan inn Banjarmasin tanggal 7 – 8 Agustus 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)
15. Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainer*) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bogor, 1-4 September 2012 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup)
16. Workshop KLHS MP3EI Regional Kalimantan di Hotel Fave di Jakarta tanggal 18 -20 Maret 2014
17. Lokakarya KLHS MP3EI Regional Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Sulawesi di Hotel Oria Jakarta tanggal 14 -15 September 2014
18. Lokakarya Optimalisasi peran PSL pada KLHS di Hotel Bidakara Jakarta tahun 2015
19. Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainer*) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Master Trainer (Pelatih Nsional) Jakarta, 24-28 Oktober 2016 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
20. Sosialisasi PP No.46 Tentang PP No. 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS di Jakarta 19 Desember 2016 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
21. Master pada Pelatihan KLHS PPLH-LPPM Universitas Sebelas Maret tanggal 6 -. 9 Juni 2015. Di Hotel Montana Banjarbaru
22. Master pada Pelatihan KLHS PPLH-LPPM Universitas Sebelas Maret tanggal 25 -. 28 Maret tahun 2016. Di Hotel Montana Banjarbaru
23. Master pada Pelatih Diklat KLHS Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 – 21 Okotober 2017. Di Hotel Montana Banjarbaru.
24. Master pada pelatihan untuk ToT KLHS Regional Kalimantan tanggal 29 Okteber -. 2 November 2017 kerjasama Hatfield – GGGI. Indonesia. Di Victoria Hotel Banjarmasin
25. Master pada Diklat KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 – 26 November 2017. Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di Vave Hotel Banjarbaru.

26. Master pada pelatihan untuk ToT KLHS Provinsi Kalimantan Timur tanggal 5 – 8 Februari 2018 kerjasama Hatfield – GGGI. Indonesia. Di Swiss belinn hotel Balikpapan

Banjbaru 24 Februari 2018



Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir,M.Si

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Ir. Karta Sirang, M.S
2. NIP : 195303071977031001
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 07 Maret 1953
5. Agama/Jenis Kelamin : Islam / Laki-laki
6. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
7. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
8. Unit kerja (Kantor) : Fakultas Kehutanan Unlam Kalimantan Selatan
9. Alamat Kantor dan Nomor Telp/ : Jl. Jend A. Yani Km 36 Banjarbaru 0511 (47722900)
10. Alamat Rumah : Jl. Guntung Paring no 645 RT 036 RW 003,
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru
- Tlp/HP/e-mail : 085345477645/ raytakdin@gmail.com
11. Pendidikan terakhir : S-2 (Pascasarjana) Perencanaan Hutan UGM
Yogyakarta

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Mulai Kuliah	Tahun Lulus	PENDIDIKAN	Perguruan Tinggi/Kota	Jurusan/Bidang Studi
1977	1981	Sarjana (S-1)	UGM Yogyakarta	Silvikultur
1982	1987	Pascasarjana (S-2)	UGM Yogyakarta	Perencanaan Hutan

A. Narasumber/Fasilitator Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tahun 2011
2. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru Nopember tahun 2011
3. Nasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Pemindahan perkantoran Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten HSS Kandangan, 15 Novenver tahun 2011
4. Konsultan lokal untuk KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Kal-Sel tahun 2012 (Kerjasama PT Dazya Ina Mandiri sumber Biaya **Danida ESP-2** tahun 2012)
5. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2014
6. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014
7. Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015

8. Narasumber/Fasilitator KLHS Kawasan Strategis Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015
9. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan 2016
10. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 2016
11. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan 2016
12. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 2016
13. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 2016
14. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 2016
15. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 2016
16. Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017.
17. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017
18. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017

B. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) di Hotem Palm Banjarmasin April 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
2. Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan hidup (KLHS) di Banjrmasin, Oktober 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
3. Workshop I Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Banjarmasin Oktober 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
4. Workshop II Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) S di Banjarmasin Nopember 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
5. Workshop III Kajian Lingkungan Hidup Startegis KLHS di Banjarmasin Desember 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)
6. Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel A Banjarmasin tanggal 26 – 28 Juni 2012(pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .
7. Workshop dan sosialiasasi KLHS RJMD di Hulu Sungai Utara tanggal 17-19 Juli 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)
8. FGD dan workshop KLHS RPJMD HSU di Hotel Rattan inn Banjarmasin tanggal 7 – 8 Agustus 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)

Banjbaru, 19 Mei 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karta Sirang", with a horizontal line underneath the name.

Ir. Karta Sirang, M.S

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Dr.Badaruddin, S.Hut., M.P.
2. NIP : 197605272002121004
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bangkiling raya, 27 Mei 1976
5. Agama/Jenis Kelamin : Islam / Laki-laki
6. Pangkat/Golongan : Penata Tk I /IId
7. Jabatan Akademik : Lektor
8. Unit kerja (Kantor) : Fakultas Kehutanan Unlam Kalimantan Selatan
9. Alamat Kantor dan Nomor Telp/ : Jl. Jend A. Yani Km 36 Banjarbaru 0511 (47722900)
10. Alamat Rumah : Komp. Wengga Trikora Raya
VB-379 RT.41A/RW.003. Kel. Guntung Manggis
Landasan Ulin Banjarbaru 70721
Tlp/HP/e-mail : 081351979807
ibadhamdie@gmail.com
11. Pendidikan terakhir : S-3 (Pascasarjana) Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan, Universitas Brwijaya Malang

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Mulai Kuliah	Tahun Lulus	PENDIDIKAN	Perguruan Tinggi/Kota	Jurusan/Bidang Studi
1997	2002	Sarjana (S-1)	Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kehutanan Banjarmasin	Teknologi
2004	2007	Pascasarjana (S-2)	Universitas Mulawarman Samarinda	Manajemen Hutan (Perlindungan Hutan)
2010	2014	Doktor (S3)	Universitas Brawijaya/ Di Malang	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

A. Narasumber/Fasilitator Bidang Lingkungan Hidup Strategis

1. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tahun 2011
2. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nopember tahun 2011
3. Nasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Pemindahan perkantoran Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten HSS Kandangan, 15 Novenver tahun 2011
4. Konsultan KLHS RPJM Kabupaten Barito Kuala tahun 2013

5. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2014
6. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan 2016
7. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 2016
8. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan 2016
9. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 2016
10. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 2016
11. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 2016
12. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017
13. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 /2018

B. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel A Banjarmasin tanggal 26 – 28 Juni 2012(pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .
2. Workshop dan sosialisasi KLHS RJMD di Hulu Sungai Utara tanggal 17-19 Juli 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)
3. FGD dan workshop KLHS RPJMD HSU di Hotel Rattan inn Banjarmasin tanggal 7 – 8 Agustus 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)
4. Ikut pada pelatihan untuk ToT KLHS Regional Kalimantan tanggal 29 Okteber -. 2 November 2017 kerjasama Hatfield – GGGI. Indonesia. Di Victoria Hotel Banjarmasin
5. Master pada Diklat KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 – 26 November 2017. Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di Vave Hotel Banjarbaru.

Banjabaru 23 Februari 2018



Dr.Badaruddim,S.Hut,M.P

CURRICULUM VITAE

1. N a m a : Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
2. NIP : 19740707 200212 1 003
4. Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 7 Juli 1974
5. Agama/Jenis Kelamin : Islam / Laki-laki
6. Pangkat/Golongan : Penata Tk I/IIId
7. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
8. Unit kerja (Kantor) : Fakultas MIPA ULM Kalsel
9. Alamat Kantor dan Nomor Telp : Jl. Jend A. Yani Km 36 Banjarbaru 0511-4773112
10. Alamat Rumah : Komp. Pelangi Jaya Lestari Blok C No. 59
Kota Banjarbaru Prov. Kalsel
11. Tlp/HP/e-mail : 081351037167 / ichsanridwan@ulm.ac.id
12. Pendidikan terakhir : S-3 (Pascasarjana) Ilmu Lingkungan, Universitas
Brawijaya, Malang

A. Riwayat Pendidikan

Tahun Mulai Kuliah	Tahun Lulus	Pendidikan	Perguruan Tinggi/Kota	Jurusan/Bidang Studi
1993	1999	Sarjana (S-1)	Universitas Hasanuddin/ Makassar	Fisika / Geofisika
2004	2007	Pascasarjana (S-2)	Institut Teknologi Sepuluh Nopember/Surabaya	Teknik Informatika
2010	2017	Doktor (S3)	Universitas Brawijaya/Malang	Ilmu Lingkungan

B. Narasumber/Fasilitator Bidang Lingkungan Hidup Strategis

1. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala (2017).
2. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2017-2022 Kabupaten HSU (2017).
3. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPDTR Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS (2017).
4. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan (2016).
5. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (2016).
6. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (2016).

7. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (2016).
8. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 2016.
9. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (2016).
10. Narasumber Pelatihan Software Google Earth untuk guru-guru Geografi se Kabupaten Banjar (2016).
11. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2013-2018 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (2013).
12. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2012-2017 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (2013).

C. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Peserta pada *Training of Trainer* (ToT) KLHS Regional Kalimantan tanggal 29 Oktober - 2 November 2017 kerjasama Hatfield – GGGI di Victoria Hotel Banjarmasin.
2. Master pada Diklat KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 – 26 November 2017 di Fave Hotel Banjarbaru.

Banjarbaru, 24 Februari 2018



Dr. Ichsán Ridwan, S.Si., M.Kom.



SK BUPATI TAHUN

2017/2018





**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45/685/KUM/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2018 – 2022
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Hidup, Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 57);

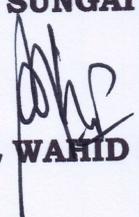
Memperhatikan : Surat Kepala Bappelitbang Kab. HSU, Nomor: 050/026/Litbang/Bappelitbang/2017, Tanggal 13 September 2017, Perihal Mohon diproses untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati HSU;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Hidup, Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017.
- KEDUA :
: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi, mempersiapkan dan mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 sesuai dengan peraturan yang terkait.
- KETIGA :
: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berasal dari Tenaga Ahli Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dengan tugas menyiapkan materi *Focus Group Discussion* (FGD), menyajikan materi dan memberikan tanggapan penjelasan kepada para peserta dan memberikan pemahaman kepada peserta FGD KLHS RPJMD.
- KEEMPAT :
: Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan tugas membuka, mengawal, mengawasi, mengendalikan dan mengarahkan jalanya kegiatan KLHS RPJMD.
- KELIMA :
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEENAM :
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 02 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID HK

Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 188.45/605 /KUM/2017
 Tanggal 02 Oktober 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN
 LINGKUNGAN HIDUP, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
 KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2018 – 2022
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017**

A. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

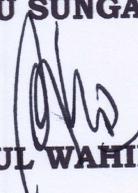
NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG PER KEGIATAN
1.	Pengarah	Kepala Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 400.000,-
2.	Penanggung jawab	Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 350.000,-
3.	Ketua	Kepala Dinas Perkim & LH Kab. HSU	Rp. 300.000,-
4.	Sekretaris	Sekretaris Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 250.000,-
5.	Anggota	1. Kabid. Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		2. Kabid. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		3. Kabid. Perencanaan Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		4. Kabid. Penataan dan Penataan PPLH pada Dinas Perkim dan LH Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		5. Kasubbid. Inovasi dan Teknologi pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		6. Kasubbid. Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		7. Kasubbag. Keuangan dan Aset pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		8. Kasubbag. Program pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		9. Kasubbid. Perencanaan dan Analisis Pendanaan pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		10. Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi pada	Rp. 200.000,-

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG PER KEGIATAN
		Bappelitbang Kab. HSU	
		11. Kasubbid. Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		12. Kasubbid. Pengembangan Ekonomi pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		13. Kasubbid. Infrastruktur pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		14. Kasubbid. Pendidikan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		15. Kasubbid. Pemerintahan pada Bappelitbang Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		16. Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Perkim & LH Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		17. Kasi. Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Perkim & LH Kab. HSU	Rp. 200.000,-
		18. Staf Bidang Litbang pada Bappelitbang Kab. HSU (2 Orang)	@Rp. 200.000,-
		19. Staf Penataan dan Penaatan PPLH pada Dinas Perkim & LH Kab. HSU (1 Orang)	Rp. 200.000,-

B. NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM	KET.
1.	Narasumber Bintel KLHS RPJMD	Rp. 500.000,-	per orang per jam
2.	Narasumber Workshop FGD KLHS RPJMD	Rp. 500.000,-	
3.	Moderator Bintel KLHS RPJMD	Rp. 300.000,-	
4.	Moderator Workshop FGD KLHS RPJMD	Rp. 300.000,-	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID HK



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45/686 /KUM/2017**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN UPAH TENAGA TEKNIS UNTUK PENGUMPUL DATA
PRIMER DAN SEKUNDER, PENGOLAH DAN ANALISIS DATA PRIMER DAN
SEKUNDER, PEMBUAT PETA KLHS RPJMD DAN PENYUSUN LAPORAN
DRAFT AWAL KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, perlu menetapkan Satuan Upah Tenaga Teknis Untuk Pengumpul Data Primer dan Sekunder, Pengolah dan Analisis Data Primer dan Sekunder, Pembuat Peta KLHS RPJMD dan Penyusun Laporan Draft Awal Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 57);

Memperhatikan : Surat Kepala Bappelitbang Kab. HSU, Nomor: 050/026/Litbang/Bappelitbang/2017, Tanggal 13 September 2017, Perihal Mohon diproses untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati HSU;

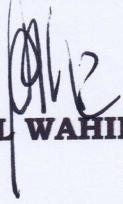
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- Satuan Upah Tenaga Teknis Untuk Pengumpul Data Primer dan Sekunder, Pengolah dan Analisis Data Primer dan Sekunder, Pembuat Peta KLHS RPJMD dan Penyusun Laporan Draft Awal Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:
- a. pengumpul data primer dan sekunder Rp. 20.000,- (per orang per jam);
 - b. pengolah data dan analisis data primer dan sekunder Rp. 25.000,- (per orang per jam);
 - c. pembuat peta KLHS RPJMD Rp. 20.000,- (per orang per jam); dan
 - d. penyusun laporan draft awal KLHS RPJMD Rp.20.000,- (per orang per jam).

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 02 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID HK



FGD I





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)**

Jl. Ahmad Yani, No.14 Telp (0527) 61093-Fax (0527) 61047, Amuntai 71414

Amuntai, 05 Oktober 2017

Nomor : 050 /25 /Litbang/Bappelitbang/2017
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Narasumber/Tenaga ahli dan
Tenaga Teknis dalam Penyusunan KLHS RPJMD
Kab. HSU Tahun 2018 - 2032

Kepada
**Yth. Ketua Pusat Penelitian Lingkungan
Hidup (PPLH) Unlam**
di -
Banjarbaru

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 – 2022, dan dalam rangka memenuhi Pasal 15 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 ini akan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD yang saat ini sedang disusun.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unlam untuk dapat memberikan bantuannya berupa Narasumber/Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis dalam penyusunan KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2018 – 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih

An. Kepala Bappelitbang
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sekretaris,
Fachrudin, S.Hut, MS
Pembina Tk.I
NIP. 19691024 199603 1 05



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kampus Unlam Simpang Empat. Jl. Jend. A. Yani Km 36. Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4777523 – 4772379; Fax : (0511) 4777523; E-mail : pplh.unlam@gmail.com

Nomor : 317 /UN8.2.1/PL/2017
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Penunjukan Narasumber KLHS RPJMD**
Kab. Hulu Sungai Utara

Kepada Yth.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang)
Kabupaten Hulu Sungai Utara

di-

Amuntai

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 050./25/Litbang/Bappelitbang/2017 tanggal 05 Oktober 2017 Perihal Permohonan Narasumber/Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022, maka kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat (PPLH-ULM) Banjarbaru menunjuk kepada nama-nama di bawah ini untuk menjadi Narasumber/Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis KLHS tersebut.

1. Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS
2. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
3. Ir. Karta Sirang, MS
4. Dr. Badaruddin, S, Hut,. MP.
5. Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom

Demikian surat persetujuan penunjukan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, 06 Oktober 2017
Kepala PPLH ULM,

Dr. Ir. H. HAMDANI, MS
NIP. 196912181987031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kampus Unlam Simpang Empat. Jl. Jend. A. Yani Km 36. Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4777523 – 4772379; Fax : (0511) 4777523; E-mail : pph.unlam@gmail.com

SURAT TUGAS

No : 318 /UN8.2.1/PL/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. Hamdani, MS
NIP : 195912181987031003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IVc
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km 36. Kampus ULM Simpang Empat Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan 70714

Dalam rangka untuk mengikuti kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018-2022 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat (PPLH-ULM) Banjarbaru menugaskan kepada nama-nama di bawah ini untuk mengikuti kegiatan tersebut. Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 17 Oktober s.d tanggal 19 Oktober 2017.

1. Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS
2. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
3. Ir. Karta Sirang, MS
4. Dr. Badaruddin, S, Hut., MP.
5. Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 06 Oktober 2017
Kepala PPLH ULM,

Dr. Ir. H. HAMDANI, MS
NIP. 195912181987031003



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 050/030/Bappelitbang/Litbang/2017
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan KLHS
RPJMD Kab. HSU 2018-2022

Amuntai, Oktober 2017

Kepada Yth.

.....
.....

di-

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 – 2022, dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/Ibu/sdr(i) diundang berhadir pada acara Bimtek dan Sosialisasi penyusunan KLHS RPJMD Kab. HSU Tahun 2018 – 2022, yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Oktober 2017
Waktu : 09.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2, Jl. Ahmad Yani No.14

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten HSU tahun 2018 – 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dibantu dan didampingi oleh Narasumber/Tanaga Ahli dan Tenaga Teknis dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Lambung Mangkurat yang terdiri atas:

1. Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS (Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Menristek RI)
2. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si (Dosen ULM)
3. Ir. Karta Sirang, MS (Dosen ULM)
4. Dr. Badaruddin, S.Hut, MP (Dosen ULM)
5. Dr. Ichsan Ridwan, S.Si, M.Kom (Dosen ULM)

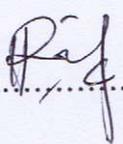
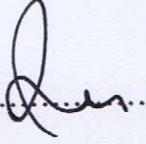
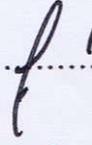
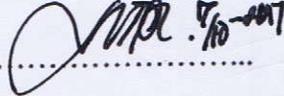
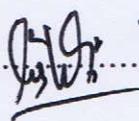
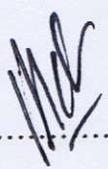
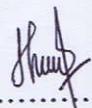
Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

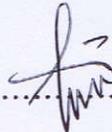
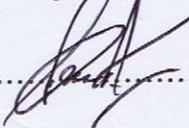
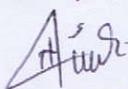
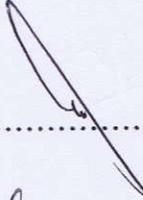
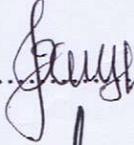
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, *A*

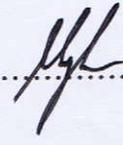
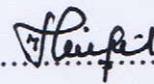
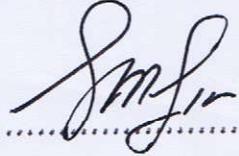
D Drs. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.Si

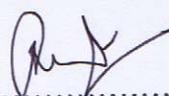
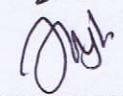
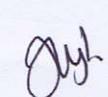
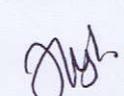
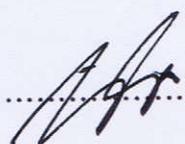
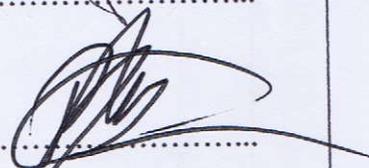
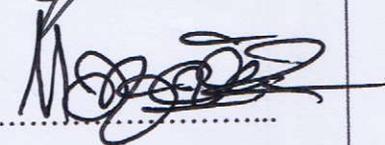
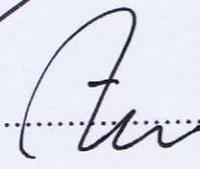
**DAFTAR TANDA TERIMA UNDANGAN
SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN KLHS RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2018-2022**

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.		Sekretaris Daerah
2.	Henry	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan Henry 17/10/2017
4.		Asisten Administrasi Umum
5.		Bagian Pemerintahan A Ripel 4/10
6.	RINA	Bagian Kesra Rj
7.	Rini	Bagian Perekonomian Dan SDA Adi
8.		Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur H
9.	M. Now	Bagian Hukum M Now
10.	Rimat Handayani	Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol RMT-H
11.		Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa H
12.		Bagian Umum 17/10/2017 Agus
13.	Herliyani	Bagian Organisasi Herliyani

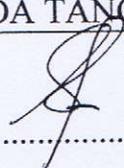
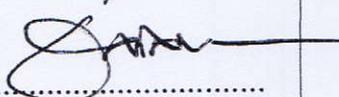
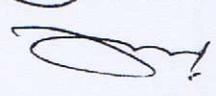
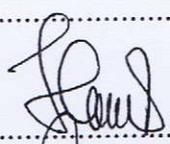
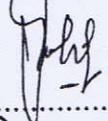
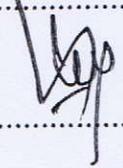
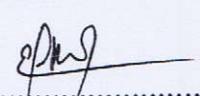
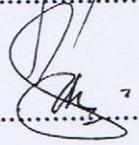
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
14.	Rusmaia	Sekretariat DPRD	
15.	Rina febrijanti	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	 17/10 2017
16.	WASATI .A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	 17/10 2017
17	Risa	KESBANGPOL	 17/10 2017
18.	Fitria . A	Dinas Penanaman Modal, Palayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	 17/10
19.	Adie	Dinas Ketahanan Pangan	 17/10-2017
20.	LISNAWATI	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	 17/10-2017
21.		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	ACC
22.	Normala	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	 17/10 16
23.	Yustian	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	 17/10 17
24	Muhammad Sawfi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	 17/10-2017
25.	OITA ROSIANI	RSUD Pambalah Batung	
26.	Haderianor	PDAM	
27.	Rahmadani	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	

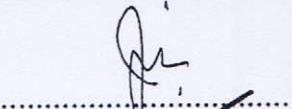
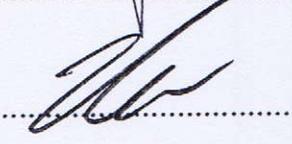
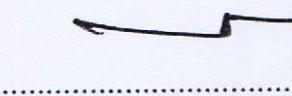
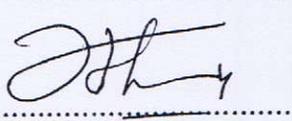
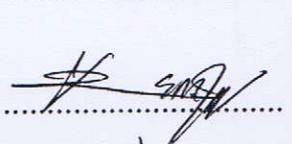
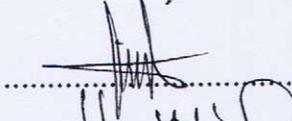
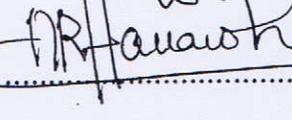
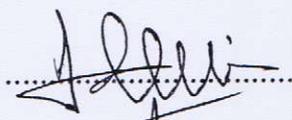
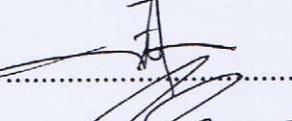
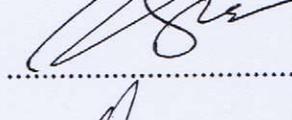
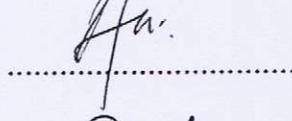
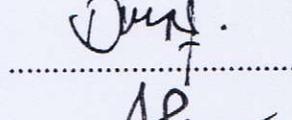
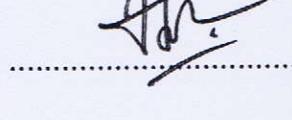
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
28.	M. Zainal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
29.	NORSANAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
30.	Fauzan.	Dinas Kesehatan	
31.		Dinas Pendidikan	
32	Erwin.S	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	
33.	Febrian	Dinas Perhubungan	
34.	MUNAJAT	Dinas Komunikasi dan Informatika	
35.	Jaitani	Dinas Perikanan	
36.	Norlena	Dinas Pertanian	
37.	ANISA	INSPEKTORAT	
38.	Ida .	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
39	Windi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
40.	siti misbah	Dinas Sosial	
41.	SYARIP	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	

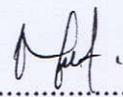
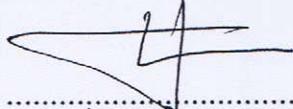
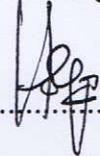
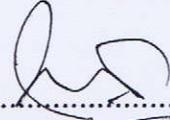
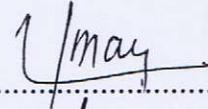
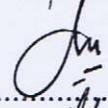
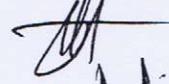
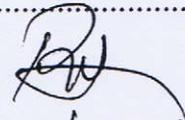
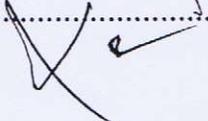
42.		Kecamatan Amuntai Tengah	ACC
43.		Kecamatan Amuntai Selatan	ACC
44.		Kecamatan Amuntai Utara	ACC
45.		Kecamatan Kecamatan Babirik	ACC
46.		Kecamatan Banjang	
47.		Kecamatan Danau Panggang	ACC
48.		Kecamatan Haur Gading	ACC
49.		Kecamatan Paminggir	ACC
50.		Kecamatan Sungai Pandan	ACC
51.		Kecamatan Sungai Tabukam	ACC
52.	Liana	Kelurahan Sungai Malang	
53.	MARRINA	Kelurahan Antasari	
54.	Yayan Perdana	Kelurahan KebunSari	
55.	Syaidillah	Kelurahan Murung Sari	

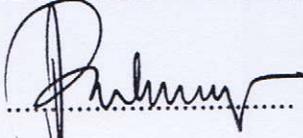
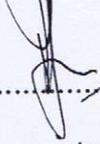
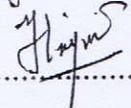
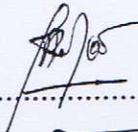
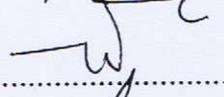
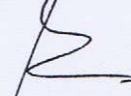
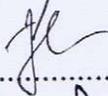
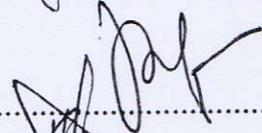
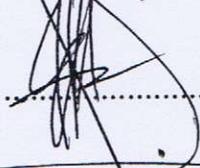
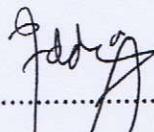
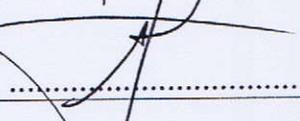
56.	KRUL tWIRATI	Kelurahan Paliwara	
57.	Syarip	Gapensi Amuntai	
58.	Mejka Adinn	Kepala Bappelitbang	
59.	Mejka Adinn	Sekretaris Bappelitbang	
60.	Mejka Adinn	Sekretariat Bappelitbang	
61.	MARBAKI	Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bappelitbang	
62.	Adhyan	Bidang Sosial Budaya Bappelitbang	
63.		Bidang Rencal Info	
64.	Berleat	STIA Amuntai	
65.	Majesi	STIPER Amuntai	
66.	Gawali	STAI RAKHA AMUNTAI	
67.	Zain Jamahudin	STIQ Amuntai	
68.			
69.			

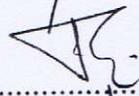
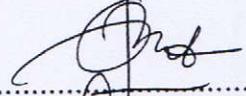
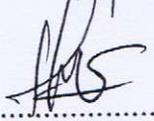
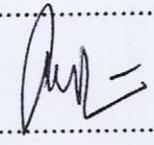
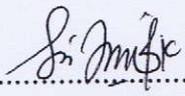
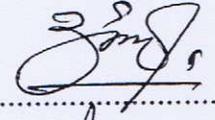
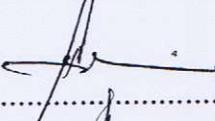
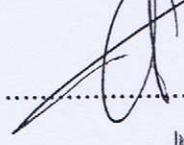
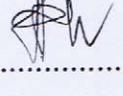
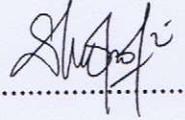
DAFTAR HADIR SOISALISASI DAN BIMTEK KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RPJMD KAB.HULU SUNGAI UTARA 2018-2022

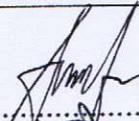
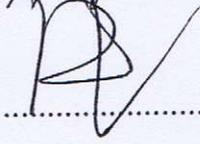
No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	M. Syarif FN	Kec. Ha Gading	
2.	M. Akhmad Firdausi	Komisi III DPRD HLU	
3.	M. Haris	Diskominfo	
4.	Hj Nurhidayah	Bag. Organisasi	
5.	Hj. Rohana	Kel. 501 Malay	
6.	Febri	Perindakopi ULU	
7.	Sofian Syahra	Bag. Hukum	
8.	Masrini	POAM	
9.	Ayafella	Bag. Pemb & P1	
10.	Taufikurrahman	Kem. Kemasyarak	
11.	Erva Normahmah	Bag. Eko-CDA	
12.	HJ. Galuh BS.	BP2RD	

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
13.	Ina Navita	Eng. Iko - SDA	
14.	Hasani Rizki	Disporapra	
15.	Yusufiani	DPMU	
16.	Hj. Inna W	DPUPRP	
17.	Norsyamsu Ramarina, S.Sos	Kantor Camat Amuntai Tengah	
18.	A. Firdaus Wajidi	Perpusda	
19.	Hj. Nurhanawati	DPRD	
20.	M. Idrus H.S.	Diperfa	
21.	MASRIADY	ESPERKIMU	
22.	Agus Rahman	Keuse, KSN	
23.	Amiq Rahman	Set. DPRD	
24.	Daryono	Bappelitng	
25.	Burhanuddin	Bappelitng	

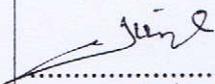
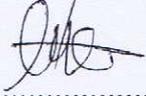
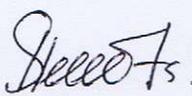
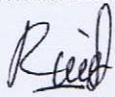
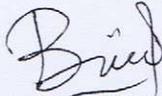
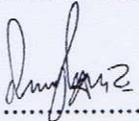
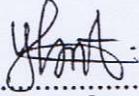
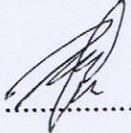
No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
40.	Nahdiatussabihin	Bappelitbang	
41.	Hikmatullah	Kec. Donau Agung	
42.	Fahrudin Noor	Bappelitbang	
43.	Daimy S.	Piscudag	
44.	H. Hasbi E.	Kel. Mrg. Sari	
45.	Ahmad Anshar	Bappelitbang	
46.	Roa Hendriani	Kesbang per	
47.	Ir. ISMAYLITA	WARIP DISKA	
48.	MATSYANAH	PILOT DISK	
49.	Ahmad Mubarak	Kec. Ansel	
50.	M. TAAT PRIYAMBUDI	Bappelitbang	
51.	M. Muslikh Han	Bappelitbang	
52.	M. Rizoni E, S	— — —	
53.	AGUS P	Dikes	

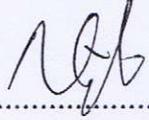
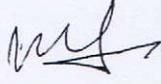
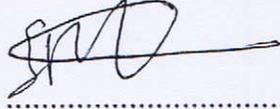
No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
26.	Fahmi Jankari	Bappelitbang	
27.	Menawarah	DPPKB	
28.	Ilin Norbaiti	Dishub	
29.	DAWAROI	DPRD HLU	
30.	Murniyati	Bappelitbang	
31.	AGUS SALIM	KEC. BANJANG	
32.	Mulianta	Disperkimlh	
33.	ANDY IRWAN	BLEPP	
34.	M. Arijoni	Bappelitbang	
35.	EKO SETIADI	DISPERKIMLH	
36.	RIZALI ERAWAN	Disperkiml	
37.	Riswan	Disperkiml	
38.	Eddy Abdillah	Diskominfo	
39.	BUDIA HARDA	Kel. ANTASMA	

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
54.	Hj. Gt Iskandarida	DPPPA	
55.	Hensoni	Dyppelitbang	
56.	NOR ULHAM	Pentawian	
57.	Rusliani	Dinas Kesehatan	
58.	Saidillah	RSCD Bimbatali Batang	
59.	H. Abdul Hamid	Lurah Ptt. Wana	
60.	RI ZAMIA TUL K		
61.	H. Nurharita	Bappelitbang	
62.	Fauzan M	BPD	
63.	Fuzman HSS	ESPKAB	
64.	Jumidi	REPICAN	
65.	Patrodi	Bappelitbang	
66.	Sofiaty	Bappelitbang	

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
67.	M. Fajid. K.	Boppelitbang	
68.	Rachmat H	Boppelitbang	
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			

DAFTAR HADIR SOISALISASI DAN BIMTEK KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RPJMD KAB.HULU SUNGAI UTARA 2018-2022

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Indahdalena	STIPER Aurd	
2.	H. Zamul A.f.	STIA Lu	
3.	Emi Arianti	FKH	
4.	Siti Sumarni	FKH	
5.	M Ridha Ansari	Malingai Hsu	
6.	Budi Saproteta	Malingai Hsu	
7.	Sugannor	Malingai Hsu	
8.	Rizal Ahmad	FKH	
9.	AL-Amin	FKH	
10.	M. Afri aji	FKH	
11.	Yulianti	FKH	
12.	Sri Lidya Wulandari	FKH	

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
13.	H. Ramlan Th	STAIRAKH	
14.	Mor'Aidah	STIA	
15.	Memeh	STIA	
16.	Muyadi	STIA	
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)

Jl. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

- Acara : Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022
- Hari / Tanggal : Rabu/18 Oktober 2017
- Waktu rapat : 09.00 Wita - selesai
- Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
- Pimpinan Acara : Wakil Bupati HSU
- Peserta Rapat : Seluruh Stakeholder di Kab. HSU, yang terdiri dari DPRD, unsur Pemerintah/semua SKPD, unsur swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan Komunitas Pecinta Lingkungan (Forum Komunitas Hijau)
- Maksud Kegiatan : Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para stakeholder di Kabupaten HSU tentang apa itu KLHS (peran, fungsi, mekanisme pelaksanaan dan proses penyusunan KLHS). Dalam kegiatan ini juga di lakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam hal penjarangan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam daftar panjang yang terbagi melalui isu lingkungan, isu sosial dan isu ekonomi.
- Susunan Acara dan Hasil : Terlampir

Amuntai, 18 Oktober 2017

Notulen

HASIL BIMTEK DAN SOSIALISASI

Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Bapak H. Husairi Abdi, Lc dan dimulai dengan sosialisasi/bimtek kepada peserta terkait pemahaman dasar tentang KLHS. Setelah itu langsung di adakan FGD penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan daftar panjang. Proses FGD ini dilaksanakan dengan membagi peserta FGD menjadi 3 kelompok, yaitu Kelompok Lingkungan, Kelompok Ekonomi dan Kelompok Sosial Budaya. Adapun hasil dari FGD tersebut adalah:

Isu Lingkungan

NO	ISU POKOK LINGKUNGAN
A	Tema Isu : Pencemaran
1	Penurunan Kualitas Air
2	Pencemaran Udara
3	Gangguan Bunyi
4	Perubahan Iklim
5	Pengelolaan Sampah
B	Tema Isu : Tata Ruang (Hutan & Lahan)
1	Alih Fungsi Lahan
2	Keanekaragaman Hayati
3	Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Tata Ruang dan Bangunan
4	Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m
5	Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai
6	Lahan Kritis/ kurangnya RTH
7	Pengelolaan Lahan Rawa
C	Tema Isu : Sumberdaya Air
1	Banjir
2	Kualitas Air Baku
3	Sedimentasi Sungai tinggi

Sumber: FGD KLHS 2017

Isu Ekonomi

No	Isu Ekonomi
A	
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Peningkatan Daya Saing Daerah
3	Peningkatan Investasi Daerah
4	Ekonomi Kreatif
5	Kemiskinan
6	Pembangunan Sarang Burung Walet
7	Pengembangan Agribisnis
8	Kewirausahaan

No	Isu Ekonomi
9	Pengembangan Kelapa Sawit
10	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
11	Pemerataan Pendapatan antara Kota dan Pinggiran
12	Infrastruktur Perekonomian
13	Penguatan Kapasitas IKM, UMKM dan Koperasi
14	Pengelolaan Perikanan (tangkap dan Budidaya)
15	Perlindungan Plasma Nutfah (Itik alabio dan kerbau rawa)

Sumber: FGD KLHS 2017

Isu Sosial

A	TEMA ISU : Sosial
1	Mengurangi Angka Pengangguran
2	Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
4	Penurunan Angka Kriminalitas
5	Peningkatan Potensi Olahraga dan Pariwisata
6	Penyalahgunaan Nafza
7	Penurunan Angka Kemiskinan
8	Peningkatan Etos Kerja
	TEMA ISU : Pendidikan
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah
2	Peningkatan Pendidikan Karakter
3	Penurunan Angka Putus Sekolah
	Tema Kesehatan
1	Penurunan jumlah Kematian Ibu
2	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
3	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
4	Peningkatan Jaminan Kesehatan

Sumber: FGD KLHS 2017



Sosialisasi dan Bimtek KLHS RPJMD

Aula Bappelitbang Kab.HSU, 18 Oktober 2017









FGD II





BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 050/053/Litbang/Bappelitbang/2017
Lamp : --
Perihal : FGD KLHS RPJMD Kab HSU
2017 - 2022

Amuntai, 14 Nopember 2017

Kepada Yth.

.....
.....

di-

Tempat

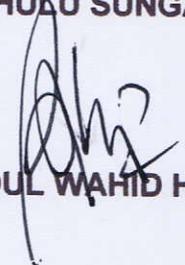
Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022, dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/Ibu/sdr(i) diundang berhadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) penyusunan KLHS RPJMD Kab. HSU Tahun 2017 – 2022, yang akan di laksanakan pada:

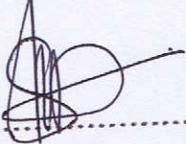
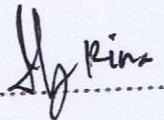
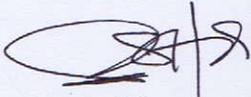
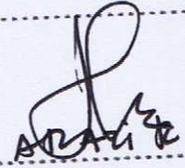
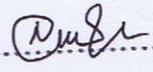
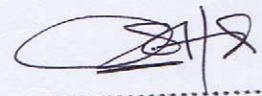
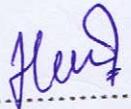
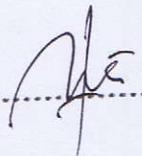
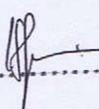
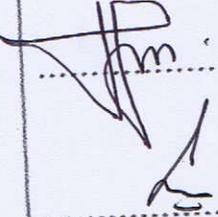
Hari/Tanggal : Selasa / 21 Nopember 2017
Waktu : 09.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2, Jl. Ahmad Yani No.14

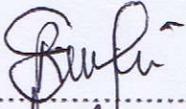
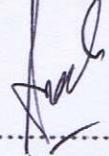
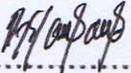
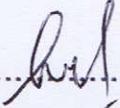
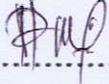
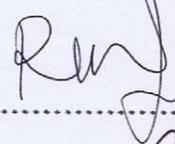
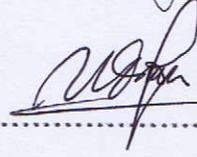
Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

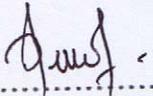
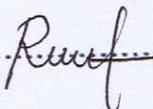
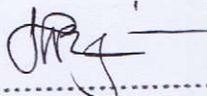
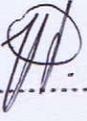
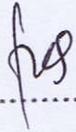
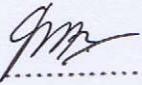
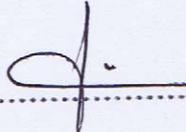
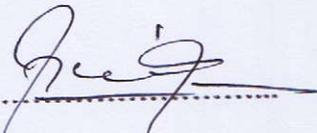
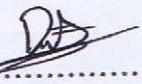
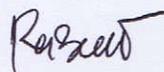
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, /

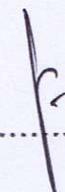
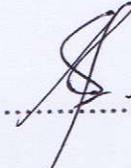
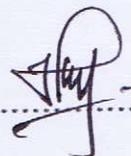
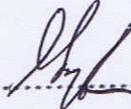
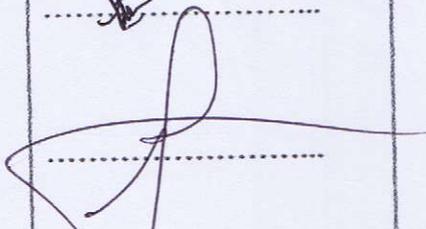
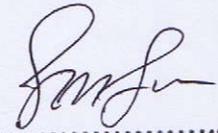
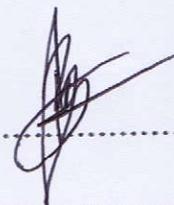

Drs. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.Si

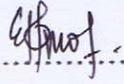
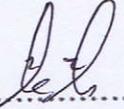
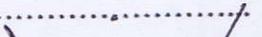
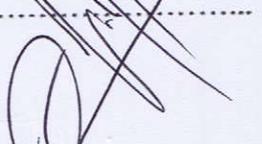
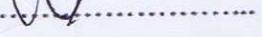
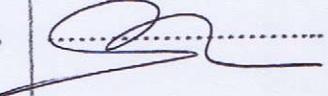
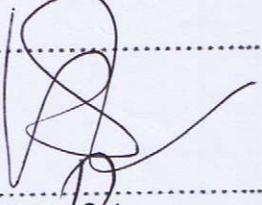
**DAFTAR TANDA TERIMA
UNDANGAN FGD KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017**

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	GERI	Bagian Pemerintahan	
2.		Bagian Kesra	
3.	Elyakun Nisa	Bagian Perekonomian Dan SDA	
4.		Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	
5.		Bagian Hukum	
6.	Norhayani	Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	
7.		Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
8.	Nida	Bagian Umum	
9.	Sarah A.	Bagian Organisasi	
10.	Hj. Herlina	Sekretariat DPRD	 16/11-2017
11.	Amira Sulma	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
12.	MUSLENA, M.	Dinas Penanaman Modal, Palayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
13.	W. Emi Rosi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
14.	AURY, R. Seta	RSUD Pambalah Batung	
15.	Berkat	PDAM	
16.	M. AHYA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
17	Mufika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
18.	Pitta	Dinas Pertanian	
19.	Rifa Vansal	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
20.	ANISA MAGANG	INSPEKTORAT	
21.	Nia	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
22.	Rahmi Hamida Usk	Dinas Perhubungan	
23.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
24	Rahma	KESBANGPOL	
25.	Syahrudin	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
26.	Hadi Hidayat	Dinas Ketahanan Pangan	
27.	Muril Hidayati	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
28.	Rusniat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
29.	Yusriani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
30.	YUSUP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
31.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
32.	Reza	Dinas Kesehatan	
33.	HUBIS	Dinas Pendidikan	
34.	MANAN	Dinas Perikanan	
35.	Zalay M.	Dinas Sosial	
36.	Hj. RUSLIDA	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
37.	Difi H	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	
38.	Rabiatul	Kecamatan Amuntai Tengah	
39.	A. TOMY MUBARAK	Kecamatan Amuntai Selatan	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
40.		Kecamatan Amuntai Utara	Acc
41.	Dony P	Kecamatan Babirik	
42.		Kecamatan Danau Panggang	Acc
43.	M. Syarif FN	Kecamatan Haur Gading	
44.		Kecamatan Sungai Tabukan	Acc
45.	H. Henggi	Kecamatan Paminggir	
46.		Kecamatan Banjang	
47.		Kecamatan Sungai Pandan	Acc
48.	Liana	Kelurahan Sungai Malang	
49.	BUDIA HENDAP	Kelurahan Antasari	
50.	Rahma	Kelurahan Kabun Sari	
51.	Syora dillah	Kelurahan Murung Sari	
52.	Astiqna. P.	Kelurahan Paliwara	
53.	Kerlat	STIA Amuntai	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
54.	Fenny Drawati	STIPER Amuntai	
55.	M. Syahid	STIQ Amuntai	
56.	M. Surya Pifai	STAI Amuntai	
57.	A. Zulmaini	Kepala Bappelitbang	
58.		Sekretaris Bappelitbang	
59.		Sekretariat Bappelitbang	
60.		Bidang Perencanaan Ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bappelitbang	
61.	Rokhmah	Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia Bappelitbang	
62.	Muhammad Riza	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Bappelitbang	
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			

DAFTAR HADIR FGD

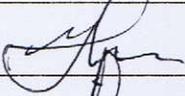
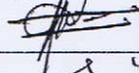
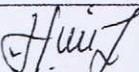
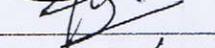
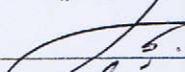
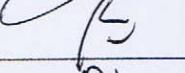
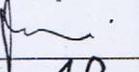
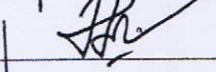
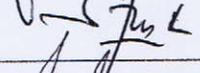
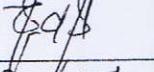
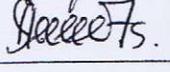
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD

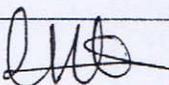
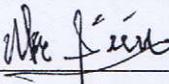
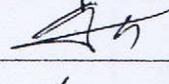
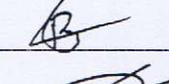
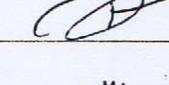
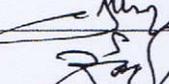
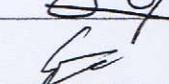
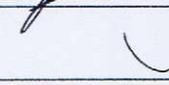
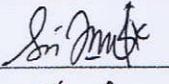
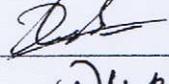
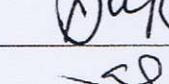
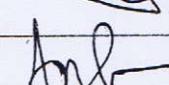
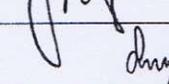
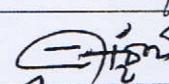
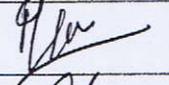
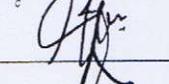
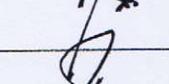
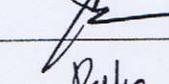
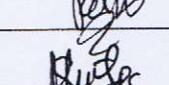
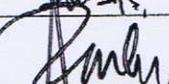
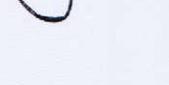
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 - 2022

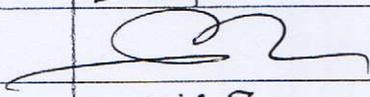
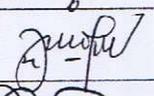
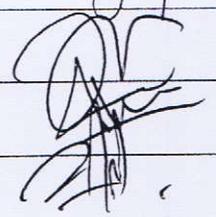
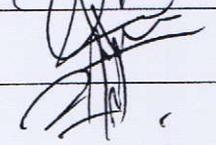
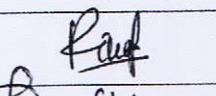
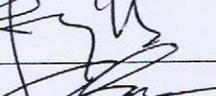
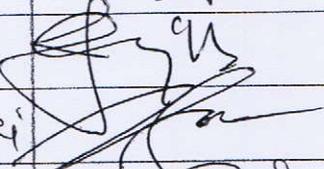
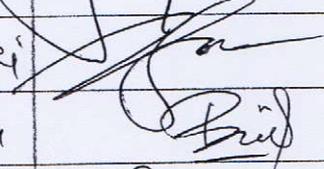
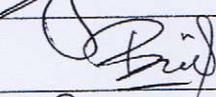
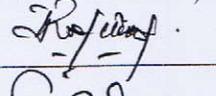
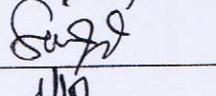
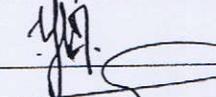
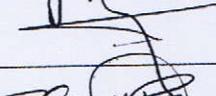
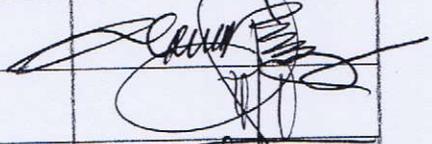
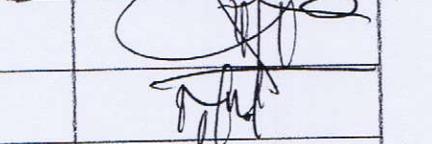
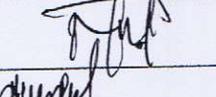
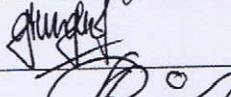
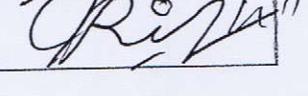
Hari/Tanggal : Selasa 21 Nopember 2017

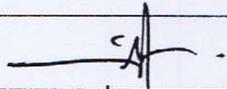
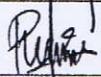
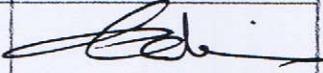
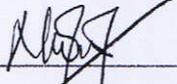
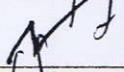
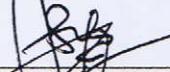
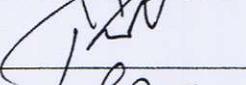
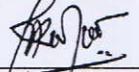
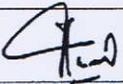
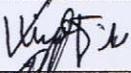
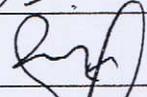
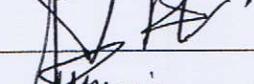
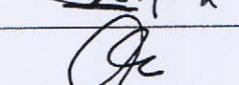
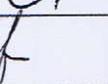
Pukul : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : Aula BAPPELITBANG Kab. HSU

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.	Dy. Irfan Kasir	UML & M	
3.	Ichsan Ridwan	UML	
4.	H. Masram	Disdik	
5.	Fachrudin	Bappelitbang	
6.	Alma Haslinda.	BPBD HLU	
7.	M. Jaini	Disdik. HLU	
8.	N.M. Jaini	Bog. Peroko. & SDA	
9.	Ummat.	Bog. Peroko	
10.	H.A. Rosyadie	Disdik. HLU & HLU	
11.	M. Fazeriansyah, S.Kom	Disdik. HLU	
12.	A. Haris	Bappelitbang HLU	
13.	Bud. L.	UML & M	
14.	Amouan	Disdik. HLU	
15.	Burhanudin	Bappelitbang	
16.	Dony F	Kec. Babupile	
17.	Dr. Fikriyul	• DKP HLU	
18.	Umar Octavian	• DKP HLU	
19.	Siti Sumarni	• FEH Parawa	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
20.	Erni Arianti	• FKH Rawa	
21.	NORLINDA	Aisiah	
22.	M. Afriaji	• FKH Rawa	
23.	Riski Aditya	• - - -	
24.	AL-Amin	• - - -	
25.	INZULAKEN	• STIPER Awt	
26.	H. Yulianta	Bappelitbang	
27.	EKO WIDATI IA	• - - -	
28.	Fahrudin Noor	Bappelitbang	
29.	SRI JAMIATUL K	• - - -	
30.	Dedie Fahsugul	Direksi Hsu	
31.	Darymo	Bappelitbang	
32.	Amos	Bappelitbang	
33.	M. Arifani	Bappelitbang	
34.	Sugianar	• Malingai Hsu	
35.	M. Iqbal Octavianor	• Malingai FKH	
36.	Pesinah	• DPPPA	
37.	Strifzh	• DPPPA	
38.	Rafsanjy	Dispersi K	
39.	Tasyah	Deck kapal	
40.	Siti Rahmah ulfah	• FKH Hsu	
41.	Siti Purnama Sri	• FKH Rawa	
42.	H. Falmi Jankari	Bappelitbang	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
43.	Masliyanti	ofKH Karawa	Masliyanti
44.	Hariyati	ofKH Karawa	Hariyati
45.	Atsyah	ofKH Karawa	Atsyah
46.	Azizah	ofKH Karawa	Azizah
47.	Indiatam M	Bappelitbang	
48.	Ilin Norbosthi	Distub	Ilin Norbosthi
49.	Hj. Wardiana	Disparapar	
50.	Jelita An	Bappeda Tabalong	
51.	Erma Rusana	PPPKB HCU	
52.	A. Zulhanich	BAPPELITBANG	
53.	Muhammad Ridha Ansari	Malingai HCU	
54.	TUOH MAHEXODENA	KAPEDA TAB	
55.	AGUS RAHMAN	LURAH KEBUNGGI	
56.	Budi Saputera	FKHI Karawa	
57.	Possiana	Bappelitbang Kab. HR	
58.	Syahrifa	Satpolpp & Damkar	
59.	Yerry Harjuna	Bappelitbang kab. US	
60.	Taufikur R.	Bappelitbang Tapan	
61.	H. Harjoni KAK	II	
62.	AM/OT/	COMMIT	
63.	Nadidussabiah	Bappelitbang	
64.	Joko NUSROHO	St. DPRD	
65.	ARIF R.D.	Bappelitbang TPA	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
66.	MASRIADY	DISPERKIM-LH	
67.	Rizal Ahmad	• FEH HSU	
68.	Muhammad Ali	• FEH HSU	
69.	Amud Chaidi	Bappelitbang	
70.	Rahmadi Permana	BRPP	
71.	Nor Nagah	Bappelitbang	
72.	Marni Su	Diputa MW	
73.	H. Habsi Elkhair.	Kel. Murug Sari	
74.	FIKRI KRAMI	Kec. SWATI MALANG	
75.	Murniyati	Bappelitbang	
76.	Yusufi	DPMB	
77.	Hairena	Bappeda Balangan	
78.	Widya Aprilia Lestari	Bappeda Balangan	
79.	EKO SETIADI	DISPERKIM LH	
80.	Mulianto	Disperkim LH	
81.	Ahmad Mubarak	Kec. Ansel	
82.	Aisa Hurdana	Kuesbang Pur	
83.	BUDIA HEWONA	Kec. ANTASAM	
84.	Fahriadi H.	Bappelitbang	
85.	BARTIF	KABID UTASANG	
86.	Abu M. Ahmad	Kasubag KPPI setda	
87.	ARIES F.	5 STAF DRUPIK	
88.	M. Fajid Kortsiki	Bappelitbang	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)

Jl. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

- Acara : Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022
- Hari / Tanggal : Selasa/ 21 Nopember 2017
- Waktu rapat : 09.00 Wita - selesai
- Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
- Pimpinan Acara : Kepala Bappelitbang Kab. HSU
- Peserta Rapat : Seluruh Stakeholder di Kab. HSU, yang terdiri dari DPRD, unsur Pemerintah/semua SKPD, unsur swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan Komunitas Pecinta Lingkungan (Forum Komunitas Hijau)
- Maksud Kegiatan : Penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan dari daftar panjang menjadi daftar pendek atau isu prioritas
- Susunan Acara dan Hasil : Terlampir

Amuntai, 21 Nopember 2017

Notulen

FGD I KLHS RPJMD

Pelaksanaan kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappelitbang, bapak H. Fajeri Ripani, S.Sos, M.Si. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari penjarangan isu-isu pembangunan berkelanjutan dari daftar panjang menjadi daftar pendek atau isu sangat prioritas yang diperoleh dari pembobotan oleh peserta FGD. Adapun hasil dari FGD tersebut adalah:

A. Isu paling strategis Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu paling strategis pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 46 tahun 2016 dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat pentingnya potensi dampak
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP
5. Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
6. Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dengan wilayah yang berdekatan dan memiliki keterkaitan/relevansi langsung.

Isu Lingkungan Paling Strategis

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Penurunan Kualitas Air
2	Pengelolaan Sampah
3	Alih fungsi lahan
4	Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Tata Ruang dan Bangunan
5	Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m
6	Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai
7	Pengelolaan Lahan Rawa
8	Banjir
9	Kualitas Air Baku
10	Sedimentasi Sungai tinggi

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017

Isu Ekonomi Paling Strategis

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Pengembangan Agribisnis
3	Infrastruktur Perekonomian

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017

Isu Sosial Paling Strategis

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Mengurangi Angka Pengangguran
2	Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3	Pengurangan Penyalahgunaan Nafza
4	Penurunan Angka Kemiskinan
5	Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah
6	Peningkatan Pendidikan Karakter
7	Penurunan Angka Putus Sekolah
8	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
9	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
10	Peningkatan Jaminan Kesehatan

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017

B. Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan tahap identifikasi isu paling strategis PB, maka selanjutnya dilakukan identifikasi dan perumusan untuk memperoleh isu prioritas pembangunan berkelanjutan. Proses pilihan isu prioritas dilakukan melalui analisis dan diskusi diantara tim pokja PL bersama tim tenaga ahli yang diperbantukan Identifikasi isu prioritas pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 46 tahun 2016 paling sedikit berkaitan dengan:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung LH untuk pembangunan (DD);
2. Perkiraan dampak dan risiko LH (Dampak LH);
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem (Jasa Ekosistem);
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam (Cakupan Wil);
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (Mutu SDA);
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Biodiversitas);
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Perubahan Iklim);
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok Masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat (Miskin Masy);
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (Kesehatan Masy); dan/atau
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat (Kaw Adat).

Isu Prioritas Lingkungan

No	Isu Prioritas
1	Penurunan Kualitas Air
2	Pengelolaan Sampah
3	Alih fungsi lahan
4	Banjir

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017

Isu Prioritas Ekonomi

No	Isu Prioritas
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Pengembangan Agribisnis
3	Infrastruktur Perekonomian

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017

Isu Prioritas Sosial

No	Isu Prioritas
1	Penyalahgunaan Nafza
2	Angka Kemiskinan
3	Pendidikan Karakter
4	Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017

C. Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (terpilih)

Setelah diketahui isu sangat prioritas, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan isu sangat prioritas pembangunan berkelanjutan (terpilih). Berdasarkan hasil FGD antara tim Pokja PL, stakeholder dan tim tenaga ahli ditetapkan bahwa untuk isu sangat prioritas yaitu:

Isu Sangat Prioritas (Terpilih)

No	Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (terpilih)
A. Lingkungan	
1	Alih fungsi lahan
2	Banjir
B. Ekonomi	
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	Pengembangan Agribisnis
C. Sosial	
1	Pendidikan Karakter
2	Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017



Focus Group Discussion (FGD) I KLHS RPJMD

Aula Bappelitbang, 21 Nopember 2017









BIMTEK
PENYUSUNAN
KLHS

BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN KLHS RPJMD

Diklat dan Pelatihan kepada Tim Penyusun KLHS RPJMD/Pokja KLHS RPJMD Kab. HSU, yang dilaksanakan mulai tanggal 23 – 26 Nopember 2017, bertempat di Fave Hotel Banjarbaru. Diklat dan Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan kepada tim penyusun KLHS RPJMD dalam hal proses penyusunan KLHS RPJMD dari awal sampai akhir.

Materi dan Jadwal Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hari/ Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
Kamis, 23 November 2017	08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
	09.00 - 09.15	Pembukaan	Panitia
	09.15 - 10.00	Tujuan, Manfaat dan Metode Bimbingan Teknis	Siti Saidah, S.Hut., M.P.
	10.00 - 10.15	<i>Istirahat</i>	Panitia
	10.15 - 11.00	KLHS Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	Prof. Dr. Ir. Gt. Muhammad Hatta, M.S.
	11.00 - 11.45		
	11.45 - 12.30	Kebijakan KLHS terhadap KRP	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	12.30 - 13.30	ISHOMA	Panitia
	13.30 - 14.15	Kebijakan KLHS terhadap KRP	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	14.15 - 15.00	Mekanisme Pelaksanaan KLHS	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
	15.00 - 15.45		
	15.45 - 16.00	<i>Istirahat</i>	Panitia
	16.00 - 16.45	Kondisi, Masalah dan Prospek Kab. HSU	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
	16.45 - 17.30		
	Jumat, 24 November 2017	08.30 - 09.15	UU dan Peraturan KLHS di Indonesia
09.15 - 10.00		Identifikasi Pemangku Kepentingan	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
10.00 - 10.15		<i>Istirahat</i>	Panitia
10.15 - 11.00		Kelebihan dan Kekurangan KLHS Penilaian Dampak dan Pemikiran Strategis	Prof. Dr. Ir. Gt. Muhammad Hatta, M.S.
11.00 - 11.45		Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.

	11.45 - 13.30	ISHOMA	Panitia	
	13.30 - 14.15	Kerja kelompok Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.	
	14.15 - 15.00			
	15.00 - 15.45	Baseline data	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.	
	15.45 - 16.00			
	16.00 - 16.45	Critical Decision Factor (CDF)	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.	
	16.45 - 17.30			
Sabtu, 25 November 2017	08.30 - 09.15	Six Thinking	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.	
	09.15 - 10.00			
	10.00 - 10.15	<i>Istirahat</i>	Panitia	
	10.15 - 11.00	Identifikasi Muatan	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.	
	11.00 - 11.45			
	11.45 - 13.30	ISHOMA	Panitia	
	13.30 - 14.15	Kajian Pengaruh	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.	
	14.15 - 15.00			
	15.00 - 15.45	Alternatif Penyempurnaan	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.	
	15.45 - 16.00			
	16.00 - 16.45	<i>Istirahat</i>	Panitia	
		16.45 - 17.30	Berpikir strategis untuk KLHS	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
	Minggu, 26 November 2017	08.30 - 09.15	Strategi komunikasi dalam integrasi KLHS	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
09.15 - 10.00				
10.00 - 10.15		<i>Istirahat</i>	Panitia	
10.15 - 11.00		Rekomendasi Penyempurnaan KRP	Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.	
11.00 - 11.45				
11.45 - 13.30		ISHOMA	Panitia	
13.30 - 14.15		Integrasi hasil KLHS kedalam KRP	Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.	
14.15 - 15.00				
15.00 - 15.45		Dokumentasi dan Pelaporan	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.	
15.45 - 16.00				
		16.00 - 16.45	Penjaminan Kualitas dan dokumentasi	Siti Saidah, S.Hut., M.P.
		16.45 - 17.30	Validasi	Siti Saidah, S.Hut., M.P.
		17.30 - 17.45	<i>Penutup</i>	Panitia



Bimbingan Teknis KLHS RPJMD Kab. HSU

Fave Hotel Banjarbaru, 23 s/d 26 Nopember 2017









FGD III-VII





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)**

Jl. Ahmad Yani, No.14 Telp (0527) 61093-Fax (0527) 61047, Amuntai 71414

Amuntai, 05 Pebruari 2018

Nomor : 050 / 01 / Litbang/Bappelitbang/2018
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Narasumber/Tenaga Ahli
_Dalam Acara FGD KLHS RPJMD
Kab. HSU Tahun 2017 - 2022

Kepada
**Yth. Ketua Pusat Penelitian Lingkungan
Hidup (PPLH) Unlam**
di -
Banjarbaru

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022, dan dalam rangka memenuhi Pasal 15 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 ini akan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD yang saat ini sedang disusun.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unlam untuk dapat memberikan bantuannya berupa Narasumber/Tenaga Ahli dalam acara Focus Group Discussion (FGD) KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022 yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 13-15 Pebruari 2018 bertempat di Aula Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih

Kepala Bappelitbang
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. Fajeri Rihani, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19620408 198503 1 009



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kampus Unlam Simpang Empat. Jl. Jend. A. Yani Km 36. Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4777523 – 4772379; Fax : (0511) 4777523; E-mail : pph.unlam@gmail.com

SURAT TUGAS

No : 034 /UN8.2.1/PL/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. Hamdani, MS
NIP : 195912181987031003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IVc
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km 36. Kampus ULM Simpang Empat Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan 70714

Dalam rangka untuk mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Pebruari 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka berkaitan dengan kegiatan tersebut Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat (PPLH-ULM) Banjarbaru menugaskan kepada nama-nama di bawah ini untuk menjadi Narasumber/Tenaga Ahli. Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 13 s.d 15 Pebruari 2018.

1. Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
2. Ir. Karta Sirang, MS
3. Dr. Badaruddin, S, Hut., MP.
4. Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 05 Pebruari 2018
Kepala PPLH ULM,

Dr. Ir. H. HAMDANI, MS
NIP. 195912181987031003



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 12, Telepon (0527) – 61014 – 63101 Kode Pos 71414 Amuntai

Nomor : 050/003 /Litbang/Bappelitbang/2018
Lamp : -
Perihal : Focus Group Discussion (FGD)
KLHS RPJMD Kab. HSU 2017-2022

Amuntai, 06 Pebruari 2018

Kepada Yth.
.....
.....

di-
Tempat

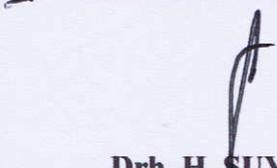
Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022, dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah WAJIB melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/Ibu/sdr(i) diundang berhadir pada acara *Focus Group Discussion (FGD)* Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. HSU Tahun 2017 – 2022, yang akan di laksanakan pada:

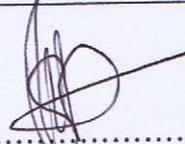
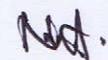
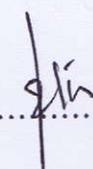
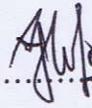
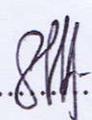
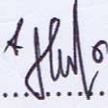
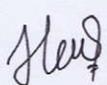
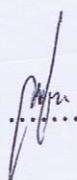
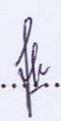
Hari/Tanggal : Selasa - Rabu / 13-14 Pebruari 2018
Waktu : 09.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2, Jl. Ahmad Yani No.14

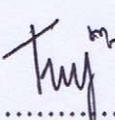
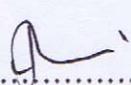
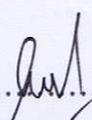
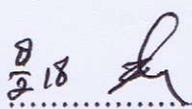
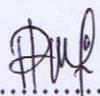
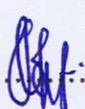
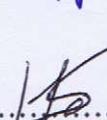
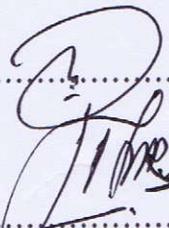
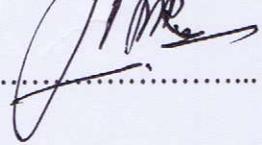
Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

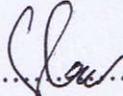
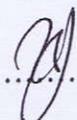
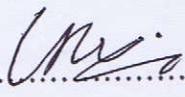
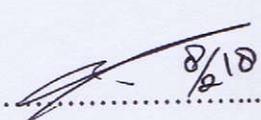
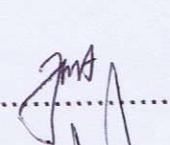
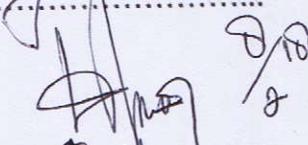
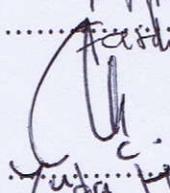
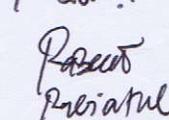
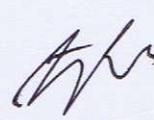
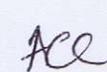
An. Bupati Hulu Sungai Utara
Plt. Sekretaris Daerah,

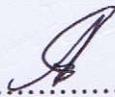
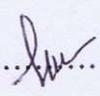
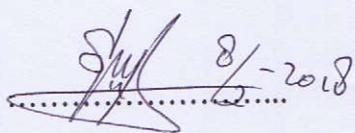
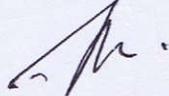
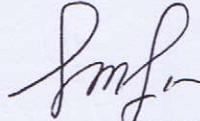
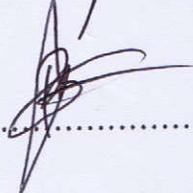
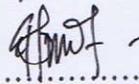

Drh. H. SUYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610521 198903 1 006

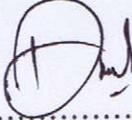
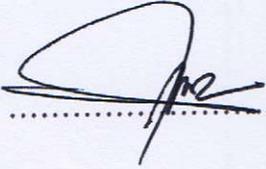
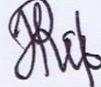
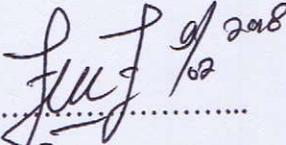
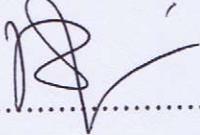
**DAFTAR TANDA TERIMA UNDANGAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
TAHUN 2018**

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	SERI	Bagian Pemerintahan	 8/2/2018
2.	Nazwa	Bagian Kesra	
3.	Lia	Bagian Perekonomian Dan SDA	 8/2/2018
4.	ABDUL HADI	Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	 8-2-2018
5.	SEPTIKA. A.	Bagian Hukum	 8-2-2018
6.	Tuseil	Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	
7.	ABDUL HADI	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	 8-2-2018
8.	Nida	Bagian Umum	 8-2-2018
9.	Astani wati Ron.	Bagian Organisasi	 8-2-2018
10.	M. RIFANI	Sekretariat DPRD	 8-2-2018
11.		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	 4/2/2018
12.	Hilda	Dinas Penanaman Modal, Palayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	 9/2/2018

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
13.	Halimah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
14.	Teti	RSUD Pambalah Batung	
15.	Rusmasri	PDAM	
16.	M. AHYA.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
17	Hj Lin	Dinas Komunikasi dan Informatika	
18.	Rina	Dinas Pertanian	
19.	Nia Kertina	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
20.	Rita Piana	INSPEKTORAT	
21.	Mahrida	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
22.	Ruspiani	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	
23.		Dinas Perhubungan	
24	HASAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
25.	Herlilemrahman	KESBANGPOL	
26.	Elfrida Sari	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
27.	Syaifulumida	Dinas Ketahanan Pangan	
28.	Samsuni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	 8/2018
29.	Diah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
30.	Mudah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
31.	Muhammad Saipi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	 8/2-2018
32.	Hendra Setiawan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	 8/18 2
33.	M. RAMADANI	Dinas Kesehatan	
34.	Ahyar	Dinas Pendidikan	 8/18
35.	Hj ROSLINA	Dinas Perikanan	 8/18
36.		Dinas Sosial	 8/18
37.		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	 8/18
38.		Kecamatan Amuntai Tengah	 8/18
39.	Alim	Kecamatan Amuntai Selatan	
40.		Kecamatan Amuntai Utara	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
41.		Kecamatan Babirik	ACC
42.		Kecamatan Danau Panggang	ACC
43.		Kecamatan Haur Gading	ACC
44.		Kecamatan Sungai Tabukan	ACC
45.	AULIA Rahman	Kecamatan Paminggir	
46.		Kecamatan Banjang	ACC
47.		Kecamatan Sungai Pandan	ACC
48.	Liana	Kelurahan Sungai Malang	 8/02 2018
49.	SAPTIAH	Kelurahan Antasari	 8/2018
50.	MARCELUS	Kelurahan Kabun Sari	
51.	Syaidillah	Kelurahan Murung Sari	
52.	Saprawati	Kelurahan Paliwara	 8/2018
53.	Berkat	STIA Amuntai	
54.	Fenny Erawati	STIPER Amuntai	

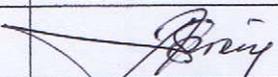
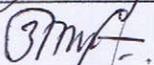
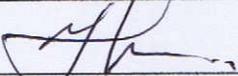
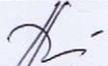
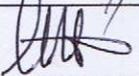
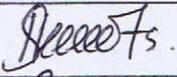
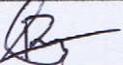
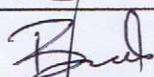
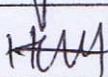
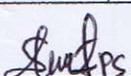
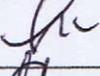
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
55.	Dony A. Ramadhan	STIQ Amuntai	
56.	Rahmani Abdi	STAI Amuntai	
57.		FKH RARAWA HSU	Acc
58.		MELINGAI HSU	Acc
59.		Kepala Bappelitbang	}
60.		Sekretaris Bappelitbang	
61.		Sekretariat Bappelitbang	Risa.S
62.	MARBAKI	Bidang Perencanaan Ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bappelitbang	 9/2018 10/12
63.	Rahmat. H.	Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia Bappelitbang	
64.		Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Bappelitbang	 7/2018
65.		LSM	Acc
66.			
67.			
68.			

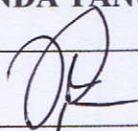
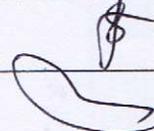
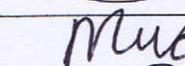
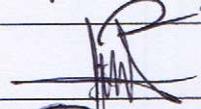
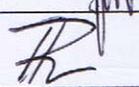
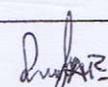
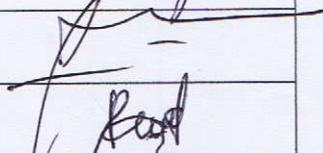
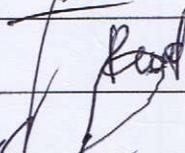
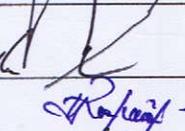
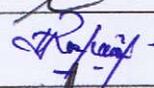
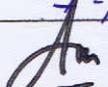
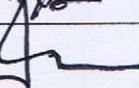
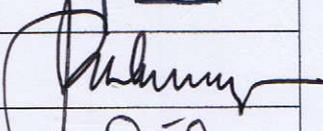
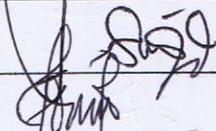
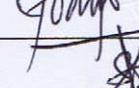
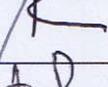
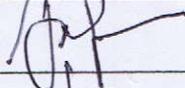
DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018

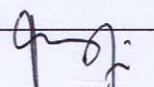
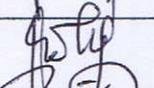
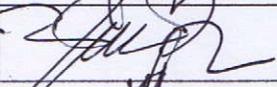
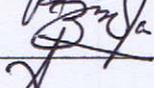
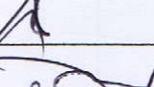
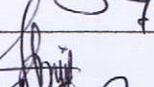
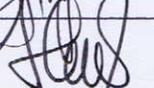
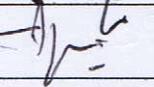
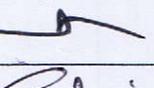
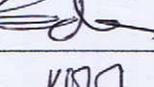
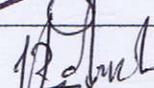
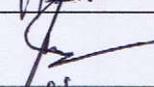
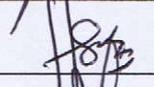
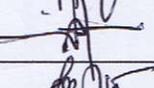
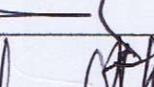
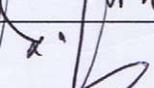
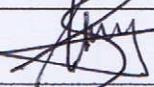
Hari/Tanggal : Selasa 13 Pebruari 2018

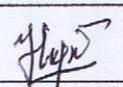
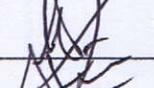
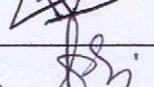
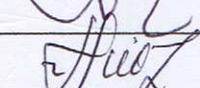
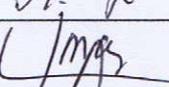
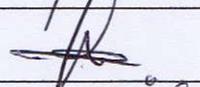
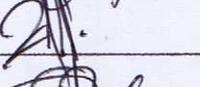
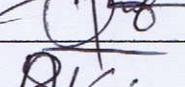
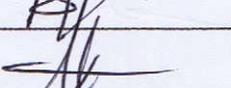
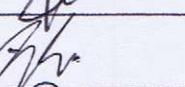
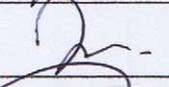
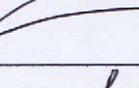
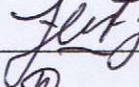
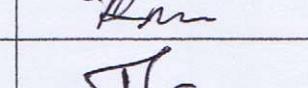
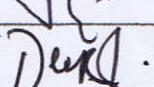
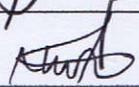
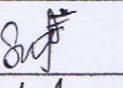
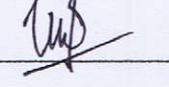
Pukul : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : Aula BAPPELITBANG Kab. HSU

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Dyandra Karir	Ulu	
2.	Kenta Sinay	Ulu	
3.	Badaruddin	Ulu	
4.	- Ichsan Ridwan	Ulu	
5.	- Hamidah	STIPER AMT	
6.	Erni Arianti	FKH/Pelingai	
7.	SITI SUMARNI	FKH	
8.	- RISKI ADITIA	FKH	
9.	- BUDI SAPUTERA	FKH	
10.	- M. Erfani	Bappelitbangda	
11.	- Hariyati	FKH	
12.	- Siti Purnama Sari	FKH	
13.	- Masliyanti	FKH	
14.	- Azizah	FKH	
15.	Surtadinata	Kominfo	
16.	Ara	Kominfo	
17.	- WADAN	Rli. Kusun	
18.	- Rizqa	FKH	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
19.	MUBDI HARBI	Kec. S. PADUREAN	
20.	SRI HERLINAENATI	Kec. PAMUNGGAH	
21.	M. Fadillah	Kec. Dn. Punggau	
22.	A. Munadi	FKH	Munadi
23.	A. Farid Wijidi	Dispersi	
24.	M. HARNOOR RAHMAN	MELINGAI HSU	
25.	Sugjanna	" "	
26.	FERDIANTO, R	DINDEK	
27.	M. Ridha Ansari	Melingai HSU	
28.	RUDI	AIR CAHAYI PARIT	
29.	Poriam	Bappalitbang	
30.	A. Mubarak	Kec. Amsel	
31.	Brachmudra	Bappalitbang	
32.	Pustau Effendi	Kabupaten	
33.	Am buni	Disdik	
34.	Fahmi Juhari	Bappalitbang	
35.	Syahrida	Satpolpp & Dekan	
36.	Ida Ruswati	set. DPRD	
37.	Surya syri	Kec. Bojig	
38.	Irwani Furwani	Kec. Bojig	
39.	Muliantop	Kec. Talor Lingsar	
40.	M. Priani	Lembaga pogram & orke/Bappalitbang	
41.	ta. Santasanti	Bappalitbang	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
42.	Raudhah Jannah	Dinsos	
43.	Hj. Rohana	DPMPSTP Nalox	
44.	Sofan Harip	Litbang HSU	
45.	EKO SETIADI	DISPERKIMLH	
46.	H. Yurlianta	Bappelitbang	
47.	A. jumi	RPPRD	
48.	M. Hanus	Kominfo	
49.	M. Muthahhari	Dispu / Meliyani	
50.	Hj. Nurhidayah	Bag organisasi	
51.	AHMAD ANSHARI	Bappelitbang	
52.	H. Yuniponi	DPMD	
53.	Rachmadi Permang	BKPP	
54.	Klor Inayat	Bappefmg	
55.	Agus Rahman	Kebudayaan Kebun Sari	
56.	Hj. Rahmawati	Kel. Sungai radang	
57.	Taufik	dukeapil	
58.	H. Hafbi Elkhairi	Kel. Muring Sari	
59.	MASRIADY	DISPERKIMLH	
60.	Muniyani	Bappelitbang	
61.	Rabiatam M	Bappelitbang	
62.	Poteriah	Bappelitbang	
63.	R. R. R. R.	Perkin Co	
64.	BARIZI	LITBANG	

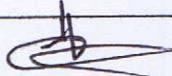
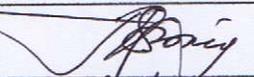
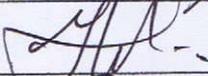
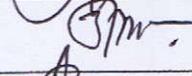
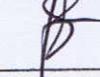
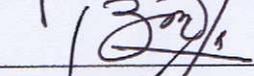
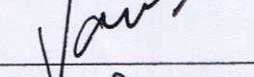
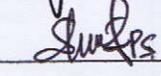
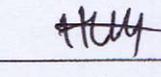
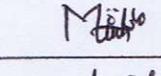
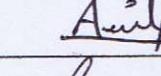
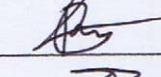
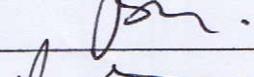
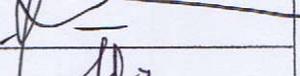
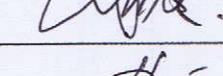
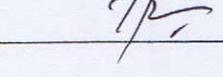
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
65.	Ilin Norbaiti	Dishub	
66.	Bug. Suhito	DPUPRP	
67.	Syafal Damay	- - -	
68.	Erma Kusana	DPPKB	
69.	Fahrudin Noor	Bappelitbang	
70.	Alma Haslinda	Bappeda.	
71.	MAYSYARAH	DISUAN	
72.	BUDI HENDRA	kel. An Masum	
73.	Hj. WARDIANA	DISORAPAR	
74.	A. Zulkarnain	Bappelitbang	
75.	NOR ILHAM	Dinas Pertanian	
76.	Pachmat H.	Bappelitbang	
77.	M. TAAT PRIYAMBUDI	- - -	
78.	Adya. Kamadhan	- - -	
79.	Jumadi. Skm.	MALINGAI.	
80.	AGUS D	PBJ	
81.	MARRAKI	Bappelitbang	
82.	Rina		
83.	Hentayan.	- - -	
84.	Danyono	Bappelitbang	
85.	MURU KHATIMAH	Bappelitbang	
86.	Sri Yanti	Bappelitbang	
87.	Tajeliani	Bappelitbang	

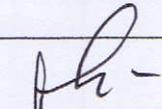
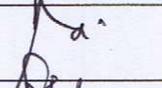
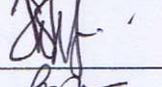
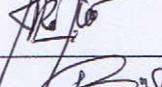
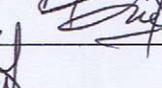
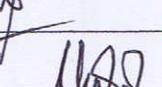
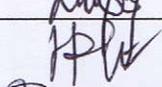
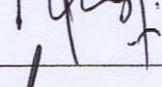
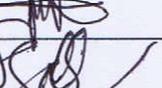
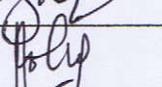
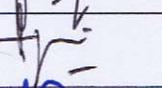
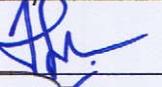
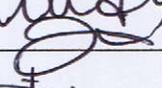
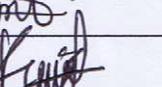
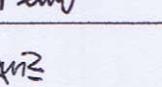
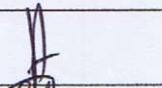
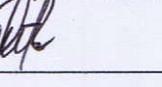
DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018

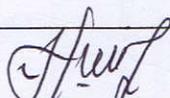
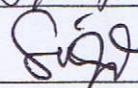
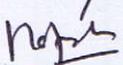
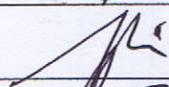
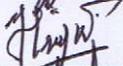
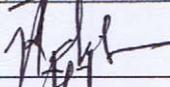
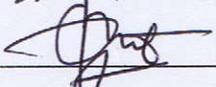
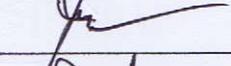
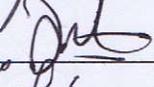
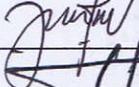
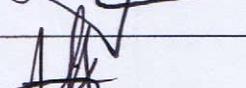
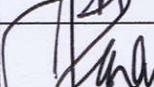
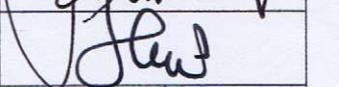
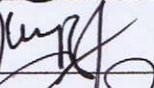
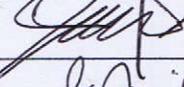
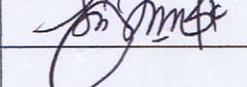
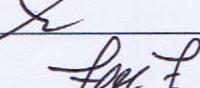
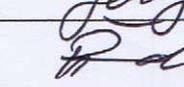
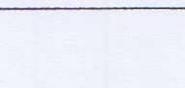
Hari/Tanggal : Rabu 14 Pebruari 2018

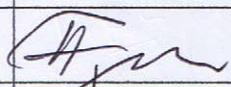
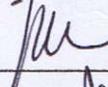
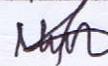
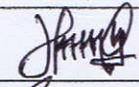
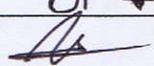
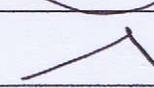
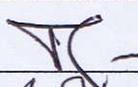
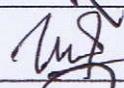
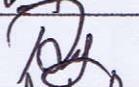
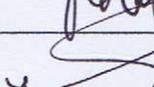
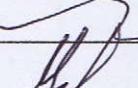
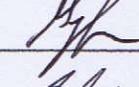
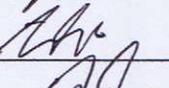
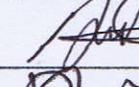
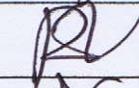
Pukul : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : Aula BAPPELITBANG Kab. HSU

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Sy. fuzi Kai	Uellam	
2.	Kartu Saip	UUM	
3.	Ichwan Ridwan	ULM	
4.	Badaruddin	ULM	
5.	Sri HERLINAWATI	Kec. PAMINGGIR	
6.	H. Yurlianta	Bappelitbang	
7.	M. Erfani	— " —	
8.	Siti Purnama Sari	FKH	
9.	Hariyati	FKH	
10.	Masliyanti	FKH	
11.	Azizah	FKH	
12.	RISKI ADITIA	FKH	
13.	M. HINDOR RAHMAN	MELINGAI HSU	
14.	Acid. L.	Lom	
15.	FERMINA TUP	DINICES	
16.	M. Muthahhari	Melingai / Dispu	
17.	M. Trisdie	DKP	
18.	Hamidah	STPER AMT	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
19.	WARUNI	Mri. Hulun	
20.	Restituty	PERKIN CA	
21.	NIA HERLINA	PRPRD.	
22.	Muniyati	Bappelitbang	
23.	Budi Saputera	FKH	
24.	Dr Ruswati	SET. DPRD	
25.	Xlor Mayah	Bappelitbang	
26.	poteriali	Bappeletbang	
27.	Pustam Effendy	Bappelitbang	
28.	Randhahl Jannah	Dis Sos	
29.	Ahmad Mubarak	KEC. Ansel	
30.	A Farid Wajidi	Dispusip	
31.	Syamsul Huda	Bappelitbang	
32.	Hj. Rohana	DPMPISD x Maleer	
33.	AHMAD ANSHARI	Bappelitbang	
34.	Burhanudin	bappelitbang	
35.	Rizaldu M	Bappelitbang	
36.	A. Munadi	FKH	
37.	Yulianti	FKH	
38.	M. Ridha Ansari	Malingai HSLU	
39.	SUGIANUDOR	" "	
40.	M. ALMUTSYARI	Bappelitbang	
41.	Rizqa	FKH	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
42.	Alma Haslinda	BPPSD HSE	
43.	Syahrifa	Satpolpp & Damkar	
44.	NOOR IPAN SYAH	Kel. Paliwara	
45.	N. RUSDIANSYAH	Kel. KARUN SARI	
46.	Lina Norbinti	Dishub	
47.	Hj. Rahmawati	Kel. Sungai Melang	
48.	Yusmodi	Diskon	
49.	Erma Rusana	DPPKB	
50.	A. Zulkarnain	Bappelitbang	
51.	NOR ILHAM	Dinas Pertanian	
52.	Taufik	Dukcapil	
53.	Juwandi, Sun.	FKA. Ranau Har	
54.	Hj. Wardiana	Dispora par	
55.	Dany Sanjano	Diperindagkop	
56.	M. TATI PRIYAMBUDI	BAPPELITBANG	
57.	Falun Faukani	Bappelitbang	
58.	Hj. Nur Rizwanita	Bag. Organem	
59.	Daryono	Bappelitbang	
60.	Sofan Hariri	Litbang HSE	
61.	SRI DAMIATUL K	Bappelitbang	
62.	Ruli	BAPRIK	
63.	NARBAKI	Bappelitbang	
64.	Pina. R	"	

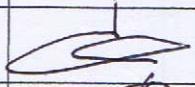
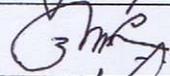
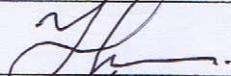
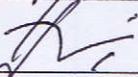
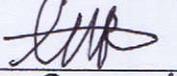
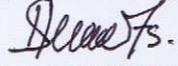
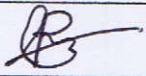
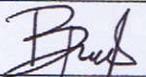
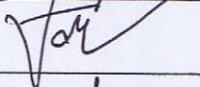
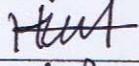
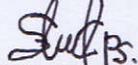
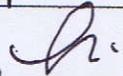
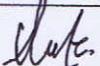
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
65.	Rohuddin Noor	Bappelitbang	
66.	Haruni	Bra	
67.	MASYARAY	DISPERKAMLH	
68.	EKO SETIADI	DISPERKAMLH	
69.	BAKRI.	CITRABANG	
70.	Sri Yanti	Bappelitbang	
71.	Nurul Khatimah	Bapelitbang	
72.	Humadi	Bapelitbang	
73.	Rahmat Berkatullah	Bapelitbang	
74.	M. Fadillah	For Canal Pa-Payog	
75.	Fachrudin	Bappelitbang	
76.	Herbonyani	—	
77.	Tajeliani	Bappelitbang	
78.	Muhammad Rizni Erwanto.	— " —	
79.	M. Mustofh Umar	"	
80.	NOR USAK	— " —	
81.	M. Syahundia	Bappelitbang	
82.	Adha. Ramadhan	— " —	
83.	A. Gunawan	— " —	
84.	Rahmat H.	Bappelitbang	
85.	M. Yamani.	"	
86.	Ikhsan Ridwan	Ulem	
87.	Erti Arianti	FKH	

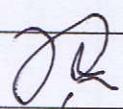
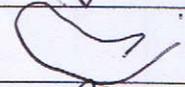
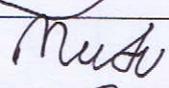
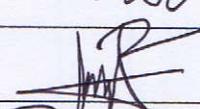
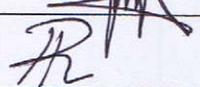
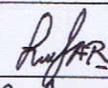
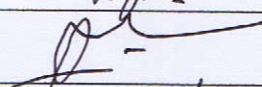
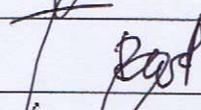
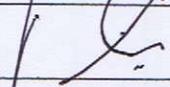
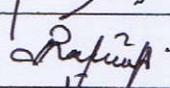
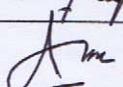
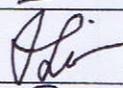
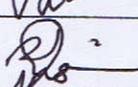
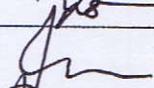
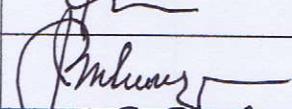
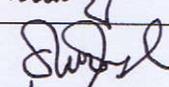
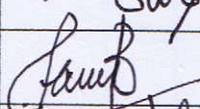
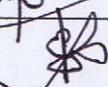
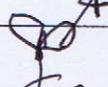
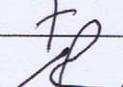
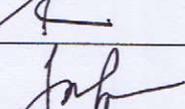
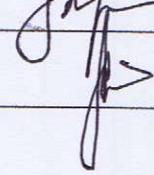
DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018

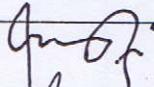
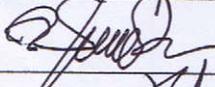
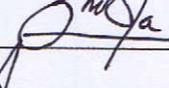
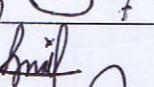
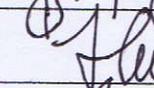
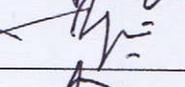
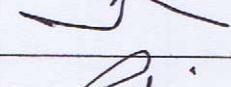
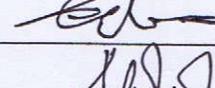
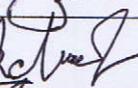
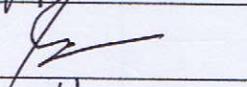
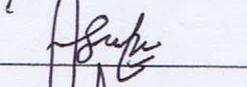
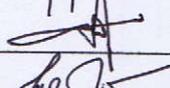
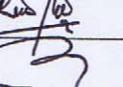
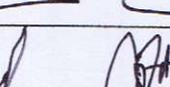
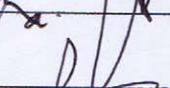
Hari/Tanggal : Kamis 15 Pebruari 2018

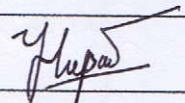
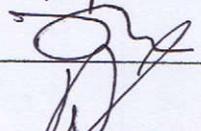
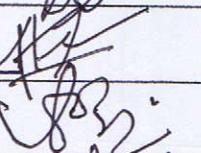
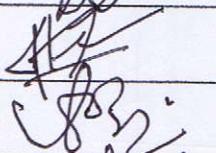
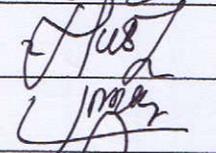
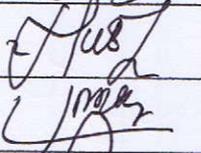
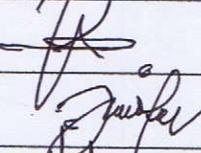
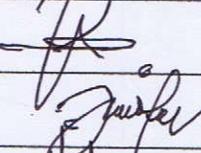
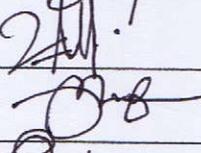
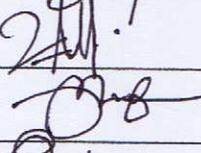
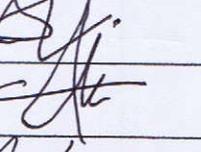
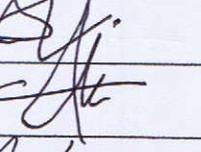
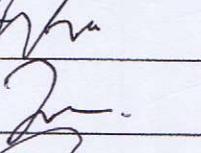
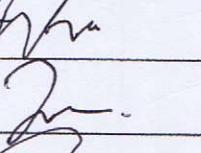
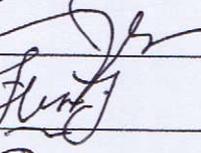
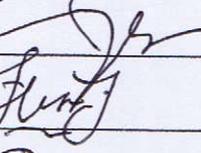
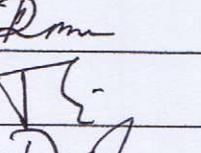
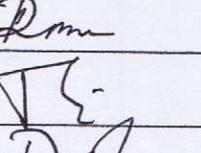
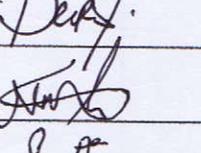
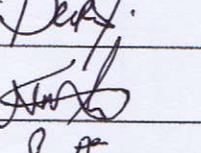
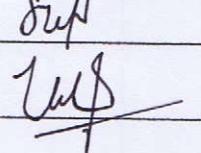
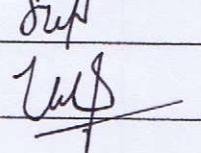
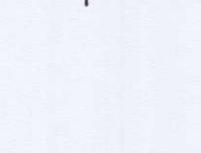
Pukul : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : Aula BAPPELITBANG Kab. HSU

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Supriah Kodir	UNLU	
2.	Karta Smitas	ULM	
3.	Baddaruddin	ULM	
4.	Letnan Ridwan	ULM	
5.	Hamidah	STIKER OMT	
6.	Erni Arianti	FKH	
7.	SITI SUMARNI	FKH	
8.	RIZKI ADITIA	FKH	
9.	BUDI SAPUTERA	FKH	
10.	M. Erfani	Bappelitbanga	
11.	Heriyati	FKH	
12.	Siti Purnama Sari	FKH	
13.	Masliyanti	FKH	
14.	Azizah	FKH	
15.	Duriadinata	Kominfo	
16.	Azra	Kominfo	
17.	WARKUM	Deli. Hutan	
18.	Pizqa	FKH	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
19.	M. Idris Hari	Kec. & DABUKAN	
20.	SRI HEKLINAWATI	Kec. TOWINGEIR	
21.	M. Fadillah	Kec. Dn. Penggang	
22.	A. Munadi	FRTT	
23.	A. Panid Ujidi	DISPENSIP	
24.	M. WAJIDOR RAHMAN	MELINGAI HSU	
25.	Sugiamor	---	
26.	FEBRI ANTONI	DANKES	
27.	M. Ridha Ansari	Melingai HSU	
28.	RUSLI	AIR CAPATI BABIRIN	
29.	Kostan	Bappelitbang	
30.	A. Mubarak	Kec. Aman	
31.	Bunhuor	Bappelitbang	
32.	Rentan Effuda	Randg SU	
33.	Ambani	Disdulu	
34.	Fadri Junari	Bappelitbang	
35.	Stahida	SatPOLPP & Perkar	
36.	Ida Kusanti	Set. DPRD	
37.	Surya Siji	Kec. Bangang	
38.	Iwan Farwano	Kec. Bangang	
39.	Muliartp	Kesil. Tata Lingkungan	
40.	M. Arifin	Janghus Seongbang	
41.	M. Syara Sait	Bappelitbang	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
42.	Raudatui Sannah	Dinsos	
43.	Hj. Rohana	DPMPPTS PMaker	
44.	Sofan Hariri	Litbang Hsu	
45.	EKO SETIADI	DISPERKINLH	
46.	H. Yurianta	Bappelitbang	
47.	A. Jarni	DPARD	
48.	M. Hardi	Kominfo	
49.	M. Muthalhari	Dispo / mulyai	
50.	Hj Nurridianti	Bany organusan	
51.	ATKAD ANSHARI	Bappelitbang	
52.	H. Yurnai	DPMD	
53.	Rakhmadi Purnama	BKPP	
54.	Nor Luyah	Bappelitbang	
55.	Abus Rahman	keawrahan kebrsari.	
56.	Hj. Rahmaluti	kel. surgai malang	
57.	Taufik	Dukepil	
58.	H. Hgsbi Elkharin	ke Murung Sari	
59.	MASRIADY	DISPERKINLH	
60.	Murniyai	Bappelitbang	
61.	Rahmatan M	Bappelitbang	
62.	Paterial	Bappelitbang	
63.	Rusiyana	Bizn Gxi	
64.	BAPBI.	LITBANG	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
65.	Iwin Norbati	Dushub	
66.	Budi Susilo	DPUPRP	
67.	GYAIFU RAHMAN	---	
68.	Erma Pelsana	DPP&B	
69.	Fahrudin Noor	Bappelitbang	
70.	Alma Haslinda	Bappeda	
71.	MAYSARAH	DISEAN	
72.	BUDIA HENDIA	kel. AUSTEM	
73.	HJ. WARDIANA	DISPORAP&R	
74.	A. Zulkarnain	Bappelitbang	
75.	NOR ILHAM	Dinas Perperon	
76.	Rahimat H.	Bappelitbang	
77.	M. TAAT PRIYAMBUDI	---	
78.	Aditya Fandani	---	
79.	Jumadi. Skus.	MALINGAI.	
80.	A G U S D	P B U	
81.	Marbaki	BAPPELITBANG	
82.	RINA	---	
83.	Herbyuni	---	
84.	Duryono	---	
85.	NURUL HATIMATI	---	
86.	Sri Yanti	---	
87.	Tajdiani	---	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)

Jl. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

- Acara : Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022
- Hari / Tanggal : Selasa-Kamis/13-15 Pebruari 2018
- Waktu rapat : 09.00 Wita - selesai
- Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
- Pimpinan Acara : Kepala Bappelitbang dan Sekretaris Kab. HSU
- Peserta Rapat : Seluruh Stakeholder di Kab. HSU, yang terdiri dari DPRD, unsur Pemerintah/semua SKPD, unsur swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan Komunitas Pecinta Lingkungan (Forum Komunitas Hijau)
- Maksud Kegiatan : kajian pengaruh sampai rekomendasi/alternatif.
- Susunan Acara dan Hasil : Terlampir

Amuntai, Pebruari 2018

Notulen

FGD II-IV KLHS RPJMD

Pelaksanaan kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappelitbang, bapak H. Fajeri Ripani, S.Sos, M.Si. FGD yang dilaksanakan selama 3 hari ini membahas kajian pengaruh sampai rekomendasi/alternatif. Pada tanggal 13-15 Pebruari 2018 dilaksanakan kajian pengaruh, dimana dari 274 program yang ada di dalam RPJMD Kab. HSU kemudian akhirnya menjadi 33 program yang dinilai berpengaruh. Sedangkan pada tanggal 15 Pebruari dilaksanakan Telaahan pengaruh dan Rekomendasi/Alternatif dari 33 program tersebut. Adapun 32 program yang berpengaruh tersebut adalah:

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya.
2. Program Penyelenggaraan BLUD
3. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)
4. Program pembangunan jalan dan jembatan
5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
7. Program pengembangan wilayah perbatasan
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman
9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10. Program Pemanfaatan Ruang
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
14. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
15. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG
16. Program Pengembangan Pasar Daerah
17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
18. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
19. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan
21. Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan
22. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
23. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
24. Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan
25. Optimalisasi Usaha Perikanan
26. Pengembangan Destinasi Pariwisata
27. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

28. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
29. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan
30. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
31. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
32. Program pengembangan Industri Kecil Menengah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	ISU PB PRIORITAS							REKAP		
		Penurunan Kualitas Air	Alih Fungsi Lahan	Banjir	Pertumbuhan Ekonomi	Agribisnis	PHBS	Pendidikan Karakter	Ya	Tidak	
1	2										
	20	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
	35	Program Penyelenggaraan BLUD	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
	36	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	7
	37	Program pembangunan jalan dan jembatan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	3	4
	39	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
	40	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	7
	41	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	5
	44	Program Perencanaan Tata Ruang	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	7
	46	Program pengembangan wilayah perbatasan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	5
	49	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	2	5
	50	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	2	5
	51	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	2	5
	52	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
	53	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	3	4
	54	Program Pemanfaatan Ruang	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
	58	Program Pengembangan Perumahan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	3	4
	94	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	7
	107	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
	110	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	7
	113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	2	5
	123	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	7
	129	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	7

27	39	46
Hasil Kajian Muatan	Perlu atau tidak kajian muatan	
1	Perlu kajian muatan	
0	Perlu kajian muatan	
1	Perlu kajian muatan	
1	Perlu kajian muatan	
0	Perlu kajian muatan	
1	Perlu kajian muatan	
2	Perlu kajian muatan	
3	Perlu kajian muatan	
3	Perlu kajian muatan	
0	Perlu kajian muatan	
0	Perlu kajian muatan	
0	Perlu kajian muatan	
1	Perlu kajian muatan	
4	Perlu kajian muatan	
3	Perlu kajian muatan	
3	Perlu kajian muatan	
1	Perlu kajian muatan	
2	Perlu kajian muatan	
2	Perlu kajian muatan	
0	Perlu kajian muatan	
1	Perlu kajian muatan	
3	Perlu kajian muatan	

		139	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	5
		141	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tidak	0	7						
		158	Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Tidak	0	7						
		159	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Tidak	0	7						
		160	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tidak	0	7						
		166	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tidak	0	7						
		183	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	5
		184	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Tidak	0	7						
		187	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
		188	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
		192	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
		193	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Tidak	0	7						
		195	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan	Tidak	0	7						
		196	Optimalisasi Usaha Perikanan	Tidak	0	7						
		197	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	5
		199	Pengembangan Kemitraan	Tidak	0	7						
		200	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2	5
		201	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tidak	0	7						
		202	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tidak	0	7						
		203	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
		205	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	3	4
		206	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Tidak	0	7						
		212	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6
		214	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	1	6

1	Perlu kajian muatan
1	Perlu kajian muatan
2	Perlu kajian muatan
4	Perlu kajian muatan
3	Perlu kajian muatan
1	Perlu kajian muatan
1	Perlu kajian muatan
2	Perlu kajian muatan
1	Perlu kajian muatan
1	Perlu kajian muatan
3	Perlu kajian muatan
1	Perlu kajian muatan
4	Perlu kajian muatan
3	Perlu kajian muatan
3	Perlu kajian muatan
2	Perlu kajian muatan
4	Perlu kajian muatan
4	Perlu kajian muatan

Keterangan:

1. Perubahan Iklim
2. Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
3. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
4. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
5. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan kehidupan sekelompok masyarakat
7. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

- : Materi Muatan KRP berpotensi menimbulkan d
- + : Materi Muatan KRP tidak berpotensi menimbu
- ? : Tidak ada ketegasan / kepastian keterkaitan
- 0 : Tidak ada kaitan/hubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Dampak dan/atau Resiko LH							Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	
1	2								
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan								
	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0	+	+	0	0	0	+	0
	2 Program Anak Usia Dini	0	0	0	0	0	0	+	0
	3 Program Pendidikan Non Formal	0	+	+	0	0	0	+	0
	4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	+	0
	5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD	0	+	+	0	0	0	+	0
	6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP	0	+	+	0	0	0	+	0
	7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	+	+	0	0	0	+	0
	8 Program Manajemen Pelayanan pendidikan	0	0	0	0	0	0	+	0
	9 Program Pembinaan pelajar/ Mahasiswa kurang mampu	0	0	0	0	0	0	+	0
	Urusan Wajib Pelayan Dasar Kesehatan								
	10 Program obat dan perbekalan kesehatan	0	0	0	?	0	0	+	0
	11 Program upaya kesehatan masyarakat	0	0	0	0	0	0	+	0
	12 Program pengawasan obat dan makanan	0	0	0	0	0	0	+	0
	13 Program pengembangan obat asli indonesia	0	0	0	0	0	0	+	0
	14 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0	+	0
	15 Program perbaikan gizi	0	0	0	0	0	0	+	0
	16 Program pengembangan lingkungan sehat	0	0	0	+	0	+	+	0
	17 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	0	0	0	0	0	0	+	0
	18 Program standarisasi pelayanan kesehatan	0	0	0	0	0	0	+	0
	19 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	0	0	0	0	0	0	+	0
	20 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	0	0	0	-	0	0	+	1
	21 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	0	0	0	0	0	0	+	0
	22 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	0	0	0	0	0	0	+	0
	23 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	0	0	0	0	0	0	+	0
	24 Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	0	0	0	0	0	0	+	0
	25 Program Peningkatan Keselematan Ibu Melahirkan dan Anak	0	0	0	0	0	0	+	0
	26 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	+	0
	27 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	0	0	0	0	0	0	+	0
	28 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	0	0	0	0	0	0	+	0
	29 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	0	0	0	0	0	0	+	0
	30 Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen kesehatan	0	0	0	0	0	0	+	0
	31 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan rujukan	0	0	0	0	0	0	+	0
	32 Pelayanan BLUD	0	0	0	0	0	0	+	0
	33 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (DAK)	0	0	0	0	0	0	+	0
	34 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	+	0
	35 Program Penyelenggaraan BLUD	0	0	0	0	0	0	+	0
		0	0	0					
1	3 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0					
		0	0	0					
	36 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	0	+	+	-	+	0	+	1
	37 Program pembangunan jalan dan jembatan	0	+	+	-	+	0	+	1
	38 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	0	0	0	+	+	0	+	0
	39 Program tanggap darurat jalan dan jembatan	0	0	0	+	+	0	+	0
	40 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	0	0	0	-	+	0	+	1
	41 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	0	-	+	-	+	0	+	2
	42 Program pembangunan turap/talud/bronjong	0	0	+	+	+	0	+	0
	43 Program pengendalian banjir	0	+	+	+	+	0	+	0
	44 Program Perencanaan Tata Ruang	0	-	-	-	+	0	+	3
	45 Program Pengendalian Tata Ruang								
	46 Program pengembangan wilayah perbatasan								
		0	-	-	-	+	0	+	3

		47	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	0	0	0	0	0	0	0	0
		48	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0	+	-	+	+	0	+	1
		49	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	0	0	0	0	+	+	+	0
		50	Program Lingkungan Sehat Perumahan	0	0	0	+	+	0	+	0
		51	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	+	+	+	+	+	0	+	0
		52	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	0	0	-	+	+	0	+	1
		53	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	-	+	+	+	4
		54	Program Pemanfaatan Ruang	0	-	-	-	+	+	+	3
		55	Program Pengamanan dan Pemanfaatan Jalan	0	0	0	+	+	0	+	0
		56	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0	+	+	0	+	0
		57	Program pengendalian Banjir	0	+	+	+	+	0	+	0
		58	Program Pengembangan Perumahan	0	-	-	-	+	0	+	3
1	4	Urusan Wajib Pelayan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
		59	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	+	+	+	+	+	+	+	0
		60	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	0	0	0	+	0	+	+	0
		61	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	Urusan Wajib Pelayan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
		62	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	0	+	0	+	+	0
		63	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	0	0	0	+	0	+	+	0
		64	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Umum	0	0	0	0	0	0	+	0
		65	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	+	+	+	+	+	+	+	0
		66	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	0	0	0	0	0	+	+	0
		67	Program Penataan Perundang-undangan	0	0	0	+	0	+	0	0
		68	Program Gerakan Nasional Revolusi Mental	0	0	0	0	0	0	0	0
		69	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	0	0	0	+	0	0	+	0
		70	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	0	0	0	0	0	0	+	0
		71	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	0	0	0	0	0	0	+	0
		72	Program pendidikan Politik Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
		73	Program Pendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
		74	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam	0	0	0	0	0	+	+	0
		75	Program Perencanaan Pembangunan Daerah rawan Bencana	0	0	0	+	+	+	+	0
		76	Program pendidikan politik masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
		77	Program Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		78	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	0	0	0	0	0	+	+	0
1	6	Urusan Wajib Pelayan Dasar Sosial									
		79	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	0	0	0	0	0	+	0	0
		80	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	0	0	0	0	0	+	+	0
		81	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lansia, orang dengan disabilitas dan orang terlantar	0	0	0	0	0	+	?	0
		82	Program Penanganan Fakir Miskin	0	0	0	0	0	+	?	0
		83	Program Pelayanan Rastra, PKH dan BPJS Kesehatan	0	0	0	0	0	+	+	0
		84	Program Pembinaan panti asuhan/ jompo	0	0	0	0	0	+	+	0
		85	Program Pembinaan anak terlantar	0	0	0	0	0	+	+	0
		86	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	+	0	0
		87	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	+	0	0
		88	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	+	0	0
		89	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0	0	0		+		+	0
		90	Program Pelayanan Raskin	0	0	0	0	0	+	0	0
		91	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0	0	0		0		+	0
		92	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		93	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0		+		+	0
		94	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	0	0	0	-	+	0	0	1
		95	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	+	+	0
2	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar										
2	1	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Tenaga Kerja									
		96	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	+	0	0
		97	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	0	0	0	0	0	+	0	0

		98	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0	0	0	0	0	+	0	0
		99	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	0	0	0	0	0	+	0	0
2	2	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
		100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0	0	0	0	0	+	+	0
		101	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	0	0	+	+	0
		102	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	0	0	0	0	0	+	0	0
		103	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	0	0	0	0	0	+	0	0
		104	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	0	0	+	+	0
		105	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0	0	0	0	0	+	+	0
		106	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	0	0	+	0	0
		107	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	0	0	-	-	+	+	+	2
		108	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	0	0	0	+	0	+	+	0
		109	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	0	0	0	0	+	+	+	0
2	3	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pangan									
		110	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	0	-	-	+	0	+	2
		111	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	0	0	0	0	0	0	0	0
		112	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0	+	0	+	0	0
2	4	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pertanahan									
		113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	0	0	+	+	+	+	+	0
		114	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	0	+	+	+	+	+	0
		115	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0	+	+	+	+	+	+	0
2	5	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Lingkungan Hidup									
		116	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0	0	0	+	0	0	0	0
		117	Program Penataan Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	0	+	0	0
		118	Program Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	0	0	0	0	0	+	0	0
		119	Program Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	+	0	0
2	6	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Administrasi kependudukan dan catatan sipil									
		120	Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan	0	0	0	0	0	+	0	0
		121	Program Pengembangan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis Tehnologi Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0
		123	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0	0	0	-	0	+	0	1
		124	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	0	0	0	0	0	+	0	0
		125	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	0	0	0	0	0	+	0	0
2	7	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
		126	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
		127	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
		128	Program pembinaan pengelolaan keuangan desa	0	0	0	0	0	0	0	0
		129	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pemanfaatan TGT	0	-	-	-	0	+	0	3
		130	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	Program Keluarga Berencana	0	0	0	0	0	+	+	0
		132	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	0	0	0	0	0	+	+	0
		133	Program Pelayanan Kontrasepsi	0	0	0	0	0	+	+	0
2	8	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
		134	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	0	0	0	0	0	0	+	0
		135	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	0	0	0	0	0	0	+	0
		136	Program Advokasi, Penyuluhan, Penggerakan dan Informasi	0	0	0	0	0	0	+	0
		137	Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Pengembangan, Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga	0	0	0	0	0	0	+	0
		138	Program Pengendalian Penduduk	0	0	0	+	0	+	+	0
		139	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0	0	0	-	+	0	+	1
		140	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	0	0	0	+	+	0	+	0

		141	Program peningkatan pelayanan angkutan	0	0	0	-	+	+	+	1
2	9		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Perhubungan								
		142	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	0	0	0	0	0	0	+	0
		143	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah	0	+	+	0	0	0	0	0
		144	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan PKB	0	0	0	+	0	+	0	0
		145	Program Peningkatan Sarana PKB	0	0	0	+	0	+	0	0
		146	Program Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		147	Program Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		148	Program Pengembangan Kemitraan dan Sarana Prasarana Lembaga Komunikasi Publik dan Media	0	0	0	0	0	0	0	0
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Komunikasi dan Informatika								
		149	Program Pengembangan e-Government	0	0	0	0	0	0	0	0
		150	Program Pengembangan Website Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		151	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	+	0	0	0	0	0
		152	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	+	0	0	0	0	0
		153	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	0	+	0	0
		154	Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	0	0	0	0	0	+	0	0
		155	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	0	0	0	0	0	+	0	0
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
		156	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	0	0	0	0	0	+	0	0
		157	Program Pengendalian Inflasi Daerah	+	0	0	0	0	+	0	0
		158	Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah	0	0	-	-	0	+	0	2
		159	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	-	-	-	0	+	0	4
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Penanaman Modal								
		160	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0	-	-	-	0	+	0	3
		161	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	0	0	0	0	0	+	0	0
		162	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	0	0	0	0	0	+	0	0
		163	Peningkatan Upa ya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	0	0	0	0	0	+	0	0
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kepemudaan dan Olahraga								
		164	Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0
		165	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0
		166	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	0	0	0	-	0	0	0	1
		167	Program pembinaan Kepemudaan	0	0	0	0	0	+	0	0
		168	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Sektoral	0	0	0	0	0	0	0	0
		169	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0
		170	Pengelolaan Kekayaan Budaya	0	0	0	0	0	0	0	0
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Statistik								
		171	Pengelolaan Keragaman Budaya	0	0	0	0	0	0	+	0
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Persandian								
		172	Program adat budaya daerah bernuansa Islami(Agamis)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kebudayaan								
		173	Program Fasilitasi urusan Keagamaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		174	program pengembangan koleksi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		175	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	#		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Perpustakaan								

		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang									
4	1	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang administrasi Pemerintahan									
		217	Program penanganan pengaduan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
		218	Program penataan peraturan perundang-undangan	+	+	+	+	0	+	0	0
		219	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	+	+	+	+	0	+	0	0
		220	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	+	+	+	0	0	0	0	0
		221	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDh/ WKDh	0	0	0	0	0	0	0	0
		222	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	+	+	+	0	0	0	0	0
		223	Program penataan daerah otonomi baru	0	0	0	0	0	0	0	0
		224	Program Penyelenggara raan/pelaksanaa TugasTugas dan Operasional Kdh dan WKDh	0	0	0	0	0	0	0	0
		225	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDh	0	0	0	0	0	0	0	0
		226	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	0	0	0	0	0	0	0	0
		227	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dan Energi	+	+	+	0	0	0	0	0
		228	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bidang Energi*	+	+	+	0	0	0	0	0
		229	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	+	+	+	+	0	+	0	0
		230	Program Peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	+	+	+	0	0	0	0	0
		231	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	0	0	0	0	0	0	0	0
		232	Program Peningkatan Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0
		233	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0
		234	Program Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
		235	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan/Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
		236	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	0	0	0	+	0	+	0	0
		237	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	+	+	+	0	0	0	0	0
		238	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	+	+	+	0	0	0	0	0
		239	Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	+	+	+	0	0	0	0	0
4	2	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Pengawasan									
		240	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	+	+	+	0	0	0	0	0
		241	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	+	+	+	0	0	0	0	0
		242	Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli)	0	0	0	0	0	0	0	0
		243	Program Peningkatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0	0	0	0	0	0	0	0
		244	Program Penelitian dan Pengembangan	+	+	+	0	0	0	0	0
		245	Program Perencanaan Litbang Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan									
		246	Program Perencanaan Litbang	+	+	+	0	0	0	0	0
		247	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		248	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		249	Program Pengembangan data /informasi	0	0	0	0	0	0	0	0
		250	Program Pengembangan data /informasi/Statistik Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		251	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	+	0	0
		252	Program Perencanaan Pengembangan bidang kota-kota menengah dan besar	0	0	0	0	0	+	0	0
		253	Program Perencanaan Pengembangan bidang kota-kota kecil, menengah dan besar	0	0	0	0	0	+	0	0
		254	Program Perencanaan Infrastruktur Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		255	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0
		256	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	0	0	0	0	0	0	0	0
		257	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		258	Program pengembangan data/informasi	0	0	0	0	0	0	0	0
		259	Program kerjasama pembangunan	+	+	+	0	0	0	0	0
		260	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	+	+	+	0	0	0	0	0
		261	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0
		262	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		263	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan									
		264	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

		265	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
		266	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0
		267	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0
		268	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0
		269	Program Peningkatan Kualitas Penerimaan ASN	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0					
4	5	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kepegawaian									
		270	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
		271	Program Pindah / Purna Tugas	0	0	0	0	0	0	0	0
		272	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	+	0	+	0	0
		273	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	0	0	0	0	0	+	0	0
		274	Program Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kondisi Lingkungan Hidup					
		DDDT	Dampak resiko LH	Jasa ekosistem	Efisiensi pemanfaatan SDA	Perubahan iklim	Kehati
1	2						
20	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
35	Program Penyelenggaraan BLUD	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
36	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
37	Program pembangunan jalan dan jembatan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
39	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
40	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
41	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
46	Program pengembangan wilayah perbatasan	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
49	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
50	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
51	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
52	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
53	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
54	Program Pemanfaatan Ruang	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
58	Program Pengembangan Perumahan	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
94	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
107	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
110	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
123	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
129	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
139	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Menaikkan	Tidak Beresiko	Menaikkan	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
158	Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
166	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
183	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
184	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
187	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
188	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
192	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
193	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak berpengaruh
195	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
196	Optimalisasi Usaha Perikanan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak berpengaruh
197	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
200	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
201	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
203	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
205	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Berpengaruh	Ada	Dapat berpengaruh
206	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Menaikkan	Beresiko	Menaikkan	Dapat Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
212	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh
214	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Menurunkan	Beresiko	Menurunkan	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Dapat berpengaruh

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Deskripsi / Telaah pengaruh	Alternatif
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan				
	20	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Telaahan pengaruh terhadap Program ini lebih dikarenakan belum keluarnya perizinan untuk operasional 2 incenerator yang ada di puskesmas Sungai Pandan dan Banjarang	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya: Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	35	Program Penyelenggaraan BLUD	Telaahan pengaruh terhadap Program ini lebih dikarenakan belum keluarnya perizinan untuk operasional 1 incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung	Program Penyelenggaraan BLUD: Penyelesaian Perizinan Operasional 1 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	36	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan : 1) akan menimbulkan pencemaran air; 2) akan menimbulkan limbah padat pada saat konstruksi, 3) menimbulkan limbah B3 4) tertutupnya saluran air/drainase terhambat; 4) meningkatnya perubahan penggunaan lahan, 5) serta menurunnya sistem tata air; sehingga akan mengganggu efisiensi pemanfaatan SDA dankehati	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan :1.Melakukan penyiraman saat kegiatan 2) membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuatanakhir sampah 3. Membuang limbah b3 ke tempat yang sesuai 4. pembuatan gorong-gorong atau box culvaert dan saluran drainase yang sesuai dengan kondisi lapangan; 4. Pengetatan penggunaan lahan ; 5. meningkatkan pengawasan/pengendalian bangunan.
	37	Program pembangunan jalan dan jembatan		
	40	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Akan menaikkan pirit, 2. carbon-carbon saat bungkarakan gambut akan menimbulkan gas rumah kaca 3. perubahan penggunaan lahan 4. akan berkurangnya spesies tertentu	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya diharapkan: Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum, desain irigasi memperhitungkan kontur tanah setempat.
	41	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan wilayah perbatasan akan menimbulkan 1. Perubahan penggunaan lahan 2. mempengaruhi tata air 3. mempengaruhi ekosistem	Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan: 1. Pembangunan dengan sistem panggung dan 2. pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
	46	Program pengembangan wilayah perbatasan	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman menimbulkan: 1. kurangnya Ketersediaan tempat untuk pembangunan sanitasi (sampah, limbah, dan drainase)	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman diharapkan: Masyarakat menyediakan lokasi untuk menyediakan sapras untuk sanitasi di pemukiman
	49	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku akan menimbulkan: 1. Limbah hasil olahan yang di buang ke badan sungai akan menurunkan kualitas air 2. ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan pengolahan air baku 3. menghasilkan limbah B3	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan: 1. membuat kajian air limbah 2. ketersediaan lahan untuk penyediaan Sarana pengelolaan dan pengolahan air baku dan limbah
	52	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Pemanfaatan Ruang akan menimbulkan: 1. alih fungsi lahan 2. perubahan ekosistem	Program Pemanfaatan Ruang diharapkan 1. pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya
	54	Program Pemanfaatan Ruang	Program Pengembangan Perumahan akan menimbulkan 1)dengan bertambahnya perumahan akan meningkatkan pencemaran, 2) akan meningkatnya volume limbah padat dan cair, 3) pengurangan lahan didaerah rawa akan mengurangi daerah resapan air dan 4) perubahan alih fungsi lahan 5) Perubahan ekosistem	Program Pengembangan Perumahan perlu pembuatan IPAL/ septiktank, RTH, Drainase, subdrainase (Drainase bawah tanah),TPS, sumur resapan, hidrand dan pengetatan perizinan perumahan pada areal tertentu, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Dan menyediakan alokasi lahan untuk PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)
	58	Program Pengembangan Perumahan		
1 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial				
	94	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Telaahan Pengaruh terhadap program ini lebih dikarenakan 2 faktor yaitu: budaya masyarakat yang kebanyakan memakamkan anggota keluarganya di lingkungan tempat tinggal dan faktor yang ke dua adalah pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Program Pengelolaan Areal Pemakaman: Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan). Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk melindunginya. selain itu juga perlujuga dibuatkan regulasi regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda)
2 2 Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	107	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) berdampak terhadap lingkungan disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia/anorganik	Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas pertanian padi organik
2 6 Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Administrasi kependudukan dan catatan sipil				
	123	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Telaahan pengaruh program ini adalah pengaruh kegiatan perkebunan sawit di kabupaten HSS yang menyebabkan terbatasnya sumber daya air di wilayah kecamatan paminggir	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan: Perlu upaya pengembalian tata air di kawasan paminggir
	129	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG	Telaahan pengaruh program ini adalah pengaruh kegiatan perkebunan sawit di kabupaten HSS yang menyebabkan keringnya wilayah kecamatan paminggir	Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG: Perlu upaya pengembalian tata air di kawasan paminggir
2 11 Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	158	Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah (diganti menjadi: "Program Pengembangan Pasar Daerah")	Program pengembangan pasar daerah memberikan resiko dampak terhadap lingkungan hidup terkait dengan pemanfaatan lahan untuk pembangunan pasar, serta terkait dengan pengelolaan persampahan, limbah cair	Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan pola ruang di tata ruang daerah, harus dibangun TPS di setiap pasar, ada penampungan/pengelolaan limbah cair
2 13 Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kepemudaan dan Olahraga				

		166	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga ini berpotensi merubah kawasan pertanian yang ada menjadi kawasan sport centre, selain itu juga kawasan sport centre ini masih kekurangan penghijauan (taman)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga: perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan sport centre sebenarnya tidak bermasalah, karena kawasan pertanian yang ada di sekitar kawasan tersebut adalah kawasan pertanian yang bisa di alih fungsi. Perlu nya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre, sehingga pembangunan venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau.
2	18	Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kearsipan			
		183	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan berdampak terhadap penurunan kualitas tanah dan air disebabkan penggunaan pakan, pembuatan kolam di lahan rawa	Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pembuatan kolam harus sesuai dengan peruntukkan lahan di tata ruang
		184	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Budidaya Perikanan berdampak terhadap ekosistem perairan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan contoh penggunaan tuba, setrum,	Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, renge, langit, lunta dll
3	Urusan Pilihan				
3	1	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan			
		187	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan dapat menimbulkan: 1. penurunan kualitas air dari sisa makanan ikan di tambak dan keramba, 2. penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 3. penggunaan bahan pengawet yang berbahaya 4. menghasilkan limbah cair dan padat 5. perubahan fungsi lahan pertanian menjadi usaha perikanan. 6. pengkapan overfishing	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan diharapkan: 1. Pemberian pakan yang sesuai dengan daya tampung ikan 2. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan 3. penggunaan bahan pengawet alami 4. Perlu penampungan limbah cair dan padat 5. pembuatan tambak yang sesuai dengan peruntukannya 6. penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi
		188	Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan		
		192	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya		
		193	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap		
		195	Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan		
		196	Optimalisasi Usaha Perikanan		
		197	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata menimbulkan: 1. perubahan fungsi lahan 2. Limbah padat dan cair dari pengunjung atau bangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata 3. penyediaan Sarana dan prasarana penunjang pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan: Sesuai dengan peruntukannya 2. Penyediaan tempat-tempat penampungan sampah dan ipal 3. memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat
3	2	Urusan Pilihan Pariwisata			
		200	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan berdampak terhadap lingkungan disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia/anorganik	Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas pertanian padi organik
		201	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tidak berpengaruh terhadap lingkungan	
3	3	Urusan Pilihan Pertanian			
		203	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan berdampak dengan lingkungan khususnya yang berdekatan dengan lokasi permukiman	Perlu penerapan GPF (Good Practice Farming) yaitu beternak secara baik
		205	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura berdampak terhadap penurunan kualitas air dan tanah serta Pembukaan lahan untuk perkebunan secara luas dapat berakibat terhadap perubahan iklim dan biodiversity	Kajian AMDAL
		206	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian berdampak disebabkan penggunaan alat/mesin bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil yang bisa mencemari tanah pertanian	Perawatan alat/mesin secara berkala
3	4	Urusan Pilihan Perdagangan			
		212	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Program pengembangan Industri Kecil Menengah dapat menyebabkan turunnya kualitas air dan tanah yang disebabkan oleh industri rumah tangga contoh penggunaan pewarna pada kerajinan anyaman purun dan eceng gondok	Penggunaan pewarna alami
3	5	Urusan Pilihan Perindustrian			
		214	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial		

REKOMENDASI LINGKUNGAN

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan: a). Melakukan penyiraman jalan saat kegiatan b)) membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuangan akhir sampah c). Membuang limbah b3 ke tempat yang sesuai d). pembuatan gorong-gorong atau box culvert yang sesuai dengan kondisi lapangan dan saluran drainase sepanjang jalan; e). Pengetatan penggunaan lahan ; f). meningkatkan pengawasan/pengendalian bangunan. g) Penghijauan kiri kanan jalan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya diharapkan: a). Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum, b). pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.
3. Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan: a). Pembangunan dengan sistem panggung dan b). pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
4. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman diharapkan: Masyarakat berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapsras untuk sanitasi yang dihibahkan kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-10 kepala keluarga.
5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan: a). membuat fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah sludge b). ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana pengelolaan dan pengolahan air baku
6. Program Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang dan DDDT
7. Program Pengembangan Perumahan perlu a). pembuatan IPAL/ septiktank kedap air, RTH, Drainase, TPS, sumur resapan, hidrand, b). pengetatan perizinan lingkungan perumahan c). mengalokasikan lahan untuk PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan diharapkan: a). Konversi pakan yang sesuai tumbuh kembang ikan b). penggunaan bahan pengawet alami c). Perlu penampungan limbah cair dan padat d). pembuatan kolam ikan yang sesuai dengan daya dukung lahannya dan e). penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi
9. Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan: a). Pemanfaatan kawasan wisata Sesuai dengan peruntukannya b). Pengelolaan sampah c). memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat dan d) pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata

Rekomendasi Bidang Ekonomi

1. Program Pengembangan Pasar Daerah, pemanfaatan lahan harus sesuai dengan Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar, ada pengelolaan limbah.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan harus menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pembuatan kolam ikan harus sesuai dengan peruntukkan lahan dan tata kelola air.
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, harus memperhatikan Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge, lalangit, lunta dll (***digabung dengan Rekomendasi dari Pokja Lingkungan***)
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, harus memperhatikan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis serta dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan peningkatan luas pertanian padi organik.
5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan perlu penerapan GPF (Good Practice Farming) yaitu Cara beternak dengan baik.
6. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang akan diusahakan.
7. Program pengembangan Industri Kecil Menengah, perlu penggunaan pengawet, penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses pembuatan produk dan pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan.

Rekomendasi Kelompok Sosial Budaya

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya → Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator yang ada di Kecamatan Sungai Pandan dan Banjang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program Penyelenggaraan BLUD → Penyelesaian Perizinan Operasional 1 Incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman → Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan). Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk melindunginya. Selain itu juga perlu dibuatkan regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda).
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan → Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu.
5. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG → Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga → perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan sport centre sebenarnya tidak bermasalah, karena kawasan pertanian yang ada di sekitar kawasan tersebut adalah kawasan pertanian yang bisa di alih fungsi. Perlunya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre yang seluas ± 7 ha, sehingga pembangunan venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.



FGD KLHS

Aula Bappelitbang Kab.HSU, 13-15 Pebruari 2018















KONSULTASI

PUBLIK





BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 000/005/Litbang/Bappelitbang/2018
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : Konsultasi Publik KLHS RPJMD
Kab. HSU 2017-2022

Amuntai, 28 Pebruari 2018

Kepada Yth.
Daftar Undangan Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022, dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah WAJIB melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/Ibu/sdr(i) diundang berhadir pada acara Konsultasi Publik penyusunan KLHS RPJMD Kab. HSU Tahun 2017 – 2022, yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 06 Maret 2018
Waktu : 09.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



H. HUSAIRI ABDI, Lc

**DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
KLHS RPJMD KAB. HSU TAHUN 2017-2022**

1. Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara
2. Ketua Komisi I DPRD Kab. HSU
3. Ketua Komisi II DPRD Kab. HSU
4. Ketua Komisi III DPRD Kab. HSU
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Kepala Inspektur Kab. HSU
8. Kepala Bappelitbang Kab. HSU
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
13. Kepala Dinas Pendidikan
14. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
15. Kepala Dinas Kesehatan
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
21. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
22. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
25. Kepala Dinas Perhubungan
26. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
28. Kepala Dinas Pertanian
29. Kepala Dinas Perikanan
30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31. Kepala Dinas Sosial
32. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. HSU
33. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
34. RSUD Pembalah Batung
35. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
36. Kepala Bagian Pembangunan
37. Camat Babirik
38. Camat Amuntai Tengah
39. Camat Amuntai Utara
40. Camat Amuntai Selatan
41. Camat Sungai Pandan
42. Camat Sungai Tabukan
43. Camat Danau Panggang
44. Camat Paminggir
45. Camat Banjarang
46. Camat Haur Gading
47. Ketua STIQ Rasidiyah Khalidiyah Amuntai
48. Ketua STAI Rasidiyah Khalidiyah Amuntai

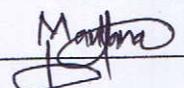
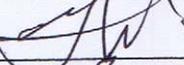
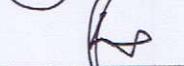
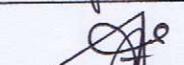
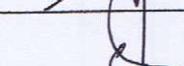
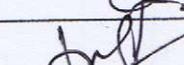
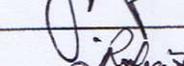
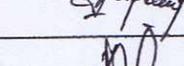
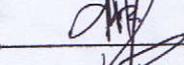
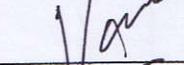
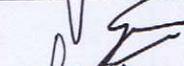
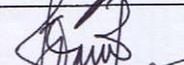
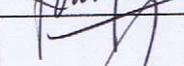
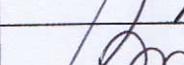
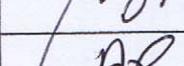
49. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
50. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai
51. Ketua Gapensi Kab. HSU
52. Drs. H. Alfian Noor d/a Kebun Sari Amuntai
53. Drs. H. Syukeri Usman d/a Kebun Sari
54. Yayasan Dinamika Indonesia Swadaya (YDIS)
55. Ketua Pemuda Pancasila Kab. HSU
56. Ketua IWAPI Kab. HSU
57. LSM Seima Jaya Amuntai d/a Jl. Negara Dipa No 581 Kel. Sungai Malang Amuntai
58. Forum Komunitas Hijau (FKH) Rarawa Kab. HSU
59. Forum Masyarakat Peduli Sungai (Melingai) Kab. HSU
60. Tim Penyusunan KLHS RPJMD 2017-2022

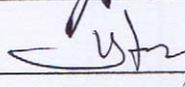
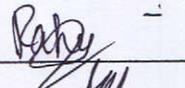
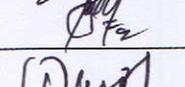
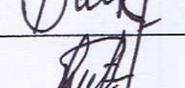
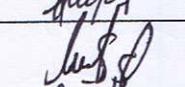
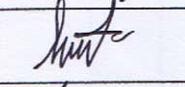
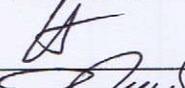
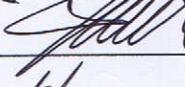
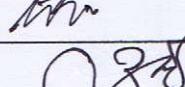
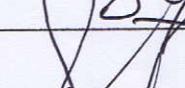
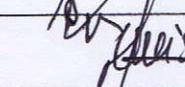
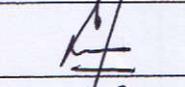
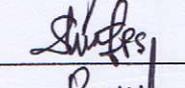
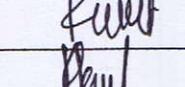
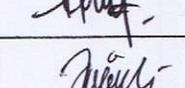
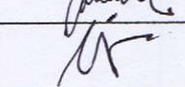
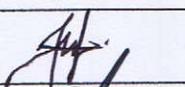
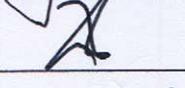
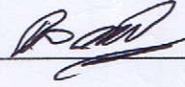
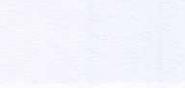
DAFTAR HADIR KONSULTASI PUBLIK
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018

Hari/Tanggal : Selasa 06 Maret 2018

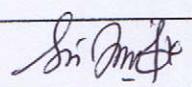
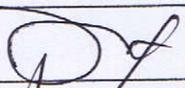
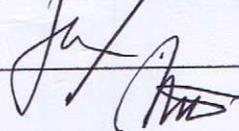
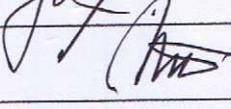
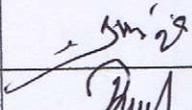
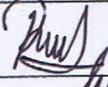
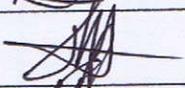
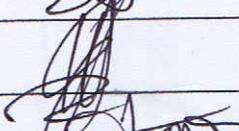
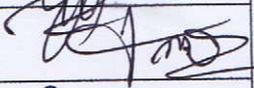
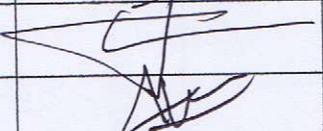
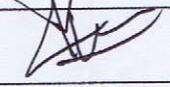
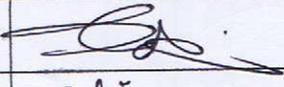
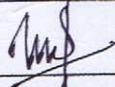
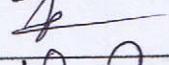
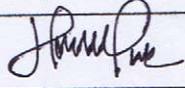
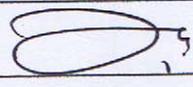
Pukul : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : Aula BAPPELITBANG Kab. HSU

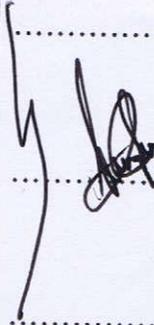
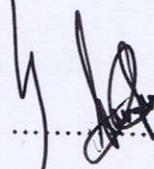
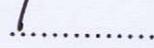
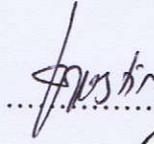
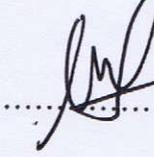
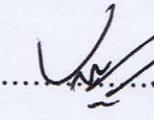
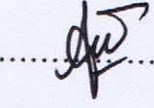
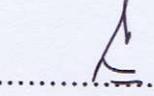
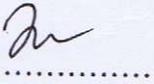
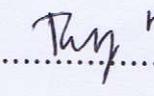
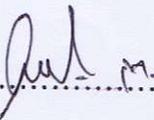
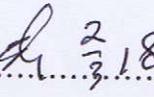
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	MAULANA	FKH	
2.	Syaiful Kar	UUM	
3.	Kanda Saay	UUM	
4.	Ihsan Riwana	ULM	
5.	Pisau	KOMINFO	
6.	Andri	Bappelitbangda HSS	
7.	M. Sofyan Ariandj	---	
8.	M. Ar Ipmi	Bappelitbang	
9.	Basim	---	
10.	Nindyarina Sayitri	Dinas Pendidikan	
11.	Bakris.	Bappelitbang	
12.	M. Erfani	---	
13.	Eko Widi H	Bappelitbang	
14.	Fitri Kuswati	Set. DPRD	
15.	Missy.	Set pol PP CPH	
16.	M. Rafiq	Bag Eko & PAA	
17.	Rehanjel.	Des B.B.	
18.	Saidillah.	Kelompok Rse	

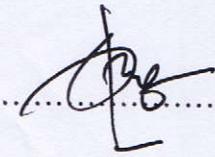
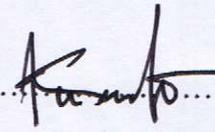
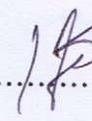
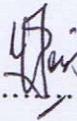
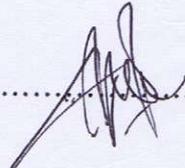
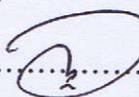
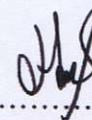
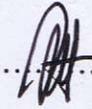
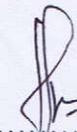
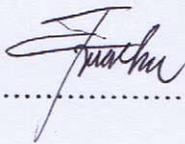
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
19.	Rustan Effendi	Buppelitbang	
20.	Rahman Hakim	WPT. Camat. Ant. WPTA	
21.	Siti Rahmah ufah	FKH	
22.	Siti Sadariah	FKH	
23.	Daryono	Buppelitbang	
24.	Rizqa	FKH	
25.	Posita	Malingai	
26.	Isnanzah	Malingai /FKH	
27.	A-MAXIAHURUK	DISTUB	
28.	Sofan Hariri	Litbang Hsu	
29.	Adha. Ramadhan	Bappelitbang	
30.	H. Furrianta	Buppelitbang Hsu	
31.	Rud G	KORCAMAT BIRIK	
32.	Mislawati	MP PRE KAB Hsu	
33.	Misleng Adi' Iesmana	- 11 -	
34.	Siti Purnama Sari	FKH	
35.	Muhammad Ridha Ansari	Malingai Hsu	
36.	Herlina	Malingai Hsu	
37.	Norhibmah	malingai Hsu	
38.	Asti Murtika	Dshomipa	
39.	H. ROSINO. W	DINAS PERKAMP	
40.	HA JANI	BPPRD	
41.	Rudia R	Rappelitbang	

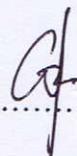
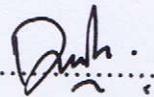
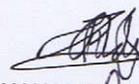
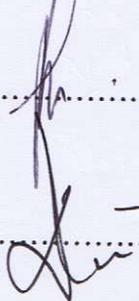
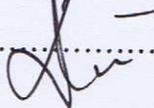
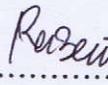
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
42.	Rubraway	Bappeitbang	[Signature]
43.	Fahrudin Noor	Bappelitbang	[Signature]
44.	Hendri S.	—	[Signature]
45.	M. Yajid Kortobas	Bappelitbang	[Signature]
46.	Arit Wanda	Duta Mayor	[Signature]
47.	Fenty Camudris	DLH Kasel	[Signature]
48.	Hardus - W	DWI Pm. kultural	[Signature]
49.	Hj. Dwi Rahay	LAPIN HGU	[Signature]
50.	Dr. Hikmah	DLH Pov.	[Signature]
51.	KAMARIAH	FKH	[Signature]
52.	Budi Saputera	FKH	[Signature]
53.	Hani Job	Dispersi LTH	[Signature]
54.	Fadli	DPKD komisari	[Signature]
55.	Etius Gestrufi	DKP HGU	[Signature]
56.	Mulianto	Dispersi LTH HGU	[Signature]
57.	Budi Lesmana	LTH	[Signature]
58.	A. Zulkarnain	Bappelitbang	[Signature]
59.	Zunaldi	FKH Karana	[Signature]
60.	Hj. NURHANANI AH.	DPKD komisari I	[Signature]
61.	Riki Herusri	kecam Sri Pandan	[Signature]
62.	Ahmed Azzudin	Bappelitbang	[Signature]
63.	Sofiaty	Bappelitbang	[Signature]
64.	M. Mubli Hanani	—	[Signature]

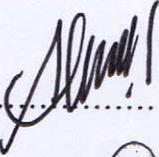
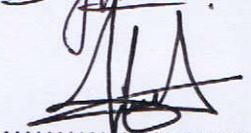
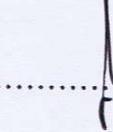
NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
65.	SRI DAMIATUL K	Bappelitbang	
66.	Bud. Sulib	DPUPRP	
67.	Jy Fasmant.	Sekretaris I/WKp.	
68.	Hj Mega	"	
69.	Maludalsona, MP	SIPEK Amt	
70.	Muhammad Riza	Bappelitbang	
71.	M. TAAT PRIYAMBUDI	"	
72.	EKO SETIADI	DPEPLH	
73.	A. Muzailiy	"	
74.	Risa S.	Bappelitbang	
75.	Dany Sanjimanor	Di pindagkoy	
76.	Erma Rusana	DPPKB HSO	
77.	Rachmadi Permang	ISTEP	
78.	Sri Yanti	litbang	
79.	Murui Khatimah	litbang	
80.	Tajeliani	Bappelitbang	
81.	Ahmad Mubarak	Kec. Amuntai Selatan	
82.	CHANDRA S.U	"	
83.	RAHMAT BERKATUHAH	Bappelitbang	
84.	Humaidi	litbang	
85.	Shaleh Maulana	Staff Frans: bolkar	
86.			
87.			

**DAFTAR TANDA TERIMA UNDANGAN
KONSULTASI PUBLIK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) RPJMD
TAHUN 2018**

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.		Sekretaris Daerah	 2/3-2018
2.		Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Lia	Bagian Perekonomian Dan SDA	
5.	Mardha	Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	
6.	M. WAHYA	Sekretariat DPRD	
7.	Hj. Fandulis	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8.	MISLENA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
9.	Ihyatul	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
10.	TEH	RSUD Pambalah Batung	 2/3 2018
11.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	 M. WAHYA
12.	Hj. Eny	Dinas Komunikasi dan Informatika	 2/3 18

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
13.	ICHAHM	Dinas Pertanian	
14.	Khaider Ali	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
15.	Riza Piana	INSPEKTORAT	
16.	Noor Analia F.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
17.	Zuliah H	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	
18.	H.A.ZARUEN	Dinas Perhubungan	
19.	HASAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
20.	Hifni	KESBANGPOL	
21.	H. EKO Purmana	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	
22.	Hadi Hidayat	Dinas Ketahanan Pangan	
23.	Samsuni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
24.	M. Rizo Zihadi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
25.	Mudh	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
26.	Rahmanusala	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
27.	NORSAWAH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
28.	Muslimah	Dinas Kesehatan	
29.	Dimsani	Dinas Pendidikan	
30.	A. Dim	Dinas Perikanan	
31.	Hj. Erniawati	Dinas Sosial	 1/3 2018
32.	Armadianto.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
33.	Rabiatul	Kecamatan Amuntai Tengah	 1/3 2018
34.		Kecamatan Amuntai Selatan	ACC
35.		Kecamatan Amuntai Utara	ACC
36.		Kecamatan Babirik	ACC
37.		Kecamatan Danau Panggang	ACC
38.		Kecamatan Haur Gading	ACC
39.		Kecamatan Sungai Tabukan	ACC
40.		Kecamatan Paminggir	ACC

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
41.		Kecamatan Banjang	
42.	ABD. Hermis	Kecamatan Sungai Pandan	
43.	TINA	Ketua Tim Penggerak PKK	
44.	Haris Fadillah	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	
45.	M. Iqbal	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai	
46.	Hasan	STIQ Rasidiyah Khalidiyah Amuntai	
47.	Mahenderu	STAI Rasidiyah Khalidiyah Amuntai	
48.		Drs. H. Alfian Noor	
49.	Ace	Drs. H. Syukeri Usman	
50.		Yayasan Dinamika Indonesia Swadaya (YDIS)	
51.		LSM Seima Jaya	
52.		Ketua Gapensi Kab. HSU	
53.		Ketua Iwapi Kab. HSU	
54.		Ketua Pemuda Pancasila Kab. HSU	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
55.		FKH RARAWA HSU	ACC
56.		MELINGAI HSU	ACC
57.		Kepala Bappelitbang	} 5/2018
58.		Sekretaris Bappelitbang	} 5/2018
59.		Sekretariat Bappelitbang	} 5/2018
60.		Bidang Perencanaan Ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bappelitbang	} 5/3/2018
61.		Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia Bappelitbang	} 05/3/2018
62.		Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Bappelitbang	} 5/2018
63.			}
64.			}
65.			}
66.			}
67.			}
68.			}



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)

Jl. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

- Acara : Forum Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022
- Hari / Tanggal : Selasa /06 Maret 2018
- Waktu rapat : 09.00 Wita - selesai
- Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
- Pimpinan Acara : Kepala Bappelitbang Kab. HSU
- Peserta Rapat :
 1. Para Anggota Dewan
 2. Para Kepala Badan, Dinas dan Bagian di Kab. HSU
 3. Para Camat
 4. Para Akademisi
 5. Gapensi/Pengusaha
 6. LSM dan tokoh masyarakat
 7. Para Komunitas Pecinta Lingkungan
 8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, dan
 9. 8 (delapan) Bappeda Kabupaten Tetangga
- Maksud Kegiatan : Menerima saran dan masukan dari semua stakeholder yang hadir saat ini untuk penyempurnaan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Susunan Acara dan Hasil : Terlampir

Amuntai, Maret 2018

Notulen

BERITA ACARA

FORUM KONSULTASI PUBLIK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2017 – 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula Bappelitbang, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan acara Forum Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala SKPD, Camat, Tim Pokja KLHS RPJMD Kab. HSU tahun 2017 – 2022, Tim Tenaga Ahli, LSM, Swasta, Akademisi dan Bappeda Kabupaten tetangga dengan agenda meminta persetujuan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, terhadap rekomendasi KLHS untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil rekomendasi KLHS RPJMD 2017 – 2022 terkait tiga pilar pembangunan berkelanjutan (Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya) adalah sebagai berikut :

A. ASPEK LINGKUNGAN

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan:
 - a) Pembuatan gorong-gorong atau box culvert yang sesuai dengan kondisi lapangan dan saluran drainase sepanjang jalan;
 - b) Penghijauan kiri kanan jalan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya diharapkan:
 - a) Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum,
 - b) Pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.
 - c) Pengendalian Tata Air Ekosistem Gambut dan Rawa
3. Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan:
 - a) Pembangunan dengan sistem panggung dan
 - b) Pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
4. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman diharapkan: Masyarakat berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapsras untuk sanitasi yang dihibahkan kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-10 kepala keluarga.
5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan:
 - a) Membuat fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah sludge
 - b) Ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana pengelolaan dan pengolahan air baku
6. Program Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang dan DDDT
7. Program Pengembangan Perumahan perlu:

- a) Pembuatan IPAL/ septiktank kedap air, RTH, Drainase, TPS, sumur resapan, hidrand,
 - b) Pengetatan perizinan lingkungan perumahan
 - c) Mengalokasikan lahan untuk PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan diharapkan:
- a) Konversi pakan yang sesuai tumbuh kembang ikan
 - b) Penggunaan bahan pengawet alami
 - c) Perlu penampungan limbah cair dan padat
 - d) Pembuatan kolam ikan yang sesuai dengan daya dukung lahannya dan
 - e) Penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi
9. Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan:
- a) Pemanfaatan kawasan wisata Sesuai dengan peruntukannya
 - b) Pengelolaan sampah
 - c) Memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat dan
 - d) Pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata

B. ASPEK EKONOMI

1. Program Pengembangan Pasar Daerah, pemanfaatan lahan harus sesuai dengan Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar dan ada pengelolaan limbah.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan harus menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pembuatan kolam ikan harus sesuai dengan peruntukkan lahan dan tata kelola air.
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, harus memperhatikan Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge, lalangit, lunta dll
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, harus memperhatikan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis serta dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan peningkatan luas pertanian padi organik.
5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan perlu penerapan GPF (Good Practice Farming) yaitu Cara beternak dengan baik.
6. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang akan diusahakan.
7. Program pengembangan Industri Kecil Menengah, perlu penggunaan pengawet, penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses pembuatan produk dan pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan.

C. ASPEK SOSIAL BUDAYA

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya perlu Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator yang ada di Kecamatan Sungai Pandan dan Banjang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program Penyelenggaraan BLUD diharapkan menyelesaikan Perizinan Operasional 1 Incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung oleh Kementerian Lingkungan

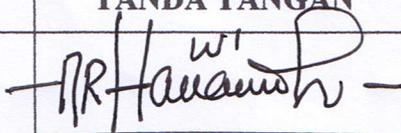
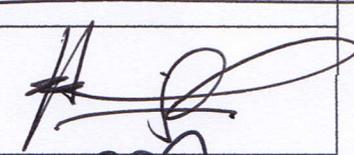
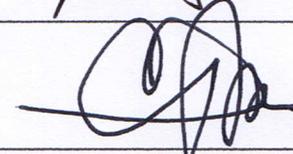
Hidup dan Kehutanan

3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman:
 - a) Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan).
 - b) Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk melindunginya.
 - c) Perlu dibuatkan regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda).
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu.
5. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG, Perlu upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Perlunya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre yang seluas ± 7 ha, sehingga pembangunan venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.

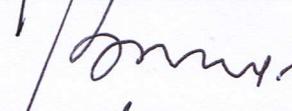
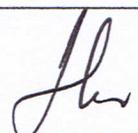
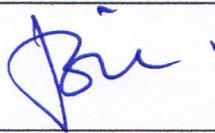
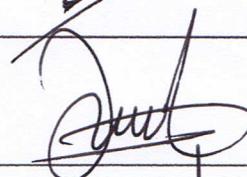
Berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022 tersebut, Para Pihak pemangku kepentingan menyepakati dan menyetujui Hasil Rekomendasi dari KLHS RPJMD Kab. HSU untuk di integrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022.

Demikian Berita Acara Forum Konsultasi Publik KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022 ini dibuat dan dijadikan bahan tindak lanjut untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017- 2022.

AMUNTAI, 06 MARET 2018

PARA PIHAK			
No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Nurhananiah, S.Sos	Ketua Komisi I	
2.	Fadillah	Ketua Komisi II	
3.	H. Fajeri Ripani, S, Sos, M.Si	Kepala Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara	

PARA PIHAK

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
4.	Ir. H. Rusnaidy	Kepala Dinas Perkim & LH	
5.	Ir. Muhamad Rafiq	Kabag Ekonomi dan SDA	
6.	Mislana Adi Lesmana	TP PKK Kab. HSU	
7.	Hj. Fatmawati	IWAPI Kab. HSU	
8.	Budi Lesmana	LSM	
9.	Mahdalena, MP	Stiper Amuntai	
10.	Junaidi Yannurda, SKM	FKH Rarawa	
11.	Muhammad Ridha Ansari	Melingai HSU	



FORUM KONSULTASI PUBLIK KLHS RPJMD KAB. HSU

Aula Bappelitbang Kab.HSU, 06 Maret 2018













VALIDASI





BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 050/002/LITSANG/BAPPELITBANG/2018
Lamp : 4 berkas
Perihal : Permohonan Validasi KLHS
RPJMD Kab. HSU 2017-2022

Amuntai, 7 Maret 2018

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Selatan

di-

Tempat

Sehubungan dengan selesainya tahapan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS serta penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, maka tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan KLHS adalah validasi KLHS, hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan permohonan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, dengan menyertakan kelengkapannya berupa:

1. Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022
2. Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022
3. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Tenaga Ahli

Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.





BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 050/002/LITSANG/BAPPSELITBANG/2018
Lamp : 4 berkas
Perihal : Permohonan Validasi KLHS
RPJMD Kab. HSU 2017-2022

Amuntai, 7 Maret 2018

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Selatan

di-

Tempat

Sehubungan dengan selesainya tahapan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS serta penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, maka tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan KLHS adalah validasi KLHS, hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan permohonan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, dengan menyertakan kelengkapannya berupa:

1. Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022
2. Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022
3. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Tenaga Ahli

Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.



Rahmah 8/3/2018



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Dis. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.Si

BERITA ACARA VALIDASI KLHS RPJMD

NOMOR : 660/01 /DLH/TL/KLHS/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. ENDANG CAMSUDIN, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Kalsel
Alamat : Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Fajeri Ripani, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bepelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat : Jl. A. Yani No.14 Amuntai

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/39/ST/Bappelitbang/2018 tanggal 21 Maret 2018

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Validasi KLHS dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2017 - 2022 yang terdiri dari proses penjaminan kualitas, keputusan kelayakan KLHS, Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas, Pertimbangan - pertimbangan Khusus, dan Rekomendasi Hasil Validasi disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Validasi KHLs RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

PIHAK KEDUA
PEMUDA KABUPATEN HSU

H. FAJERI RIPANI, S.Sos, M.Si
NIP. 19620408 198503 1 009

PIHAK PERTAMA
DLH PROV. KALSEL,

Ir. ENDANG CAMSUDIN, M.Si.
NIP. 19660412 199203 1 016

LAMPIRAN BERITA ACARA VALIDASI KLHS RPJMD

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas

Kriteria		Validasi	Ket.
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:		Nilai : <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum <input type="checkbox"/> Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	Sudah	
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	Sudah	
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	Ada catatan	Perbaiki laporan KLHS

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS

Kriteria		Pemenuhan	Ket
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami :		Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi Ketentuan	Sudah	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	Sudah	
4.	Apakah muatan KLHS memenuhi kaidah	Sudah	
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	Sudah	
6.	Apakah ada catatan dan / atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	Sudah	

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas

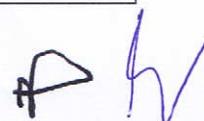
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	Sudah	
2	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	Ada catatan	kajian lebih mendalam dalam hal program sanitasi

Bagian IV : Pertimbangan – pertimbangan Khusus

Kriteria		Pemenuhan	Ket
1	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	Sudah	
2	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	Sudah	

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi

Pokok-pokok Rekomendasi		Pemenuhan	Ket
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi ?			
1	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan / atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis ?	Sudah	
2	Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini ?	Sudah	
3	Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	Sudah	
4	Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini ?	Sudah	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.4/ 01/KLHS/2018

TENTANG

VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor 050/002/Litbang/Bappelitbang/2018, tanggal 7 Maret 2018 mengajukan permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan teknis Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tentang Validasi Kajian Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 228);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0505/KUM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, dinyatakan sesuai dengan penjaminan kualitas.
- KEDUA : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah memuat kajian terhadap:
- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
 - b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
 - c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
 - d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
 - e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim
 - f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

- KETIGA** : Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program dijadikan dasar rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Masa berlaku KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 sama dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
- KELIMA** Apabila dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersama dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- KEENAM** : Apabila hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung terlampaui, maka:
- a. kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS;
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan, sesuai amanah Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANJARBARU

Pada tanggal : 29 Maret 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Bapak Bupati Hulu Sungai Utara, di Amuntai.
3. Kepala Bapelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Amuntai
4. Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Amuntai